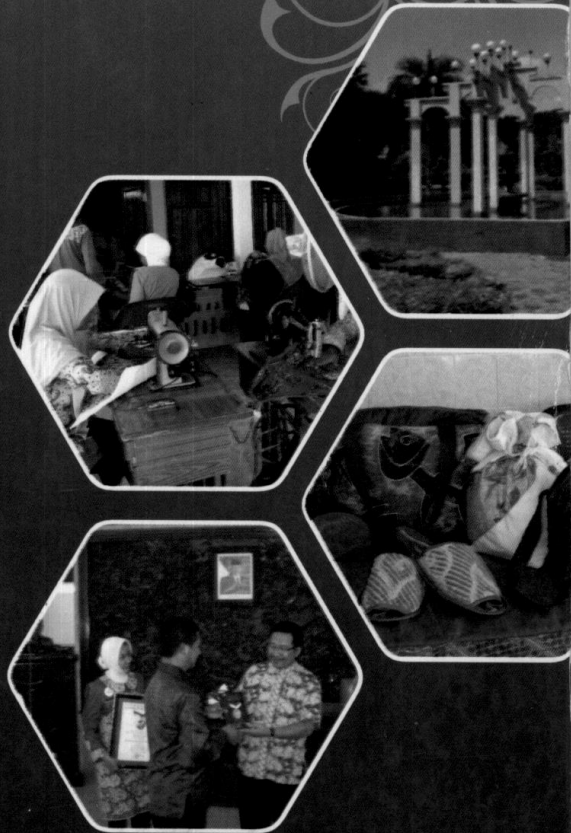


Profil Gender

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
2011

Profil Gender

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

2011

PROTON

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

2011

TIM PENYUSUN

Ketua

Mufidah Cholil

Anggota

Hasan Basri

Miftahus Sholehudin

JIM FLYNN

1913

March 1913

April

May

June

III

SAMBUTAN

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunianya sehingga penyusunan buku “Profil Gender Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan agar dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan.

Sejak memasuki Abad ke 21 ini perhatian dunia terhadap kesetaraan gender semakin meningkat. Isu-isu tentang kesenjangan gender menjadi masalah serius yang urgen untuk direspon, sebab jika dibiarkan akan menghambat terwujudnya pemerataan kesejahteraan sosial sebagai tujuan pembangunan. Sejumlah komitmen internasional disusun tidak hanya untuk mengantisipasi munculnya diskriminasi, tetapi juga untuk memberikan solusi baik melalui kebijakan negara maupun kekuatan masyarakat sipil. Di antara komitmen tersebut adalah CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) tahun 1978, dan kebijakan *Gender Mainstreaming* (1995).

Sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga proaktif dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam bentuk ratifikasi komitmen internasional tersebut antara lain UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 Tentang Peng-

arusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Karena itu implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional maupun daerah merupakan keniscayaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008, sebagaimana tertuang dalam Bab III, Pasal 4 bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana strategis SKPD, dan rencana kerja SKPD. Sedangkan Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berperspektif gender dimaksud diperlukan data pembuka wawasan terpilah berdasarkan jenis kelamin agar dalam siklus pembanguan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, kondisi riil laki-laki dan perempuan sehingga dapat menjamin partisipasi dan kontribusi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan daerah, serta keduanya sama-sama mendapatkan manfaat dari pembangunan.

Dengan diterbitkannya buku ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.Suyoto, MSi, selaku Bupati Bojonegoro;
2. Bapak Drs. H. Soehadi Moeljono, MM, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Ibu dr. Hj. Anik Yuliarsih, M.Si, selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro

Kepala Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, Ketua DPRD, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bakesbangpolinmas, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Direktur Bank Jatim, Direktur Bank BRI, Direktur Bank Perkreditan Rakyat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Ketua Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan bantuan dan dukungan data-data yang diperlukan untuk penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda.

Buku yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan baik metode penulisan maupun substansi yang ditawarkan kepada pembaca, oleh karena itu kritik dan saran secara konstruktif dari pembaca sangat diharapkan. Semoga bermanfaat, *amin ya mujibah sailin*.



Malang, Desember 2011

Ketua

DR. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag

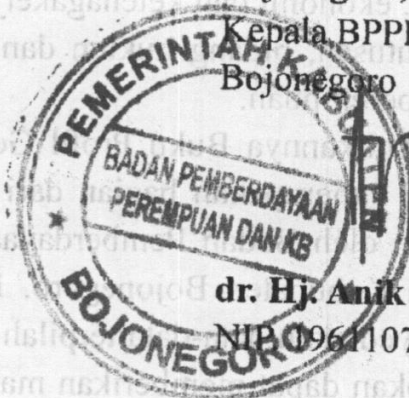
NIP. 19600910 198903 2 001

Buku Profil Gender Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 ini merupakan buku profil gender pertama sebagai *best practice* implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, data-data yang dipaparkan masih sangat terbatas dan jauh dari sempurna. Sekurang-kurangnya data yang tersedia diharapkan bermanfaat dalam membantu para pengambil kebijakan untuk semakin meningkat dan proaktif dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada tahun yang akan datang.

Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Drs. H. Suyoto, M.Si selaku Bupati Bojonegoro; Bapak Drs. H. Soehadi Moeljono, MM, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Ibu DR.Hj. Mufidah Cholil, M.Ag, selaku Ketua LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta Tim penyusun yang telah bekerja keras hingga buku profil ini terbit. Tak lupa ucapan dan penghargaan saya sampaikan kepada segenap Kepala Dinas, Badan, Kantor/Instansi Pemerintah yang berada di Kabupaten Bojonegoro, yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan atas terbitnya buku ini, semoga Allah senantiasa membalasnya. Amin.

Bojonegoro, Desember 2011

Kepala BPPKB Kabupaten
Bojonegoro



dr. Hj. Anik Yuliarsih, M.Si

NIP. 096110729 198901 2 002

KATA PENGANTAR

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Permeneg PP) Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Terpilah Gender dan Anak. Pada Permeneg tersebut beberapa pemahaman yang sangat penting untuk diskripsikan, diantaranya adalah pemahaman bahwa; *Pertama*, penyelenggaraan data gender dan anak adalah upaya pengelolaan data pembangunanyang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan PUG dan PUHA; *Kedua*, data terpilah gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan diterbitkannya Buku Profil Gender Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 merupakan bagian dari kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyediakan data-data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pejabat, aparat maupun pihak-pihak yang memerlukannya agar seluruh program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.

SAMBUTAN

Bupati Bojonegoro

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga Buku Profil Gender Kabupaten Bojonegoro 2011 ini dapat diterbitkan sesuai dengan harapan.

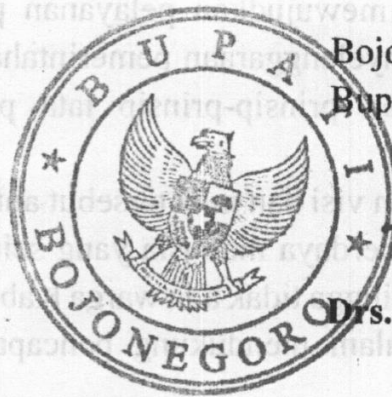
Sebagaimana tertuang dalam Visi Kabupaten Bojonegoro “Kebangkitan Menuju Bojonegoro Yang Sejahtera, Madani dan Berdaya Saing”, dan dalam Misinya Tahun 2009-2013 dirumuskan: *Pertama*, meningkatkan keshalehan sosial masyarakat yang didukung oleh pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara murni dan konsekuen; *Kedua*, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai daya utama pembangunan; *Ketiga*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan; *Keempat*, mewujudkan pelayanan publik yang prima yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut antara lain diperlukan partisipasi seluruh sumberdaya manusia yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada warga Kabupaten Bojonegoro yang termarginalkan dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah.

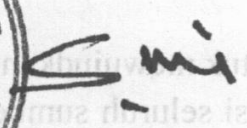
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2013 bahwa merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Hal ini terkait pula dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah yang tepat, jelas dan *legitimate* yang diperlukan sebagai prasyarat terselenggaranya *good governance*.

Dengan arah kebijakan demikian ini maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Implementasi Pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro akan semakin mempercepat tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro dimaksud.

Dengan terbitnya Buku Profil Gender Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 ini saya perlu menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dan kepada Tim Peneliti dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berhasil menerbitkan buku ini, serta semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga kehadiran Buku Profil Gender ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang “Matoh dan Ramah gender”. Amin.



Bojonegoro, Desember 2011
Bupati Bojonegoro


Drs. H. Suyoto, M.Si

DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	iii
Sambutan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	v
Kata Pengantar Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.....	ix
Sambutan Bupati Bojonegoro.....	xi
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Kajian Teori.....	13
Bab III Diskripsi Umum Kabupaten Bojonegoro.....	27
Bab IV Bidang Kesehatan.....	39
Bab V Bidang Pendidikan.....	55
Bab VI Bidang Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Komunikasi.....	65
Bab VII Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan.....	87
Bab VIII Bidang Hukum dan Sosial Budaya.....	117
Bab IX Kekerasan Terhadap Perempuan.....	129
Bab X Isu-isu Strategis Kesenjangan Gender di Kabupaten Bojonegoro.....	153
Bab XI Penutup.....	167

DAFTAR ISI

1	Pendahuluan
2	1.1 Latar Belakang
3	1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup
4	1.3 Manfaat Penelitian
5	2. Tinjauan Pustaka
6	2.1 Konsep Dasar
7	2.2 Penelitian Terdahulu
8	3. Metodologi Penelitian
9	3.1 Jenis Penelitian
10	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
11	3.3 Teknik Pengumpulan Data
12	3.4 Teknik Analisis Data
13	4. Hasil dan Pembahasan
14	4.1 Deskripsi Data
15	4.2 Pembahasan
16	5. Kesimpulan dan Saran
17	5.1 Kesimpulan
18	5.2 Saran
19	6. Daftar Pustaka
20	7. Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Cakupan Wilayah Kecamatan, Desa, Dusun/RW dan RT di Kabupaten Bojonegoro 2011	30
Tabel 3.2	Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Kecamatan dan Status Pekerjaan.....	32
Tabel 3.3	Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	33
Tabel 3.4	Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin	35
Tabel 4.1	Jumlah Kematian Ibu Hamil Tahun 2010-2011 di Bojonegoro	40
Tabel 4.2	Penyebab Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas.....	41
Tabel 4.3	Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro Menurut Kecamatan Tahun 2011	42
Tabel 4.4	Jumlah Imunisasi TT Menurut Kecamatan	43
Tabel 4.5	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil Ke Pelayanan Kesehatan.....	43
Tabel 4.6	Jumlah PUS di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Umur	45
Tabel 4.7	Jumlah Akseptor KB Bagi Perempuan Di Kab. Bojonegoro	47
Tabel 4.8	Jumlah Akseptor KB Bagi Pria Kab.Bojonegoro Tahun 2011	49
Tabel 5.1	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	57

Tabel 5.2	APM di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 5.3	Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 6.1	Jumlah Tenaga Migran Antar Kerja Antar Daerah Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin	66
Tabel 6.2	Jumlah Tenaga Migran AKAN Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin.....	68
Tabel 6.3	Data Terpilah UKM Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	71
Tabel 6.4	Keanggotaan Koperasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	76
Tabel 6.5	Data Pinjaman Kredit Bank Jatim Menurut Jenis Kelamin	78
Table 6.6	Jumlah Pinjaman dan Peminjam Kredit BPR Bank Daerah Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin	79
Table 6.7	Pinjaman Dana Bank Menurut Jenis Kelamin.....	80
Tabel 6.8	Rekapitulasi Peminjam Dana Bank Menurut Jenis Kelamin	80
Tabel 6.9	Pelanggan Saluran Telepon Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011	82
Table 7.1	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin.....	88
Tabel 7.2	Jumlah Anggota Komisi DPRD Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin.....	91
Tabel 7.3	Jumlah Kepala Desa Perempuan di Kabupaten Bojonegoro Menurut Kecamatan.....	92
Tabel 7.4	Anggota LKMD Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin	94
Tabel 7.5	Personil POLRI POLRES Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011	96
Tabel 7.6	Anggota lembaga yudikatif di Kabupaten Bojonegoro Sesuai Jenis Kelamin.....	97

Tabel 7.7	Kepengurusan Partai Politik Menurut Jenis Kelamin	97
Tabel 7.8	Anggota PNS Sekda dan DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	99
Tabel 7.9	Data PNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin	100
Tabel 7.10	PNS Pada Badan di Kab.Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	101
Tabel 7.11	PNS di RSUD Kab. Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	102
Tabel 7.12	PNS Pada Kantor Kab.Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	103
Tabel 7.13	PNS Pada Kecamatan di Kab.Bojonegoro Menurut Jenis KelaminTahun 2011	103
Tabel 7.14	Jabatan Fungsional& Struktural Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 201 Menurut Jenis Kelamin	105
Tabel 7.15	Jabatan Fungsional & Struktural Pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	106
Tabel 7.16	Jabatan Fungsional & Struktural Pada RSUD Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin	107
Tabel 7.17	Pejabat Fungsional & Struktural Pada Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	107
Tabel 7.18	Jabatan Fungsional & Struktural Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	108
Tabel 7.19	Pejabat Fungsional & Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin	108

Tabel 7.20	Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin	109
Tabel 7.21	Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Badan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	110
Tabel 7.22	Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV RSUD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin	111
Tabel 7.23	Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	111
Tabel 7.24	Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	112
Tabel 7.25	Pejabat Fungsional Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin	112
Tabel 8.1	Jumlah Penghuni LAPAS Kls II Kabupaten Bojonegoro Menurut Tingkat Pendidikan	118
Tabel 8.2	Data Kasus Pidana Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin.....	120
Tabel 8.3	Pentahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011	123
Tabel 9.1	Perempuan Korban Kekerasan Menurut Umur di Tiap Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011	132
Tabel 9.2	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011	134
Tabel 9.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011	136

Tabel 9.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Status Perkawinan	138
Tabel 9.5	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kekerasan	140
Tabel 9.6	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan di Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Tingkat Pendidikan	143
Tabel 9.7	Pelaku Tindak Kekerasan Di Bojonegoro Menurut Jenis Pekerjaan.....	145
Tabel 9.8	Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban di Kabupaten Bojonegoro 2011	147

134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DAFTAR DIAGRAM

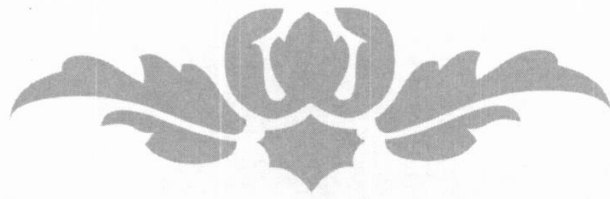
Diagram 3.1	Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Kecamatan dan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin	34
Diagram 3.2	Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin	36
Diagram 4.1	Jumlah PUS di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Umur	46
Diagram 4.2	Data Akseptor KB Bagi Perempuan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011	48
Diagram 4.3	Jumlah Akseptor KB Bagi Pria Kab. Bojonegoro Tahun 2011	50
Diagram 5.1	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin	58
Diagram 5.2	APM sesuai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin	59
Diagram 5.3	Jumlah Anak Putus Sekolah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	62
Diagram 6.1	Prosentase Tenaga Migran Antar Kerja Antar Daerah Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin	67
Diagram 6.2	Data Terpilah UKM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin	73

Diagram 6.3	Keanggotaan Koperasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin	74
Diagram 6.4	Pelanggan Saluran Menurut Jenis Kelamin Telepon Tahun 2011	82
Diagram 7.1	Prosentase Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin	90
Diagram 7.2	Prosentase Anggota Komisi DPRD Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin	91
Diagram 7.3	Kepengurusan LKMD Menurut Jenis Kelamin	95
Diagram 7.4	Prosentase PNS Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011.....	104
Diagram 7.5	Jumlah PNS Jabatan Fungsional Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin	114
Diagram 8.1	Prosentase Jumlah Penghuni Lapas Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenjang Pendidikan	119
Diagram 8.2	Prosentase Lansia di Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin	121
Diagram 8.3	Jumlah Penyandang Cacat Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin	122
Diagram 8.4	Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011	124
Diagram 8.5	Prosentase Program Perlindungan Sosial.....	125
Diagram 9.1	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Umur Tahun 2011	134
Diagram 9.2	Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011	135
Diagram 9.3	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Status Pekerjaan	137
Diagram 9.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Status Perkawinan.....	139

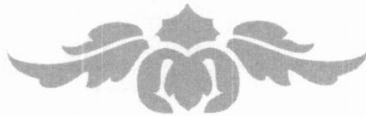
Diagram 9.5	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kekerasan	141
Diagram 9.6	Pelaku Tindak Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Tingkat Pendidikan.....	144
Diagram 9.7	Jumlah Pelaku Tindak Kekerasan di Bojonegoro Berdasarkan Status Pekerjaan ...	146
Diagram 9.8	Jumlah Pelaku Dalam Hubungannya Dengan Korban	148

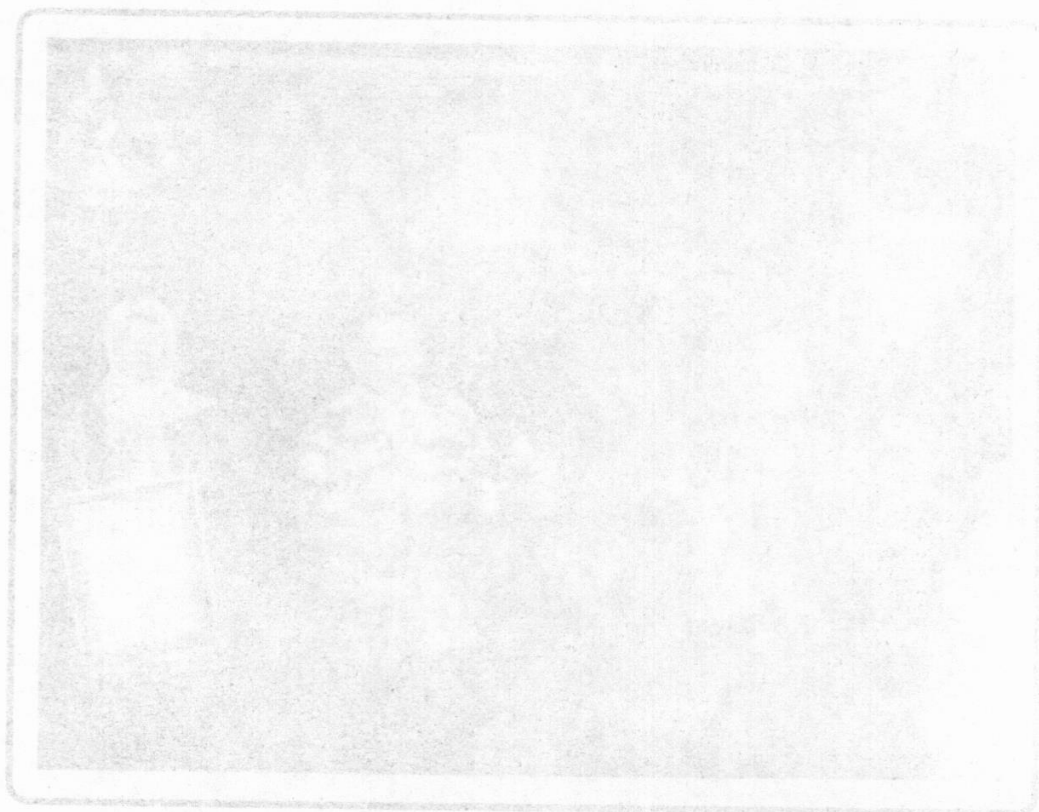
DAFTAR GRAFIK

Grafik 6.1 Jumlah Tenaga Migran AKAN Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin	69
Grafik 6.1 Perbandingan Nasabah Tiga Bank Menurut Jenis Kelamin	81
Grafik 7.1 Jumlah Kepengurusan Partai di Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin	98



Pendahuluan





Geographical

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan kesetaraan gender merupakan bagian utama dari strategi pembangunan tanpa diskriminasi dengan tujuan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Fenomena diskriminasi yang berbasis gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Meskipun saat ini telah terjadi kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender, namun kesenjangan gender dalam pembangunan masih menyisakan persoalan.

Diskriminasi gender di berbagai negara cukup bervariasi, terutama di bidang pendidikan, hukum, sosial, budaya dan ekonomi. Dampaknya bisa merugikan semua orang dan kepentingan Negara. Meskipun hal ini telah menjadi fakta sosial di masyarakat, namun belum menjadi kesadaran bersama dan komitmen utuh dalam mengatasi masalah ini. Sementara itu, kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa isu gender dan kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, trafiking, ketenagakerjaan khususnya perempuan masih terus menerus berlangsung.

Meskipun pembangunan nasional pada hakikatnya ditujukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, namun dalam kenyataannya antara laki-laki dan perempuan masih terjadi ketimpangan, baik terkait dengan kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan maupun kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan. Dalam konteks ini perempuan justru sering pada

posisi sebagai korban pembangunan. Hal ini disebabkan antara lain terjadi kekeliruan dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, di mana program kegiatan masih diarahkan pada peningkatan peran perempuan bukan mengatasi kesenjangan gender yang terjadi (Muhajir, 2005: 114).

Dalam bidang pendidikan misalnya, ketika jenjang pendidikan masih rendah, perbedaan partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan tidak mencolok. Namun pada jenjang pendidikan semakin tinggi, partisipasi perempuan semakin rendah dibandingkan laki-laki. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Orang tua tidak mampu membiayai sekolah, tidak tersedianya sarana pendidikan yang memadai, atau disebabkan adanya diskriminasi perlakuan orang tua terhadap anak, dimana anak laki-laki lebih diutamakan untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi dari pada anak perempuan.

Di bidang kesehatan, kesenjangan ini tampak, misalnya pada angka kematian ibu melahirkan yang tergolong tinggi, kerentanan perempuan terhadap penularan HIV/AIDS. Di sisi lain masih ditemukan gizi buruk bagi ibu dan balita, yang disebabkan antara lain oleh faktor sosial budaya, ekonomi, dan kebijakan. Di bidang ekonomi, keterlibatan perempuan memang makin meningkat, namun di bidang ketenagakerjaan, partisipasi perempuan belum optimal, karena masih cenderung rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan masih adanya anggapan umum yang berlaku di masyarakat bahwa peran perempuan adalah di ruang domestik bukan di dunia pekerjaan pada ruang publik. Meskipun dalam realitasnya perempuan harus berperan pula sebagai tulang punggung keluarga.

Di bidang politik meskipun pemerintah telah memberikan himbauan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dalam implementasinya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih rendah, belum mencapai kuota yang diharapkan. Peran pengambil keputusan publik ini sangat strategis untuk mengakomodir aspirasi perempuan yang selama ini masih termarginalkan dan memperoleh perhatian khusus. Di bidang sosial budaya dan lingkungan,

kultur patriarkhi sering menghambat perempuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu diperlukan pembangunan yang demokratis yang mampu mengakomodir kebutuhan laki-laki maupun perempuan dalam semua proses pembangunan, yang dikenal dengan “pembangunan partisipatif”.

Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, konsep partisipatif banyak dipakai secara luas dalam praktek penyelenggaraan pembangunan, yang menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berhasil kecuali bila masyarakat termasuk perempuan berperan secara aktif dan menuangkan potensinya. Rakyat, baik laki-laki maupun perempuan benar-benar ditempatkan sebagai subyek dan bukan objek pembangunan. Pembangunan berbasis partisipasi juga diharapkan dapat mengubah stigmatisasi terhadap perempuan sebagai kelompok masyarakat marjinal, menjadi beban pembangunan akan bergeser pada pandangan yang berkesetaraan gender. Dengan demikian setiap warga masyarakat menjadi aktor pembangunan, yang berhak melakukan identifikasi permasalahan, identifikasi potensi, identifikasi kebutuhan, merencanakan pembangunan sekaligus terlibat dalam proses mencapai hasil pembangunan yang diinginkan.

Peningkatan kualitas, status dan peran perempuan dalam pembangunan untuk meningkatkan keadilan sosial, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang setara antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan *good governance*. Salah satu upaya strategis yang terkait dengan isu kesetaraan dan keadilan gender adalah menjadikan *gender mainstreaming* sebagai ruh dan arus utama dalam pembangunan (Khofifah, 2006:1-2).

Gender Mainstreaming (Pengarusutamaan Gender) telah diadopsi secara resmi di Indonesia sejak tahun 2000 dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 Tahun 2000. Lahirnya dasar hukum ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti kesepakatan internasional, serta desakan masyarakat sipil agar pemerintah melakukan tindakan kongkrit dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender, untuk selanjutnya disingkat dengan “PUG” telah berjalan sejak dikeluarkannya Inpres RI No. 9 Tahun 2000, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan dan tantangan (Cattleya, 2006: 45).

Upaya pengorganisasian dalam kelembagaan antara lain melalui pengaktifan kelompok kerja (Pokja) gender, *Gender Focal Point*, konsultasi sektoral, lokal, dan publik serta dukungan kekuatan sipil (*civil society*), berkesinambungan, peningkatan sensitifitas gender bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional hingga di tingkat daerah agar PUG menjadi spirit dalam pandangan, tindakan dan kebijakan yang terintegrasi dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian akan terwujud pengembangan lingkungan kerja yang kondusif, pengembangan kepemimpinan perempuan, peningkatan kapasitas kelembagaan, membangun jaringan kerja untuk menjamin kepastian akses, kontrol, dan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam Visi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 **“Kebangkitan Menuju Bojonegoro Yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Untuk mewujudkan visi tersebut antara lain diperlukan partisipasi seluruh sumberdaya manusia yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada warga Kabupaten Bojonegoro yang termarginalkan dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2013 bahwa merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Hal ini terkait pula dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah yang tepat, jelas dan *legitimate* yang diperlukan sebagai prasyarat terselenggaranya *good governance*. dengan arah kebijakan demikian ini maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Permeneg PP) Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Terpilah Gender dan Anak. Pada Permeneg tersebut beberapa pemahaman yang sangat penting untuk diskripsikan, diantaranya adalah pemahaman bahwa; *Pertama*, penyelenggaraan data gender dan anak adalah upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan PUG dan PUHA; *Kedua*, data terpilah gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

Untuk mewujudkan RPJM tersebut Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi sejumlah masalah, antara lain di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, angka kemiskinan masih mencapai 566.695 orang, pengangguran sebanyak 151.523 orang (22,85%). Di bidang pendidikan, angka partisipasi murni SD/MI 96,58%, tingkat SLTP/MTs 96,76%, dan di tingkat SMA/MA/SMK sebanyak 50,25%. Di bidang kesehatan masih perlu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, masih rendahnya perilaku hidup bersih, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akibat ekonomi masih rendah, dan kualitas maupun kuantitas tenaga kerja masih rendah. Dalam konteks ini sebuah kebijakan publik merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial (Edi Suharto, 2005: 44), yang antara lain melalui peran pengambilan keputusan publik dengan keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan yang dilengkapi dengan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam konteks pembangunan yang berbasis kesetaraan gender.

Di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan beberapa upaya menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Sejak tahun 2003, setelah diselenggarakannya sosialisasi PUG oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur, dilanjutkan dengan advokasi oleh berbagai pihak antara lain adalah Pusat Studi Gender UIN Malang untuk

- a) mendorong berdirinya Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak, yang terbukti kinerjanya cukup aktif dalam melakukan sosialisasi dan advokasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro dan dinas/instansi terkait;
- b) bersama kekuatan sipil lainnya melakukan advokasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif pada Pemilu tahun 2004 dan telah terbukti bahwa jumlah perempuan di legislatif meningkat tajam dari 2 orang (kurang dari 2%) menjadi 7 orang (lebih dari 15%) perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif di Kabupaten Bojonegoro. Di samping sisi keberhasilan tersebut, Kabupaten Bojonegoro telah memiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai leading sector untuk menjamin implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Mufidah Ch (2007) dengan judul "Pandangan Para Pengambil Kebijakan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah", disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, para pengambil kebijakan di Pemda Kabupaten Bojonegoro belum memiliki pemahaman yang sama tentang konsep kesetaraan gender. Pada prinsipnya para pengambil kebijakan menyatakan bahwa kesetaraan gender merupakan konstruksi sosial yang dapat diubah. Perubahan ini dapat dilakukan secara bertahap melalui kebijakan di tingkat struktural dengan implementasi PUG, dan didukung pula oleh jaringan antar lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat secara massif; *Kedua*, pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam program pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro

belum sepenuhnya mengikuti pedoman umum pelaksanaan PUG sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 dan belum menindaklanjuti Surat Mendagri No. 411/134/SJ, tertanggal 15 Juni 2006 (sebelum adanya Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah). Namun seluruh pengambil kebijakan (para informan) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten Bojonegoro; *Ketiga*, sebagian Dinas dan Badan telah melakukan upaya penerapan PUG namun belum membuahkan hasil yang signifikan sehingga belum mampu menembus perubahan kebijakan responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu rekomendasi yang diharapkan dalam penelitian tersebut antara lain adalah tersedianya “Profil Gender Kabupaten Bojonegoro” sebagai data pembuka wawasan dan landasan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi capaian pembangunan daerah.

Atas dasar uraian di atas, perlu dilakukan penyusunan buku yang berjudul **“Profil Gender Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011”** oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana guna memberikan gambaran yang lebih lengkap pencapaian pembangunan berwawasan gender melalui implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Bojonegoro.

B. Tujuan Penulisan

Dalam rangka menyelenggarakan perencanaan pembangunan yang responsif gender diperlukan data yang menggambarkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Penulisan buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara statistik mengenai kesenjangan gender dalam bidang demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan keluarga berencana, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta permasalahan lain yang dihadapi perempuan dan laki-laki khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Kegunaan Buku Profil Gender

1. Secara teoritis, buku ini dapat menambah khazanah tentang gambaran umum situasi kesetaraan gender maupun disparitas gender yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, sebagai upaya menumbuhkembangkan sensitifitas dan responsibilitas gender bagi pembacanya.
2. Secara praktis, buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan publik dan pihak-pihak terkait dengan data pembuka wawasan tentang kesetaraan gender untuk mengintegrasikan PUG dalam siklus pembangunan, dan mengadvokasi pelaksanaan PUG di masa mendatang. Juga sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang PUG dalam pembangunan.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Buku Profil Gender Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 ini adalah:

1. **Data primer:** Data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen meliputi: Data pilah menurut jenis kelamin Kabupaten Bojonegoro dalam angka, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh lembaga di jajaran pemerintah daerah. Data dimaksud meliputi bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, keterwakilan, anak dan perlindungan anak, lansia dan penyandang cacat, yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bakesbangpolinmas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bank Jatim, BRI, Bank Perkreditan Rakyat Daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro.

2. **Data sekunder:** Data/informasi yang diperoleh melalui wawancara pada sejumlah pejabat instansi tingkat kabupaten, untuk memperoleh gambaran lebih lengkap dan spesifik tentang data pilah menurut jenis kelamin yang tersedia pada SKPD terkait, faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender di Kabupaten Bojonegoro. Adapun data dimaksud meliputi: Bidang Kesehatan; Pendidikan; Ekonomi dan ketenagakerjaan; Politik dan Pengambilan Keputusan; Hukum dan Sosial-budaya; serta Kekerasan terhadap perempuan.

E. Metode Analisis Data

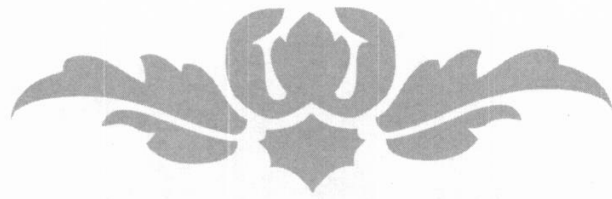
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yakni penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta lingkungannya, dengan tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan tema alam. Karena itu proses pengukuran merupakan bagian sentral dalam penelitian ini yakni memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empirik dan ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif.

Dalam penelitian Profil Gender ini, adalah menganalisis perbedaan status, peran, dan tanggungjawab yang mencakup akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan dengan Indikator Pembangunan Gender. Adapun metode analisa data yang digunakan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

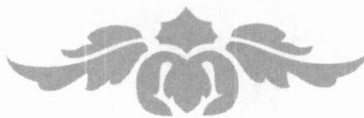
1. Analisis Prosentase dengan rumus : $F : N \times 100$
2. Analisis Disparitas dengan rumus : Kinerja X – Kinerja Y
3. Analisis Indekparitas dengan rumus : Kinerja X : Kinerja Y

Untuk selanjutnya: **Disparitas di singkat menjadi “Dis P”**

Indek paritas disingkat menjadi “IP”



Kajian Teori





Kilian Teori

Bab 11

Kajian Teori

A. Gender Sebagai Konstruksi Sosial di Masyarakat

Studi tentang gender bukan hanya sekedar sebuah upaya memahami perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial yang integral. Konstruksi sosial yang cenderung membedakan laki-laki dan perempuan, berdampak tidak hanya pada pengalaman yang berbeda antara keduanya, tetapi terjadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender ini menjadi prolem pembangunan, khususnya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

Ketika perbedaan yang berakar dari kelas sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras dan warna kulit maupun perbedaan agama yang melahirkan masalah ketidakadilan sosial di masyarakat, secara bertahap dapat diatasi seiring dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, namun perbedaan jenis kelamin (gender) masih merupakan persoalan yang hingga kini belum selesai. Fenomena ini bukan hanya terjadi di negara terbelakang, dan negara berkembang, tetapi juga menjadi perjuangan perempuan di negara maju.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender sulit dilakukan secara cepat, karena masih mengalami kendala-kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya, interpretasi agama, dan kebijakan politik. Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh lini kehidupan perlu dilakukan secara terus

menerus dan bertahap, baik dilakukan melalui kebijakan formal oleh negara maupun kebijakan informal oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama, keduanya menghadapi kendala-kendala struktural maupun kultural. Kesetaraan dan keadilan gender akan terwujud jika secara personal masing-masing individu telah memiliki sensitifitas gender, dan diikuti pula oleh kebijakan responsif gender di semua lembaga, instansi, organisasi pemerintah (*government*) maupun swasta (*non government*).

Kata 'gender' telah digunakan di Amerika tahun 1960 an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Menurut Eline Sholwalter(1989) sebagaimana dikemukakan Umar (1999: 36) bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan *patriarchal* kemudian menggantikannya dengan isu gender. Sejak itu konsep gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia ketiga. Adapun di Indonesia, istilah gender lazim dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan "jender", diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan (Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992:2).

Lips (1993:4) mengartikan 'gender' sebagai *cultural expectations for women and men* atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Wilson (1998:2) dan Elaine Sholwalter seperti yang dikutip Zaitunah (2002:13) bahwa gender bukan hanya sekedar pembedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Karena itu, kata "gender" banyak diasosiasikan dengan kata yang lain, seperti ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya, keduanya sulit untuk diberi pengertian secara terpisah. Adapun dalam Kepmendagri No. 132 disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat ber-

ubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (Kepmendagri No. 132 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1).

Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula, bersifat universal dan permanen, tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau *kodrat*. Dari sini melahirkan istilah *identitas jenis kelamin*.

Dengan demikian peneliti sampai pada kesimpulan bahwa, jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang melekat pada keduanya. Jenis kelamin adalah tafsir sosial atas perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Disebut dengan pembedaan karena konstruksi sosial yang membentuk menjadi laki-laki dan menjadi perempuan mengalami proses dan perubahan. Dalam konteks ini gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial.

Perbedaan jenis kelamin sering digunakan masyarakat untuk mengkonstruksi pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Pada pembagian kerja gender atas jenis kelamin di mana laki-laki dan perempuan melakukan jenis pekerjaan yang berbeda. Pembagian ini dipertahankan serta dilakukan secara terus menerus. Pembagian kerja berdasar gender tidak menjadi masalah selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan.

Dalam realitas kehidupan, pembedaan peran sosial laki-laki dan perempuan di atas melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Pembagian peran gender yang diberikan pada laki-laki dan perempuan, sifat kegiatan, dan jenis pekerjaan yang berbeda, seolah-olah laki-laki hanya dapat melakukan jenis pekerjaan tertentu, sebaliknya perempuan juga hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu pula. Pada umumnya masyarakat memandang tidak lazim jika peran

tersebut ditukar atau diubah. Peran gender (*gender role*) tersebut kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat.

Pandangan demikian ini berdampak pada munculnya diskriminasi gender yang tampil dalam bentuk :

Pertama, stereotipi gender (*gender stereotye*) yaitu pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga menimbulkan masalah. Misalnya, perempuan selalu dinilai lemah, penakut, cerewet, emosional, kurang bisa bertanggung jawab, dan sebagainya, sementara laki-laki di pandang kuat, keras, kasar, rasional, egois, dan pencemburu. Pelabelan atau penandaan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin tertentu dapat menimbulkan kesan yang negatif dan merugikan keduanya;

Kedua, subordinasi, penempatan salah satu jenis kelamin lebih unggul dari jenis kelamin lainnya dari aspek status, peran dan relasi yang tidak setara. Pandangan subordinat ini didasarkan pada *stereotype* gender yang dapat menghambat akses partisipasi dan kontrol, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya;

Ketiga, marjinalisasi merupakan proses peminggiran secara sistemik, baik disengaja atau tidak, terhadap jenis kelamin tertentu dari mendapatkan akses dan manfaat dalam kehidupan akibat adanya stereotype dan subordinasi sehingga yang mengalami marjinalisasi ini biasanya tidak/kurang dapat menjadi penikmat hasil pembangunan kendatipun mereka telah banyak berkontribusi dalam pembangunan. Sebagai dampaknya, salah satu jenis kelamin tertinggal dari jenis kelamin lainnya;

Keempat, beban kerja berlipat dapat berupa pemaksaan dan atau pengabaian salah satu jenis kelamin untuk menanggung beban aktifitas berlebihan. Hal ini disebabkan pembakuan peran secara dikotomis produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan sehingga berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksibel. Pola kerja dikotomis dapat memicu ketidakadilan salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat;

Kelima, kekerasan (*violence*) berbasis gender yaitu kekerasan yang dilakukan oleh jenis kelamin berbeda yang disebabkan pandangan bias yang menempatkan salah satu jenis kelamin lebih superior dan yang lain dianggap inferior. Relasi gender yang timpang antara keduanya, menjadikan pihak yang merasa kuat berpotensi menindas pada yang lemah. Umumnya, kekerasan berbasis gender lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi dominan bahwa perempuan dicitrakan sebagai makhluk lemah yang dianggap wajar mendapatkan perlakuan demikian.

Diskriminasi gender tersebut secara umum terjadi di masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan juga tidak hanya terjadi pada kelas atau komunitas tertentu tetapi bias terjadi pada semua strata sosial dan pada berbagai sub kultur, di mana perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi gender dibanding dengan laki-laki. Diskriminasi gender dalam berbagai bentuknya secara umum terjadi pada perempuan yang disebabkan oleh;

1. Budaya patriarkhi, yakni suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah) di mana laki-laki berkuasa untuk menentukan, mengatur dan pengambil keputusan;
2. Teks agama yang diinterpretasikan bias gender, disebabkan oleh pemahaman parsial sehingga kurang mencerminkan pesan-pesan agama yang menghargai perempuan, atau metode penafsiran terhadap teks yang kurang tepat sehingga menghasilkan pandangan keagamaan yang diskriminatif;
3. Kebijakan pemerintah baik melalui undang-undang maupun manajemen pemerintahan yang kurang responsive gender (Mufidah, 2010: 8-11).

Kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kebutuhan mendasar agar praktik diskriminasi gender dalam berbagai bentuk manifestasinya dapat diminimalisir guna meraih kesejahteraan pembangunan secara merata dan adil gender. Kesetaraan gender (*gender equity*) adalah posisi yang sama antara

laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender (*gender equality*) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki. (Kepmendagri No. 132 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1).

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender, yaitu:

1. Seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran- peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam pembangunan.
2. Seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan lain sebagainya.

B. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Sejak bergesernya paradigma pembangunan Nasional dalam bidang pemberdayaan perempuan dari *Women in Development* dan *Women and Development* kepada paradigma *Gender and Development*, kesetaraan dan keadilan gender diintegrasikan ke dalam siklus pembangunan. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender tersebut diperlukan strategi yang disebut dengan *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender (PUG).

Pengertian pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Inpres No 9 th 2000, Kepmendagri no 132 th. 2003). Dengan demikian para pengambil kebijakan publik harus memiliki sensitifitas gender, sikap responsif terhadap kesetaraan dan keadilan gender dan mampu menciptakan budaya kerja yang ramah gender, agar tidak terjadi kebijakan bias gender yang bertentangan dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Konsep PUG pertama kali muncul dalam pembahasan materi pada Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995, yang melahirkan *Beijing Plat Form of Action* (BPFA) dengan mengangkat 12 area kritis pemberdayaan perempuan. Dua belas area kritis tentang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia mulai dipetakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

Upaya pemerintah mengadopsi PUG dalam pembangunan ini merupakan langkah politis dalam advokasi isu gender karena strategi ini bertumpu pada dua pendekatan. *Pertama*, meletakkan pemerintah sebagai agent of change bagi pembangunan yang adil gender. *Kedua*, melakukan intervensi terhadap semua tahap proses atau siklus pembangunan mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi (Hartian Silawati, 2006: 20).

Sejak diimplementasikannya PUG dalam pembangunan di Indonesia, terjadi perubahan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, misalnya beberapa produk hukum yang berkaitan dengan hal ini adalah:

1. Amandemen UUD 1945 khususnya pasal 28 yang mencantumkan "Hak Asasi Perempuan";
2. UU No. 12 Th. 2003 tentang keterwakilan perempuan 30% pada pemilu;

3. UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Th. 2006 tentang Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga;
5. UU No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganegaraan;
6. Keputusan Presiden No. 88 Th. 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7. Kepres RI No. 61 Th. 2003 tentang RAN Hak Asasi Manusia Indonesia yang mencantumkan hak-hak perempuan;
8. Pengesahan UU Perlindungan Saksi Tahun 2006; Pengesahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2007.

C. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Pengarusutamaan gender sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000, tidak hanya untuk pembangunan nasional saja, namun implementasinya ke tingkat daerah. Untuk itu diperlukan landasan yuridis yang mengatur secara khusus. Landasan yuridis dimaksud adalah dalam bentuk Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 yang disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2008. Tujuan diterbitkannya Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah adalah untuk:

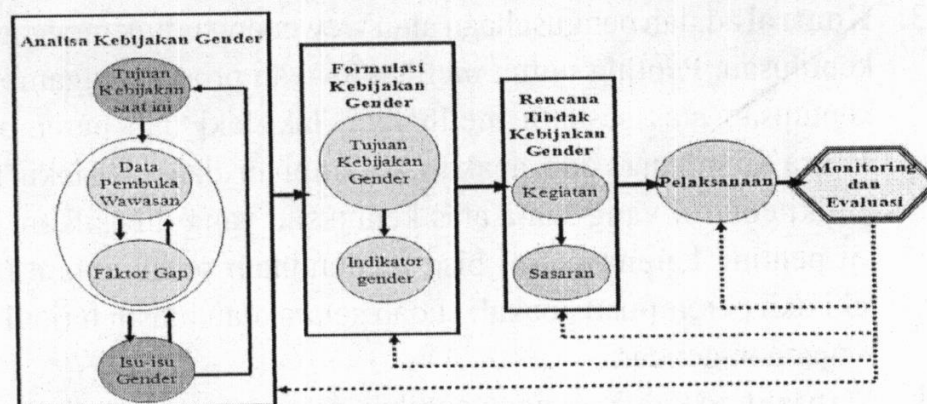
1. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah ;
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan ;
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan (Bab II, Pasal 3).

Dalam implementasinya, sebagaimana tertuang dalam Bab III, Pasal 4 bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana strategis SKPD, dan rencana kerja SKPD. Sedangkan Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Dalam peraturan ini tepatnya pada pasal 5 juga telah diatur bahwa Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan data pem-buka wawasan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin agar pem-bangunan yang dilaksanakan tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

Bagan 2.1 Alur Kerja GENDER ANALYSIS PATHWAY



Diadaptasi dari Pokja PUG Pendidikan Dinas Pendidikan Prop.Jatim, 2005

Data terpilah dimaksud ditindaklanjuti pula dengan kegiatan analisis gender, meliputi : *Pertama*, mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan; *Kedua*, mengidentifikasi dan memahami sebab sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya; *Ketiga*, menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; *Keempat*, menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

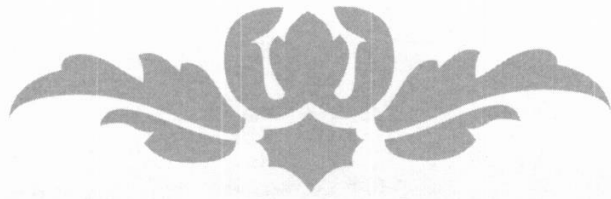
Dalam kegiatan analisis gender dilakukan identifikasi masalah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender dan kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan merupakan langkah penting dalam penyusunan kebijakan/program pembangunan yang sensitive gender. Identifikasi masalah gender bisa dilakukan dengan melihat aspek-aspek berikut:

1. **Akses** adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh sumber daya tertentu.
2. **Peran** adalah keikutsertaan atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu. Peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan hendaknya dilihat secara seksama apakah laki-laki dan perempuan telah melakukan peran yang setara atau justru ada ketimpangan.
3. **Kontrol** adalah pengusahaan atau wewenang untuk mengambil keputusan. Penting untuk melihat apakah proses pengambilan keputusan atas sesuatu melibatkan laki-laki dan perempuan secara seimbang, dan apakah perempuan dan laki-laki memiliki control yang sama atas keputusan yang dihasilkan. Hal ini penting karena kontrol bisa menunjukkan relasi antara laki-laki dan perempuan apakah sudah setara atau masih terjadi kesenjangan gender.
4. **Manfaat** adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal. Manfaat merupakan output yang tetap harus dikritisi. Selama ini sebagian program pembangunan lebih

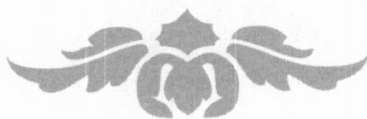
banyak memberikan manfaat kepada laki-laki daripada perempuan.

Masalah gender juga bisa ditinjau dari aspek sosial budaya, agama, ekonomi dan perundang-undangan. Aspek sosial akan menggambarkan sejauh mana suatu masyarakat melihat posisi laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari budaya dan peradaban. Aspek agama terkait erat dengan berbagai penafsiran agama yang terkadang merugikan perempuan. Sudut pandang ekonomi biasanya digunakan untuk mengukur apakah ada kesenjangan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan masalah perundang-undangan terkait dengan produk undang-undang yang diskriminatif. Perundang-undangan tidak hanya bersifat formal tetapi juga informal seperti aturan-aturan dalam masyarakat lokal yang diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan melihat aspek-aspek tersebut, memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan gender sekaligus mencari jalan keluarnya. Produk dari analisis gender ini sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif, pelaksanaan dan akuntabilitasnya dalam mendukung pembangunan.

Untuk mengetahui situasi Kabupaten Bojonegoro dalam membangun kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan, berikut ini akan dipaparkan data pilah menurut jenis kelamin dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan dan komunikasi, bidang politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan.



Diskripsi Umum Kab. Bojonegoro





Дворцовый комплекс в Кап. Божонгору

Bab III

Diskripsi Umum

Kabupaten Bojonegoro

A. Kondisi Fisik dan Karakteristik Wilayah

Kab. Bojonegoro memiliki luas wilayah 30.706 hektar, yang terletak pada posisi di antara 6°59' dan 7°37' Lintang Selatan serta diantara 11°25' dan 112°09' Bujur Timur. Secara topografis Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo merupakan Daerah dataran rendah, sedangkan di bagian Selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah.

Secara umum 81,29 % dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro tersebut berada pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut dan lebih, sedangkan yang lainnya sebanyak 18,71% berada pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut.

Dilihat dari sisi tata guna tanah, maka sekitar 40,15% dari luas wilayah adalah merupakan kawasan hutan Negara. Proporsi penggunaan lahan sawah 73.928 ha, tanah kering 49.115 ha, Hutan 88.371 Ha, Perkebunan 581 Ha dan lain-lain 9.490 ha. Perkembangan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa luas jenis lahan sawah turun rata-rata pertahun sebesar 0,5%, luas tanah kering turun rata-rata 0,7% dan luas hutan turun rata-rata 3,3 %.(RPJMD Kab. Bojonegoro 2008-2013)

B. Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro

Berlandaskan filosofi pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang digali dari filosofi luhur masyarakat Kabupaten Bojonegoro, yaitu: **“Jer Karta Raharja Mawa Karya”**, yang mengandung makna bahwa untuk mencapai kemakmuran, masyarakat Kabupaten Bojonegoro menempuhnya dengan cara bekerja keras. Berdasarkan landasan filosofi tersebut dirumuskan visi Kabupaten Bojonegoro 2009-2013 **“Kebangkitan Menuju Bojonegoro Yang Sejahtera, Madani dan Berdaya Saing”**.

Visi ini mengandung makna berikut:

1. Kabupaten Bojonegoro memiliki kemampuan untuk bangkit dan berdaya dalam memanfaatkan segenap potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki;
2. Kebangkitan tersebut semata-mata untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sejahtera lahir dan batin secara merata dan berkeadilan;
3. Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin akan menjadi modal utama untuk mewujudkan masyarakat madani, yakni masyarakat sipil yang berdaya dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya sehingga senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembangunan;
4. Dengan demikian maka Kabupaten Bojonegoro akan dapat bersaing secara sehat dengan daerah lain melalui keunggulan kompetitif yang dimiliki.

Adapun Misi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keshalehan sosial masyarakat yang didukung oleh pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara murni dan konsekuen;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai daya utama pembangunan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan;

4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan misi Kabupaten Bojonegoro tersebut dituangkan dalam strategi pembangunan daerah yang meliputi; *Pertama*, arah kebijakan pembangunan daerah; *Kedua*, program pembangunan daerah; *Ketiga*, agenda prioritas program pembangunan daerah. Dari strategi pembangunan daerah tersebut ditetapkan indikator kinerja daerah.

Adapun isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bojonegoro meliputi: Kemiskinan, pengangguran, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, infrastruktur, dan manajemen pemerintahan.

Berdasarkan isu-isu strategis di atas, dirumuskannya faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:

1. Memanfaatkan praktis otonomi daerah dan implementasi kebijakan reformasi administrasi publik untuk perbaikan manajemen pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Mantapkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat guna mengatasi pengaruh krisis ekonomi dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Daerah;
3. Kelola sumber daya alam lokal yang potensial dan prospektif untuk peningkatan kemakmuran daerah dengan dilandasi prinsip keberlanjutan pembangunan daerah dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
4. Dayagunakan potensi kearifan budaya lokal yang agamis untuk dasar penciptaan iklim yang kondusif bagi penangkalan ancaman kerawanan sosial dan terjadinya konflik sosial serta ancaman pengaruh globalisasi teknologi informasi dan dampak kemajuan iptek, demi peningkatan investasi pembangunan daerah;

5. Memanfaatkan terbukanya jejaring kerja dengan berbagai pihak eksternal guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
6. Tingkatkan nilai investasi pembangunan daerah dengan sasaran peningkatan produksi dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna membangun daya saing pembangunan daerah.

Dalam konteks implementasi kebijakan pembangunan responsif gender melalui pengarusutanaan gender di Kabupaten Bojonegoro, maka kesetaraan gender perlu diintegrasikan dalam pembangunan daerah sebagai daya dukung Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro berlandaskan prinsip-prinsip antara lain adalah partisipatif, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip dimaksud bersumber dari nilai-nilai yang dianut masyarakat Kabupaten Bojonegoro yaitu kebersamaan dalam keragaman, kesetaraan, kemandirian, disiplin, dan istiqomah. (RPJMD Kab. Bojonegoro 2008-2013).

C. Cakupan Wilayah, Rumah Tangga dan Keluarga

Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2011 Kabupaten Bojonegoro, berikut ini dipaparkan data tentang rumah tangga dan keluarga sebagai berikut:

Tabel 3.1

Cakupan Wilayah Kecamatan, Desa, Dusun/RW dan RT di Kabupaten Bojonegoro 2011

Kode Desa	Kecamatan	Desa	Dusun/ RW	Rukun Tetangga	Rumah Tangga
130501	Ngraho	16	58	332	12.532
130502	Tambakrejo	18	65	378	13.759
130503	Ngambon	5	16	59	3.524
130504	Ngasem	23	73	431	22.349
130505	Bubulan	5	17	86	4.286
130506	Dander	16	51	366	18.934
130507	Sugihwaras	17	55	300	12.462

130508	Kedungadem	23	101	594	21.678
130509	Kepohbaru	25	89	439	17.505
1305010	Baureno	25	89	469	19.789
1305011	Kanor	25	59	396	15.786
1305012	Sumberejo	26	98	418	18.386
1305013	Balen	23	73	434	17.267
1305014	Kapas	21	47	297	12.920
1305015	Bojonegoro	18	59	355	19.370
1305016	Kalitidu	24	68	394	16.339
1305017	Malo	20	51	231	8.253
1305018	Purwosari	12	32	198	7.329
1305019	Padangan	16	40	220	10.538
1305020	Kasiman	10	29	176	7.827
1305021	Temayang	12	37	157	9.786
1305022	Trucuk	12	31	181	9.676
1305023	Margomulyo	6	41	107	6.589
1305024	Sukosewu	14	45	300	11.696
1305025	Kedewan	5	12	69	3.153
1305026	Gondang	7	33	151	7.536
1305027	Sekar	6	35	154	8.428
Jumlah		430	1.404	7.692	337.697

Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro dari 27 Kecamatan, 430 Desa/Kelurahan, 1.404 Dusun/RW, 7.692 Rukun Tetangga, dan 337.697 Rumah Tangga. Kecamatan Sumberejo memiliki jumlah Desa tertinggi yaitu 26 Desa. Kecamatan Kedungadem meskipun jumlah Desa 23, tetapi memiliki 101 Dusun/RW, dan 594 RT dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 21.678. Kecamatan Ngasem tertinggi jumlah rumah tangganya yakni mencapai 22.349, rumah tangga tertinggi di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Kecamatan Ngambon, Kedewan dan Bubulan masing-masing hanya 5 Desa dengan rincian Kecamatan Ngambon memiliki 16 Dusun/RW, 59 RT, dan 3.524 jumlah rumah tangga, Kecamatan Kedewan 5 Desa, 12 Dusun/RW, 69 RT serta 3.153 jumlah rumah tangga, berarti terkecil jumlah rumah tangganya.

Tabel 3.2
Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Kecamatan dan Status Pekerjaan

No.	Kecamatan	Jumlah	Status Pekerjaan		Prosentase	
			Bekerja	Tidak Bekerja	Bekerja	Tidak Bekerja
1	Ngraho	13.336	12.372	964	9,27	7,23
2	Tambakrejo	15.468	14.407	1061	93,14	6,86
3	Ngambon	4.132	4.033	99	97,6	2,4
4	Ngasem	24.734	23.630	1104	95,54	4,46
5	Bubulan	4.543	4.442	101	97,77	2,23
6	Dander	20.841	19.546	1295	93,78	6,22
7	Sugihwaras	14.035	13.559	476	96,61	3,39
8	Kedungadem	25.417	24.486	931	96,34	3,66
9	Kepohbaru	19.218	17.729	1489	92,25	7,75
10	Baureno	22.592	20.816	1776	92,14	7,86
11	Kanor	17.814	16.809	1005	94,36	5,64
12	Sumberejo	21.470	20.396	1074	94,99	5,01
13	Balen	19.364	17.796	1568	91,9	8,1
14	Kapas	14.943	14.268	675	95,5	4,5
15	Bojonegoro	20.659	19.014	1645	92,04	7,96
16	Kalitidu	17.418	16.803	615	96,47	3,53
17	Malo	9.062	8.296	766	91,54	8,46
18	Purwosari	8.936	8.771	165	98,15	1,85
19	Padangan	11.385	10.140	1245	89,06	10,94
20	Kasiman	8.620	7.586	1034	88,01	11,99
21	Temayang	11.038	10.691	347	96,85	3,15
22	Trucuk	11.430	10.662	768	93,28	6,72
23	Margomulyo	7.382	6.393	989	86,6	13,4
24	Sukosewu	13.089	12.507	582	95,55	4,45
25	Kedewan	3.753	3.666	87	97,68	2,32
26	Gondang	7.995	7.627	368	95,4	4,6
27	Sekar	8.692	7.693	999	88,5	11,5
Jumlah		377.366	354.138	23.228	93,8	6,2

Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari seluruh jumlah kepala keluarga (KK) di Kabupaten Bojonegoro 377.366 KK, yang statusnya bekerja sebanyak 354.138 orang (94%), dan yang tidak bekerja 23.228 (6,2%). Kecamatan Kedungadem memiliki jumlah KK tertinggi yaitu 25.417 KK. Kecamatan Purwosari menempati urutan teratas jumlah KK yang bekerja (98,15%), sedangkan Kecamatan Kasiman terendah jumlah KK yang bekerja (88%) dan yang tidak bekerja sebanyak 12%.

Tabel 3.3

Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jumlah L-P	Jumlah		Prosentase	
			L	P	L	P
1	Ngraho	13.336	11.727	1.609	87,94	12,06
2	Tambakrejo	15.468	14.832	636	95,89	4,11
3	Ngambon	4.132	4.001	131	96,83	3,17
4	Ngasem	24.734	23.201	1.533	93,8	6,2
5	Bubulan	4.543	4.222	321	92,94	7,06
6	Dander	20.841	19.242	1.599	92,33	7,67
7	Sugihwaras	14.035	12.771	1.264	90,99	9,01
8	Kedungadem	25.417	23.144	2.273	91,06	8,94
9	Kepohbaru	19.218	17.744	1.474	92,33	7,67
10	Baureno	22.592	20.563	2.029	91,02	8,98
11	Kanor	17.814	15.800	2.014	88,69	11,31
12	Sumberejo	21.470	19.409	2.061	90,40	9,60
13	Balen	19.364	17.342	2.022	89,56	10,44
14	Kapas	14.943	13.506	1.437	90,38	9,62
15	Bojonegoro	20.659	17.619	3.040	85,29	14,71
16	Kalitidu	17.418	15.943	1.475	91,53	8,47
17	Malo	9.062	8.129	933	89,7	10,3
18	Purwosari	8.936	8.106	830	90,71	9,29
19	Padangan	11.385	9.916	1.469	87,1	12,9
20	Kasiman	8.620	7.630	990	88,52	11,48
21	Temayang	11.038	10.184	854	92,26	7,74
22	Trucuk	11.430	10.124	1.306	88,57	11,43
23	Margomulyo	7.382	6.694	688	90,68	9,32
24	Sukosewu	13.089	12.171	918	92,98	7,02

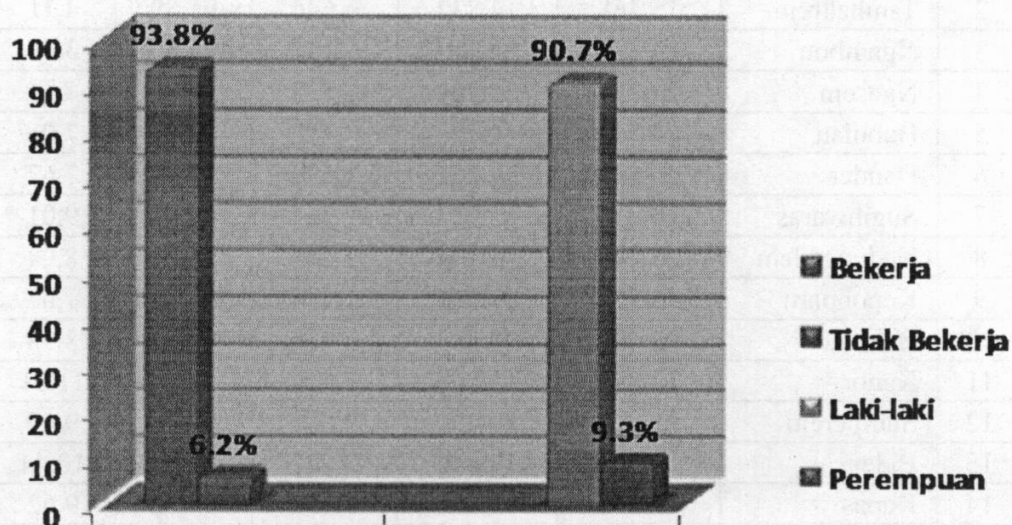
25	Kedewan	3.753	3.371	382	89,82	10,18
26	Gondang	7.995	7.181	814	89,82	10,18
27	Sekar	8.692	7.641	1.051	87,91	12,09
Jumlah		377.366	342.213	35.153	90,7	9,3

Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro 2011

Data di atas menunjukkan bahwa dari seluruh KK yang ada di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011 menurut jenis kelaminnya, laki-laki sebanyak 342.213 orang (90,7%), sedangkan perempuan sebagai kepala keluarga mencapai 35.153 orang (9,3%).

Diagram 3.1

**Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Kecamatan dan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin**



Tabel 3.4

**Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun
2011 Menurut Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Jumlah L-P	Jumlah		Prosentase	
			L	P	L	P
1	Ngraho	45.350	22.813	22.537	50,30	49,70
2	Tambakrejo	52.537	25.649	26.888	48,82	51,18
3	Ngambon	12.267	6.102	6.165	49,74	50,26
4	Ngasem	79.498	39.847	39.651	50,12	49,88
5	Bubulan	14.547	7.297	7.250	50,16	49,84
6	Dander	78.275	39.060	39.215	49,90	50,10
7	Sugihwaras	45.033	22.629	22.404	50,25	49,75
8	Kedungadem	81.682	40.732	40.950	49,87	50,13
9	Kepohbaru	65.776	33.041	32.735	50,23	49,77
10	Baureno	83.379	41.865	41.514	50,21	49,79
11	Kanor	55.917	27.991	27.926	50,06	49,94
12	Sumberejo	68.181	33.896	34.285	49,71	50,29
13	Balen	63.209	31.574	31.635	49,95	50,05
14	Kapas	49.261	24.822	24.439	50,39	49,61
15	Bojonegoro	79.466	38.741	40.725	48,75	51,25
16	Kalitidu	63.112	31.691	31.421	50,21	49,79
17	Malo	34.147	16.724	17.423	48,98	51,02
18	Purwosari	31.869	16.815	15.054	52,76	47,24
19	Padangan	39.611	19.865	19.746	50,15	49,85
20	Kasiman	30.146	15.135	15.011	50,20	49,80
21	Temayang	34.711	17.158	17.553	49,43	50,57
22	Trucuk	37.150	18.680	18.470	50,28	49,72
23	Margomulyo	23.783	11.604	12.179	48,79	51,21
24	Sukosewu	40.914	20.655	20.259	50,48	49,52
25	Kedewan	12.580	6.214	6.366	49,40	50,60
26	Gondang	28.622	14.031	14.591	49,02	50,98
27	Sekar	29.115	14.707	14.408	50,51	49,49
Jumlah		128.0138	639.338	640.800	49,94	50,06

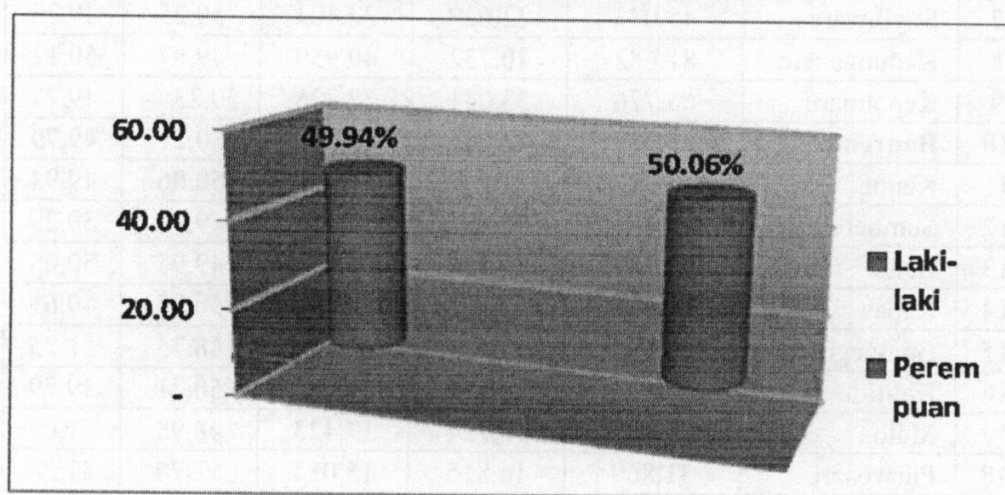
Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro 2011

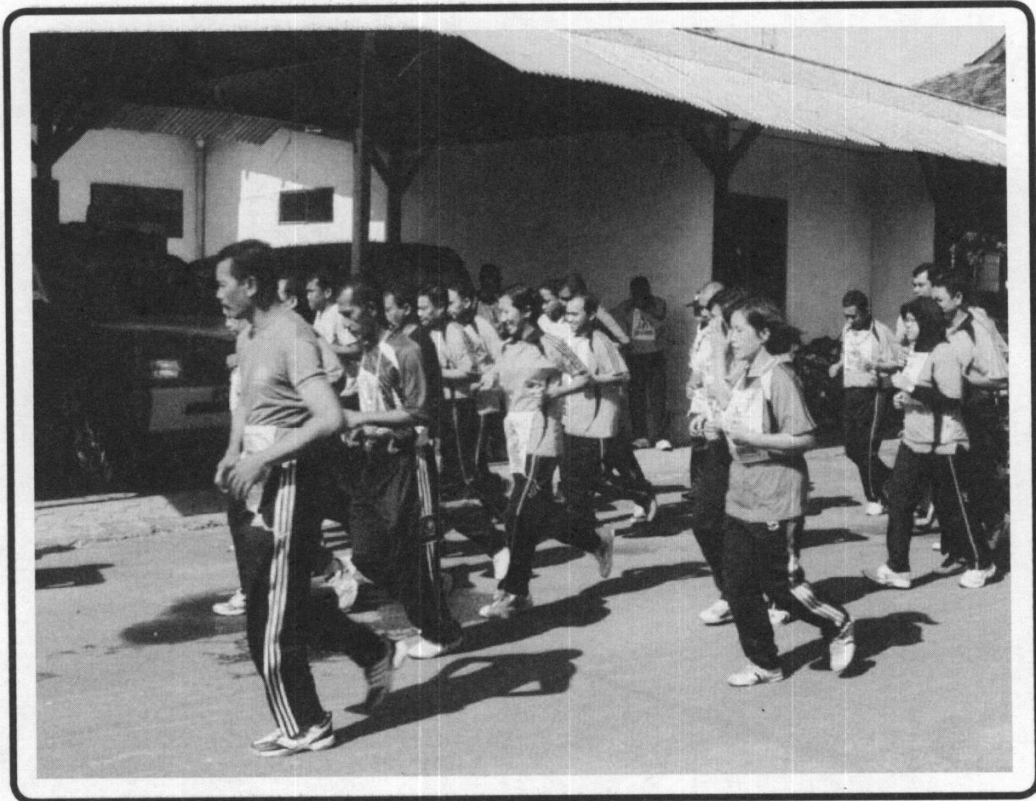
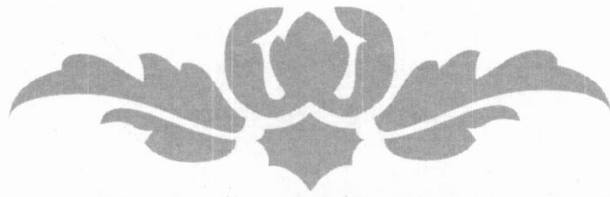
Berdasarkan Tabel di atas bahwa jumlah jiwa dalam keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 sebanyak 128.0138 jiwa dengan rincian laki-laki 639.338 jiwa (49,94%), perempuan 640.800 jiwa

(50,06%). Jika dilihat dari penyebarannya di tingkat Kecamatan, maka Kecamatan Baureno jumlah jiwa dalam keluarga tertinggi di Kabupaten Bojonegoro yaitu 83.379 jiwa, hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan yakni laki-laki 41.865 jiwa (50.21%) dan perempuan 41.865 jiwa (49,79%). Adapun Kecamatan dengan jumlah jiwa terendah adalah Kecamatan Ngambon 12.267 jiwa dengan rincian laki-laki 6.102 jiwa (49,74%), perempuan 6.165 jiwa (50,26%).

Diagram 3.2

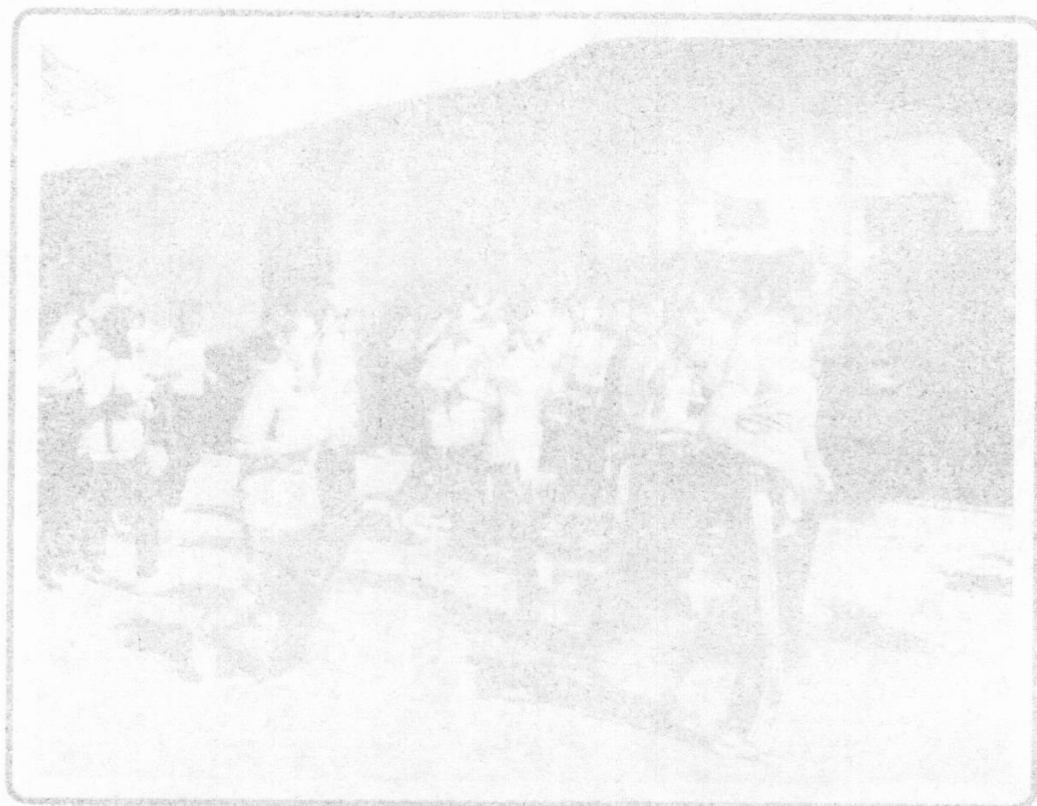
Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin





Bidang Kesehatan





Bidayat Keshkhatan

Bab IV

Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Isu-isu kesehatan yang bersinggungan dengan gender pada dasawarsa terakhir menjadi hangat dibicarakan dan menjadi isu strategis dalam ranah pembangunan. Angka kematian ibu dan anak baik karena faktor gizi maupun bencana yang tetap tinggi, menjadikan dunia kesehatan adalah pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera dicarikan solusi dan jalan keluar.

Dari beberapa data yang diperoleh, berikut adalah gambaran pembangunan bidang kesehatan di Bojonegoro.

A. Angka Harapan Hidup

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari salah satu indikatornya yaitu peningkatan angka usia harapan hidup. Dari tahun 2003 sampai tahun 2007 terus mengalami peningkatan; dari 66,5 menjadi 67.02.

B. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bojonegoro masih relatif tinggi yakni 19 orang di tahun 2010 dan mengalami penurunan menjadi 16 orang. Tabel berikut menjelaskan perbandingan

antara jumlah kematian ibu pada tahun 2010 dan tahun 2011 menurut masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 4.1

Jumlah Kematian Ibu Hamil Tahun 2010-2011 di Bojonegoro

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu	
		Tahun 2010	Tahun 2011
1.	Ngraho	2	-
3.	Ngambon	1	-
4.	Ngasem	3	2
6.	Dander	2	1
7.	Sugihwaras	1	1
8.	Kedungadem	2	1
9.	Kepohbaru	1	1
10.	Baureno	2	-
11.	Kanor	-	1
12.	Sumberejo	-	2
13.	Balen	1	3
14.	Kapas	1	1
15.	Bojonegoro	-	1
16.	Kalitidu	-	1
20.	Kasiman	1	-
24.	Sukosewu	1	1
25.	Kedewan	1	-
27.	Sekar	1	-
	Jumlah	19	16

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan Ngasem paling tinggi jumlah kematian ibu melahirkan (5 orang) selama 2 tahun terakhir, sedangkan sembilan kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dalam tahun 2010-2011 bebas dari kematian ibu melahirkan, yaitu Kecamatan Tambakrejo, Gondang, Malo, Purwosari, Padangan, Temayang, Trucuk, margomulyo, dan Kecamatan Bubulan

C. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Tabel berikut menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab utama kematian ibu hamil di Kabupaten Bojonegoro. Penyebab yang paling sering terjadi adalah eklamsia, kemudian perdarahan, infeksi, dan lain-lain. Melihat masih tingginya angka kematian ibu ini diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil agar kesehatan dan keselamatan ibu dalam masa kehamilan dan melahirkan bisa lebih terjamin.

Tabel 4.2

Penyebab Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas

No	Kecamatan	Penyebab Kematian Ibu Hamil, Melahirkan, dan nifas							
		Ekl	Inf	Abt	Macet	EO	KMP	Pdrh	lain
1	Ngasem							1	1
2	Dander	1							
3	Sugihwaras								1
4	Kedungadem	1							
5	Kepohbaru								1
6	Kanor							1	
7	Sumberejo		1						1
8	Balen	2	1						
9	Bojonegoro							1	1
10	Kalitidu	1							
11	Sukosewu		1						
Jumlah		5	3					3	5

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro 2011

Keterangan:

Ekl = Eklamsia

Inf = infeksi

Abt = Abortus

EO = Embolo Obstetri

KPM = Kompl.Mas Puerureum

Pdrh = pendarahan

Jumlah kematian ibu melahirkan 16 orang dengan sebarannya ke-11 Kecamatan, sedangkan 16 Kecamatan lainnya tidak terdapat

kematian ibu disebabkan melahirkan.

D. Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro menurut Kecamatan Tahun 2011

Persalinan merupakan peristiwa yang luar biasa bagi perempuan sebab jika tidak ditangani secara professional akan mengalami resiko hingga kematian ibu dan anak atau sekurang-kurangnya terjadi gangguan kesehatan bagi ibu dan cacat bagi bayinya. Tabel berikut menggambarkan akses masyarakat Kabupaten Bojonegoro tahun 2011 dalam menggunakan tenaga kesehatan ketika terjadi persalinan.

Tabel 4.3

Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro Menurut Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Prosentase	No	Kecamatan	Prosentase
1	Margomulyo	60,34	15	Balen	64,40
2	Ngraho	68,08	16	Sukosewu	59,21
3	Tambakrejo	57,71	17	Kapas	72,70
4	Ngambon	51,89	18	Bojonegoro	68,87
5	Sekar	63,35	19	Trucuk	59,82
6	Bubulan	63,84	20	Dander	63,38
7	Gondang	57,45	21	Ngasem	59,60
8	Temayang	56,59	22	Kalitidu	70,56
9	Sugihwaras	63,70	23	Malo	63,80
10	Kedungadem	61,13	24	Purwosari	68,85
11	Kepohbaru	67,55	25	Padangan	66,26
12	Baureno	73,99	26	Kasiman	76,47
13	Kanor	69,39	27	Kedewan	70,88
14	Sumberejo	57,86	Jumlah rata-rata		64,78

Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro 2011

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 Kabupaten Bojonegoro, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan rata-rata 64,78%. Kasiman merupakan kecamatan tertinggi yang mengakses persalinan dengan tenaga kesehatan yaitu mencapai 76,47, sedangkan jumlah terendah adalah Kecamatan Ngambon hanya 51,89% saja.

E. Imunisasi Tetanus Taxoid (TT) Pada Ibu Hamil di Kab. Bojonegoro Tahun 2011

Tabel 4.4

Jumlah Imunisasi TT Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah	No	Kecamatan	Jumlah
1	Margomulyo	348	15	Balen	879
2	Ngraho	610	16	Sukosewu	486
3	Tambakrejo	856	17	Kapas	671
4	Ngambon	140	18	Bojonegoro	1.082
5	Sekar	320	19	Trucuk	516
6	Bubulan	198	20	Dander	1.037
7	Gondang	364	21	Ngasem	1.049
8	Temayang	493	22	Kalitidu	867
9	Sugihwaras	726	23	Malo	455
10	Kedungadem	1.221	24	Purwosari	394
11	Kepohbaru	966	25	Padangan	699
12	Baureno	1.262	26	Kasiman	433
13	Kanor	818	27	Kedewan	175
14	Sumberejo	970	Total		18.035

Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro 2011

F. Kunjungan Ibu Hamil (K1,K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2011

Tabel 4.5

Jumlah Kunjungan Ibu Hamil Ke Pelayanan Kesehatan

No	Kecamatan	Jml Kunjungan		No	Kecamatan	Jml Kunjungan	
		K 1	K 4			K 1	K 4
1	Margomulyo	297	215	15	Balen	752	656
2	Ngraho	485	445	16	Sukosewu	399	344
3	Tambakrejo	522	486	17	Kapas	526	501
4	Ngambon	138	122	18	Bojonegoro	1004	943
5	Sekar	309	284	19	Trucuk	404	396
6	Bubulan	151	141	20	Dander	799	710

7	Gondang	260	220	21	Ngasem	840	695
8	Temayang	370	299	22	Kalitidu	742	565
9	Sugihwaras	519	451	23	Malo	341	323
10	Kedungadem	823	688	24	Purwosari	330	288
11	Kepohbaru	731	678	25	Padangan	493	434
12	Baureno	937	856	26	Kasiman	339	301
13	Kanor	723	620	27	Kedewan	1128	129
14	Sumberejo	753	611	Total		14.155	12.401

Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro 2011

G. Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan usaha guna mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.

Tujuan utama pelaksanaan keluarga berencana adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan keluarga berencana diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih meningkat.

Untuk mengetahui situasi pentingnya keluarga berencana terutama akseptor KB di Kabupaten Bojonegoro, perlu dipaparkan terlebih dahulu jumlah pasangan usia subur (PUS) yang masih produktif sehingga upaya mengatur kelahiran dan jumlah anak serta kelahiran diperlukan sesuai dengan jumlah PUS ini.

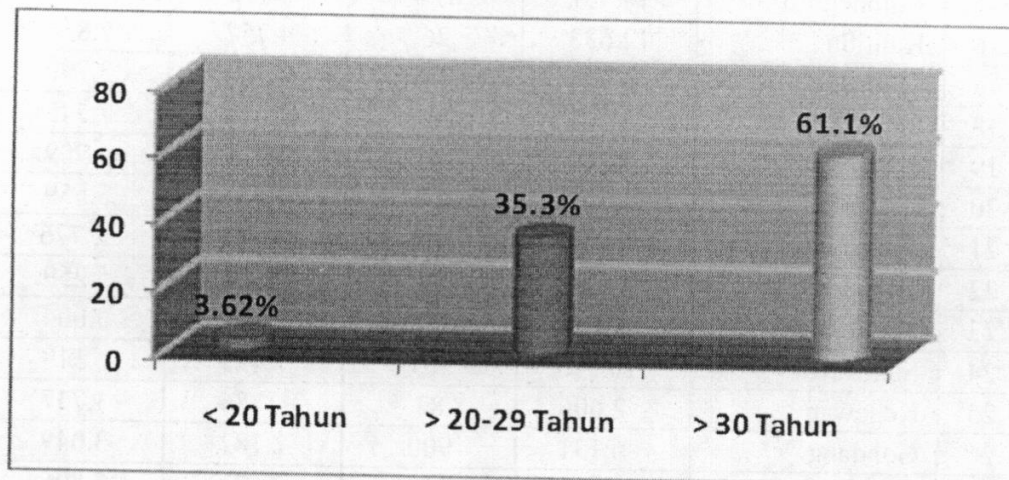
Tabel 4.6
Jumlah PUS di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Umur

No	Kecamatan	Jml PUS	Jml PUS Menurut Umur		
			< 20 Th	>20-29 Th	>30 Th
1	Ngraho	10.042	449	2.715	6.878
2	Tambakrejo	13.984	832	7.998	5.154
3	Ngambon	3.989	266	1.428	2.295
4	Ngasem	19.503	732	7.916	10.855
5	Bubulan	3.426	86	1.270	2.070
6	Dander	14.499	939	5.364	8.196
7	Sugihwaras	10.344	351	3.261	6.732
8	Kedungadem	18.130	783	5.154	12.193
9	Kepohbaru	15.734	690	5.550	9.494
10	Baureno	16.909	401	6.240	10.268
11	Kanor	12.650	296	3.500	8.854
12	Sumberejo	15.991	360	3.892	11.739
13	Balen	14.302	493	4.469	9.340
14	Kapas	10.855	143	3.168	7.544
15	Bojonegoro	14.437	128	3.792	10.517
16	Kalitidu	12.633	26	4.757	7.850
17	Malo	6.748	376	2.582	3.790
18	Purwosari	5.361	200	2.616	2.545
19	Padangan	7.200	116	2.175	4.909
20	Kasiman	6.139	14	2.566	3.559
21	Temayang	8.052	564	4.712	2.776
22	Trucuk	7.524	99	2.166	5.259
23	Margomulyo	5.455	100	2.351	3.004
24	Sukosewu	10.373	361	3.493	6.519
25	Kedewan	2.606	83	786	1.737
26	Gondang	6.131	900	2.182	3.049
27	Sekar	6.825	347	2.672	3.806
	Jumlah	279.842	10.135	98.775	170.932
	Prosentase	100%	3,62%	35,3%	61,1%

Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro 2011

Pemilihan alat kontrasepsi pada umumnya merupakan satu keputusan yang dilandaskan berbagai pertimbangan dari akseptor serta berkaitan dengan pilihan pribadi. Banyak perempuan maupun laki-laki harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit. Tidak hanya karena terbatasnya jumlah metode yang tersedia, tetapi juga karena metode-metode tersebut mungkin tidak sesuai dengan kesehatan individual, dan seksualitas perempuan atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi. Pemilihan suatu metode KB pada perempuan maupun laki-laki harus menimbang berbagai faktor, termasuk status kesehatan, efek samping potensial suatu metode, konsekuensi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, besarnya keluarga yang diinginkan, kerjasama pasangan, dan norma budaya mengenai kemampuan mempunyai anak. Data yang diperoleh dari dinas Kesehatan Bojonegoro pada tahun 2011, akseptor KB baik laki-laki maupun perempuan adalah sebagai berikut:

Diagram 4.1
Jumlah PUS di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Umur



Tabel 4.7

Jumlah Akseptor KB Bagi Perempuan Di Kab. Bojonegoro

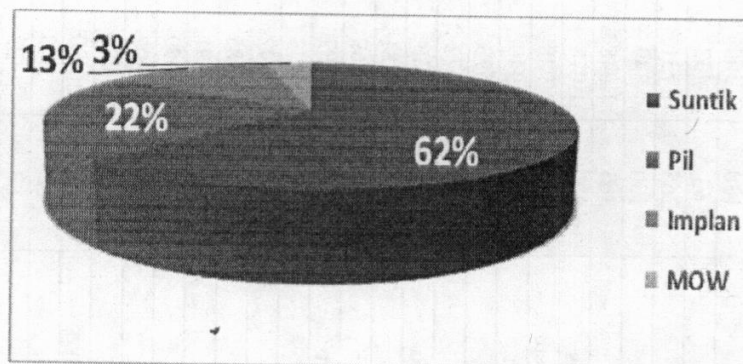
No.	Kecamatan	MOW	Implant	Suntik	Pil	Jml	Presentase			
							MOW	Implant	Suntik	Pil
1.	Ngraho	164	798	2.917	617	4.496	3,6	17,7	64,9	13,7
2.	Tambakrejo	130	1.500	3.924	2.321	7.875	1,7	19,0	49,8	29,5
3.	Ngambon	63	432	1.147	949	2.591	2,4	16,7	44,3	36,6
4.	Ngasem	265	1.731	7.366	2.813	12.175	2,2	14,2	60,5	23,1
5.	Bubulan	130	349	1.158	565	2.202	5,9	15,8	52,6	25,7
6.	Dander	363	1.048	4.732	2.377	8.520	4,3	12,3	55,5	27,9
7.	Sugihwaras	250	1.078	4.896	587	6.811	3,7	15,8	71,9	8,6
8.	Kedungadem	617	1.928	7.920	2.426	12.891	4,8	15,0	61,4	18,8
9.	Kepohbaru	298	1.940	3.643	2.657	8.538	3,5	22,7	42,7	31,1
10.	Baureno	327	573	9.237	2.027	12.164	2,7	4,7	75,9	16,7
11.	Kanor	242	677	5.850	1.100	7.869	3,1	8,6	74,3	14,0
12.	Sumberrejo	481	1.026	6.145	2.740	10.392	4,6	9,9	59,1	26,4
13.	Balen	210	881	6.218	2.155	9.464	2,2	9,3	65,7	22,8
14.	Kapas	253	669	4.835	1.481	7.238	3,5	9,2	66,8	20,5
15.	Bojonegoro	819	792	5.259	2.731	9.601	8,5	8,2	54,8	28,4
16.	Kalitidu	242	439	7.183	982	8.846	2,7	5,0	81,2	11,1
17.	Malo	171	942	2.150	671	3.934	4,3	23,9	54,7	17,1
18.	Purwosari	83	485	2.403	481	3.452	2,4	27,3	69,6	13,9
19.	Padangan	193	491	3.284	672	4.640	4,2	10,5	70,8	14,5
20.	Kasiman	182	359	1.858	856	3.255	5,6	15,1	57,1	26,3
21.	Temayang	127	892	2.053	1.322	4.394	2,9	8,2	46,7	30,1
22.	Trucuk	108	426	3.447	844	4.825	2,2	18,5	71,4	17,5
23.	Margomulyo	107	490	2.284	367	3.248	3,3	13,1	70,3	11,3
24.	Sukosewu	120	603	5.194	1.225	7.142	1,7	6,9	72,7	17,2
25.	Kedewan	64	422	762	320	1.568	4,1	38,5	48,6	20,4
26.	Gondang	115	981	1.899	956	3.951	2,9	10,7	48,1	24,2
27.	Sekar	48	566	2.064	1.891	4.569	1,1	21,5	45,2	41,4
Jumlah		6.172	22.518	109.828	38.133	176.651	3,5	12,7	62,2	21,6

Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro 2011

Akseptor KB bagi perempuan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 176.651 orang. 62,2% menggunakan alat kontrasepsi suntik. Kecamatan Kalitidu pengguna alat kontrasepsi suntik tertinggi (81,2%), menyusul Kecamatan Baureno 75,9%, Kecamatan Kanor 74,3%, Kecamatan Sukosewu 72,7%, Kecamatan Sugihwaras 71,9%, dan kecamatan Trucuk 71,4%. Kecamatan terendah pengguna alat kontrasepsi suntik 42,7% disusul Kecamatan Ngambon 44, 3%.

Penggunaan kontrasepsi MOW secara keseluruhan hanya 3,5% yakni tertinggi Kecamatan Baureno (8,5%) dan terendah 1,1% Kecamatan Sekar, disusul Kecamatan Tambakrejo dan Kecamatan Sukosewu masing-masing 1,7% . Pengguna alat kontrasepsi KB jenis pil secara keseluruhan 21,6%. Kecamatan Sugihwaras merupakan Kecamatan terendah (8,6%), Kecamatan Sekar tertinggi (41,4%). Adapun pengguna alat kontrasepsi implan secara keseluruhan 22.518 (12,7%), Kecamatan Kedewan mencapai 38,5% merupakan Kecamatan pengguna implan tertinggi, sedangkan terendah adalah Kecamatan Baurena (4,7%).

Diagram 4.2
Data Akseptor KB Bagi Perempuan Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2011



Tabel 4.8

Jumlah Akseptor KB Bagi Pria Kab.Bojonegoro Tahun 2011

No.	Kecamatan	MOP	Kondom	Jumlah	Presentase	
					MOP	Kondom
1.	Ngraho	8	39	47	17,0	83,0
2.	Tambakrejo	86	229	315	27,3	72,7
3.	Ngambon	4	29	83	4,8	95,2
4.	Ngasem	47	172	219	21,5	78,5
5.	Bubulan	1	51	52	1,9	98,1
6.	Dander	299	78	377	79,3	20,7
7.	Sugihwaras	31	52	83	37,3	62,7
8.	Kedungadem	99	161	260	38,1	61,9
9.	Kepohbaru	54	23	77	70,1	29,9
10.	Baureno	23	61	84	27,4	72,6
11.	Kanor	14	56	70	20,0	80,0
12.	Sumberrejo	15	62	77	19,5	80,5
13.	Balen	16	73	89	18,0	82,0
14.	Kapas	52	102	154	33,8	66,2
15.	Bojonegoro	61	39	100	61,0	39,0
16.	Kalitidu	21	35	56	37,5	62,5
17.	Malo	25	21	46	54,3	45,7
18.	Purwosari	33	59	92	35,9	64,1
19.	Padangan	12	69	81	14,8	85,2
20.	Kasiman	51	35	86	59,3	40,7
21.	Temayang	65	144	209	31,1	68,9
22.	Trucuk	12	56	68	17,6	82,4
23.	Margomulyo	5	27	32	15,6	84,4
24.	Sukosewu	8	94	102	7,8	92,2
25.	Kedewan	16	0	16	100,0	0,0
26.	Gondang	21	20	41	51,2	48,8
27.	Sekar	21	109	130	16,2	83,8
Jumlah		1.100	1.946	3.046	36,1	63,9

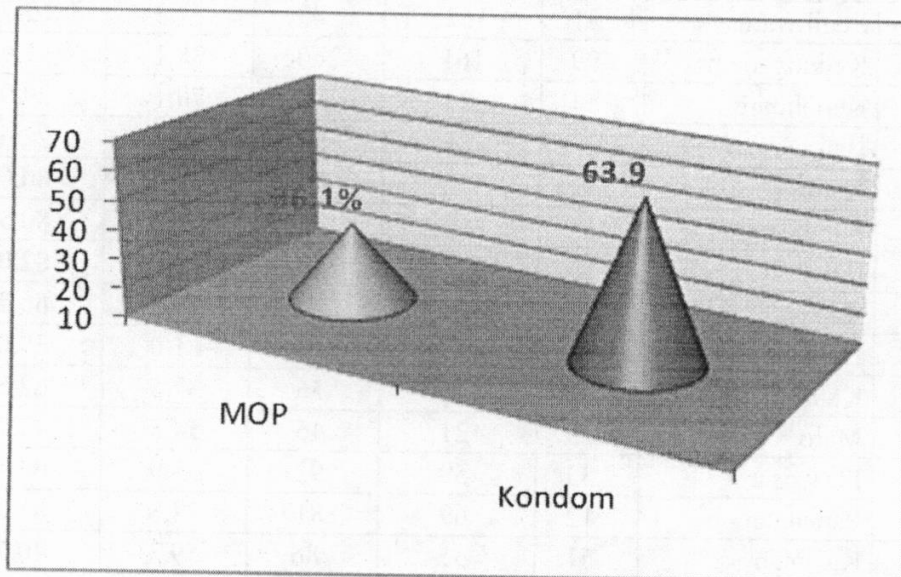
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, 2011

Berdasarkan table di atas bahwa dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro mayoritas akseptor KB pria mayoritas memilih alat kontrasepsi kondom yakni 1.946 orang (63,9%), sedangkan pengguna MOP sebanyak 1100 orang (36,1%). Dilihat dari masing-

masing Kecamatan, Dander merupakan Kecamatan terbanyak laki-laki sebagai akseptor KB (377 orang) dengan rincian pengguna MOP 299 orang (79,3%) dan pengguna kondom 78 orang (20,7%). Adapun Kecamatan Kedewan terendah yakni hanya 16 orang. Jenis alat kontrasepsi yang digunakan, MOP tertinggi dari jumlah akseptor laki-laki adalah Kecamatan Kedewan (100%), sedangkan Kecamatan Bubulan pengguna kondom mencapai 98,1%.

Diagram 4.3

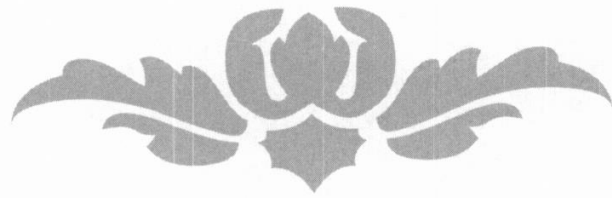
Jumlah Akseptor KB Bagi Pria Kab.Bojonegoro Tahun 2011



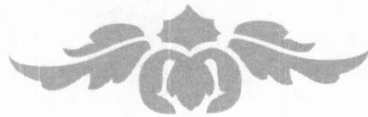
Dari tabel dan diagram yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas akseptor KB perempuan menggunakan media suntik, sedangkan mayoritas pengguna akseptor KB laki-laki menggunakan kondom. Suntik lebih disukai karena tidak harus dilakukan setiap hari sebagaimana penggunaan pil, sedangkan laki-laki banyak menggunakan alat kontrasepsi kondom karena dianggap lebih praktis, murah dan tanpa resiko.

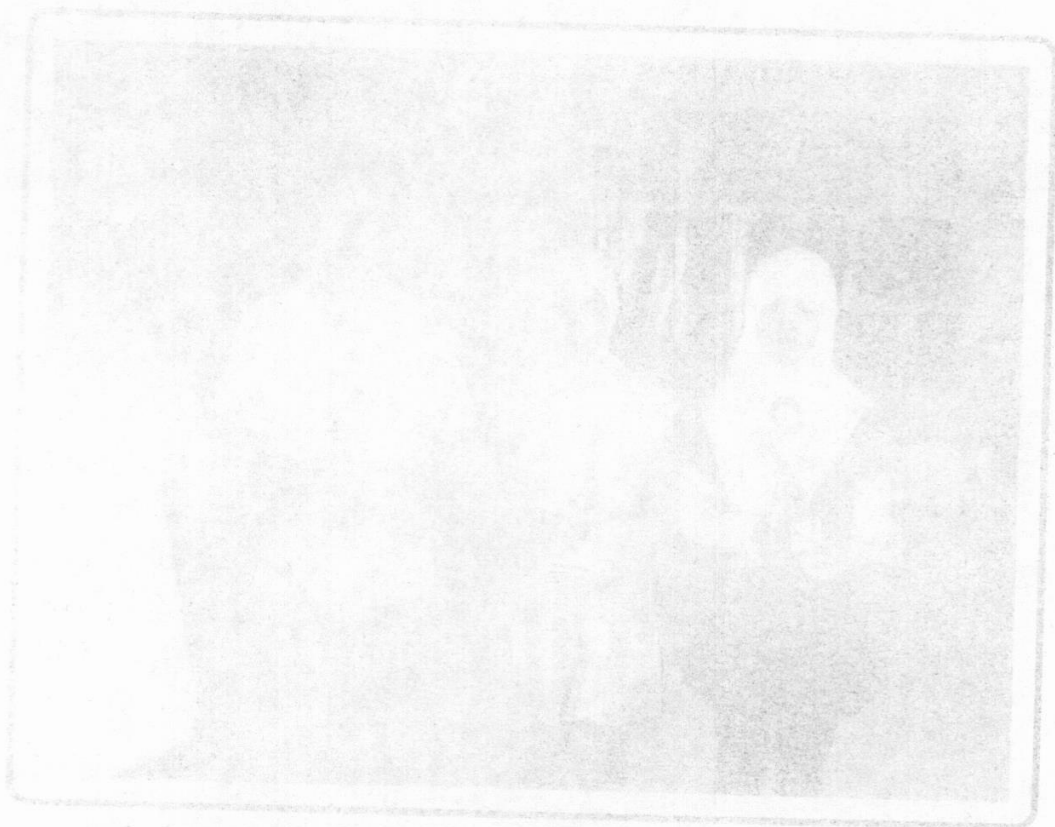
Data tersebut menunjukkan jika perempuan dengan varians pilihan KB masih menghadapi berbagai resiko baik fisik dan psikologis, sementara itu penggunaan akseptor KB bagi laki-laki cenderung tanpa resiko dan lebih praktis. Menurut analisis kesetaraan

gender, menunjukkan adanya beban dan resiko ketidaknyamanan terhadap perempuan masih tinggi. Artinya meskipun perempuan lebih tinggi hal ini dimaknai bahwa partisipasi laki-laki dalam penggunaan akseptor KB masih rendah. Artinya kerentanan dalam bentuk ketidaknyamanan fisik dan psikologis masih tertumpu pada perempuan dari pada laki-laki yang berarti penyiksaan terhadap tubuh perempuan masih dominan.



Bidang Pendidikan





Bildung und Erziehung

Bab V

Bidang Pendidikan

Kondisi kesenjangan gender (*gender gap*) di bidang pendidikan khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator makro kesetaraan dan keadilan gender yaitu *Gender Development Index* (GDI). Pada tahun 1998, GDI Indonesia berada pada posisi ke 90 dari 174 negara, tahun 2001 berada pada urutan ke 92 dari 146 negara. Tahun 2002 dan 2003 Indonesia berada pada ranking 91 dari 146 negara yaitu posisi paling rendah diantara negara-negara Asean, Singapura pada ranking 28, Malaysia 53, Thailand 61, Philipina 66 dan Vietnam 89.

Pada tahun 2007, ada sedikit kemajuan yaitu berada di posisi 80. Namun pada tahun 2009, angka ini merosot lagi di urutan 90. Melihat posisi Indonesia yang demikian, ini berarti keberadaan perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan para laki-laki. GDI digunakan untuk mengukur perkembangan manusia, namun mempertimbangkan perbedaan gender. Komponen-komponen GDI sama dengan yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI), namun disesuaikan untuk melihat perbedaan dalam hal pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki (dikti.co.id).

Perkembangan terakhir berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) *Human Development Index* (HDI) Indonesia meningkat dari 0,613 pada tahun 2010 menjadi 0,617 pada tahun ini. Peningkatan IPM dipengaruhi tiga faktor, yaitu harapan hidup dan kesehatan, pengetahuan serta standar

hidup atau pendapatan perkapita. Namun demikian peningkatan itu masih tertinggal dari negara-negara ASEAN. Pada tahun 2011 *Human Development Index*, Indonesia berada pada urutan ke 123 dari 187 negara. Hal ini jauh tertinggal dengan dari urutan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (26), Brunei Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand (103) dan Philipina (112). Sementara perkembangan *Gender Development Goals* (Indeks Pembangunan Gender), Indonesia juga sangat tertinggal jauh dengan negara-negara di ASEAN lainnya dari 134 negara di dunia. Urutan tersebut sebagai berikut yakni Philipina (9), Vietnam (71), Singapura (85), Indonesia (93), Malaysia (101), dan Kamboja (104).

Untuk terus memacu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang berwawasan gender, pembangunan pendidikan di Indonesia minimal harus mengacu pada tiga sasaran utama yang diamanatkan Konvensi Deklarasi yakni *Education For All* (EFA) tentang Pendidikan Berkeadilan Gender, yaitu:

1. Menjelang 2015 semua anak khususnya anak perempuan mempunyai akses pada pendidikan dan menyelesaikan pendidikan dasar.
2. Menjelang 2015 mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa, terutama kaum perempuan.
3. Penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah tahun 2015 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan tahun 2015 dengan fokus bahwa anak perempuan memperoleh pendidikan dasar yang bermutu (UNDP Indonesia, 2010)

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan yang telah ada di tingkat provinsi/kabupaten/kota sekaligus seberapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya pada usia sekolah dan di setiap jenjang pendidikan, diperlukan pendataan berdasarkan jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Kemudian untuk mengetahui pelayanan pen-

didikan di setiap jenjang pendidikan digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Akan tetapi, penjelasan berikut akan menekankan pada cakupan pelayanan pendidikan berdasarkan jenis kelamin usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SLTP, dan SLTA. Sehingga akan diketahui berapa prosentase usia sekolah antara laki-laki dan perempuan serta apakah ada kesenjangan (gap) antara laki-laki dan perempuan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bojonegoro mulai dari tingkat SD, SLTP, dan SLTA bisa digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bojonegoro 2011
Menurut Jenis Kelamin

TINGKAT	JUMLAH		JUMLAH L+P	Prosentase		Dis paritas	Indek Paritas
	L	P		L	P		
SD	10,040	10,100	20,140	49.9%	50.1%	0.2	1.0
SMP	10,004	9,990	19,994	50.0%	50.0%	0.0	1.0
SMA	6,702	7,171	13,873	48.3%	51.7%	3.4	1.07
JUMLAH			54,007				

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah usia sekolah di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah 54.007 jiwa, dengan rincian 20.140 adalah usia SD, 19.994 usia SMP, dan 13.873 usia SMA. Di tingkat SD, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuannya cukup berimbang tapi lebih banyak jumlah perempuannya yaitu 10.040 laki-laki (49,9 %) dan 10.100 perempuan (50,1 %). Di tingkat SMP, perbandingan antara laki-laki dan perempuannya lebih banyak jumlah laki-lakinya, yaitu 10.004 laki-laki (50%) dan 9.990 perempuan (50 %). Kemudian di tingkat SMA, perbandingan laki-laki dan perempuannya lebih banyak perem-

puan, yaitu 6.702 laki-laki (48,3 %) dan 7.171 perempuan (51,7 %). Prosentase perbandingan ini bisa dijelaskan dalam grafik berikut.

Diagram 5.1
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bojonegoro 2011
Menurut Jenis Kelamin

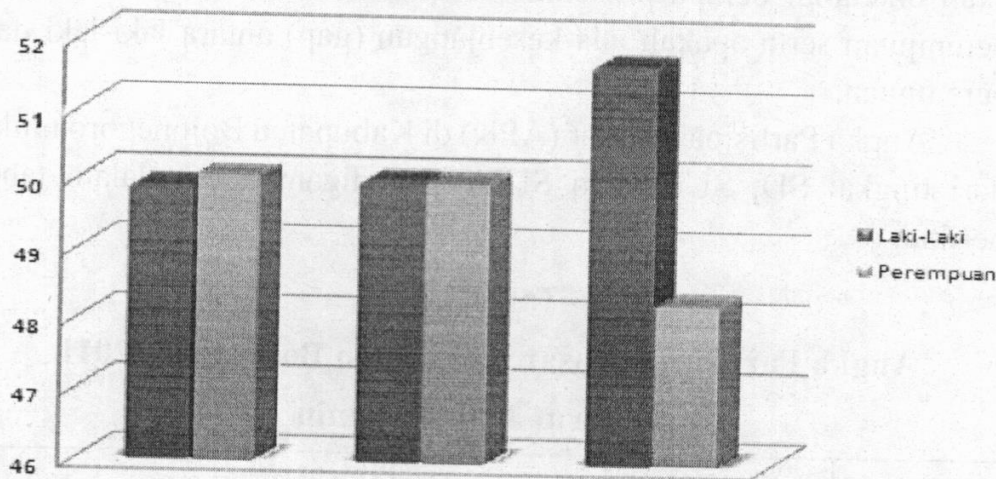


Diagram 3.1 di atas menggambarkan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bojonegoro. Namun, apakah ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan dasar di Kabupaten Bojonegoro? Perbandingan prosentase di atas menunjukkan bahwa di tingkat SD antar laki-laki dan perempuan cukup berimbang yakni 49.9% laki-laki dan 50.1% adalah perempuan.

Dengan demikian, di tingkat SD tidak ada kesenjangan, hal ini bisa dilihat dari angka indekparitas (1.0) dan disparitasnya (0.2). Di tingkat SMP, tingkat partisipasi kasarnya tidak ada kesenjangan, sedangkan di tingkat SMA ada sedikit kesenjangan dengan kinerja perempuan lebih tinggi, yakni berdasarkan analisa angka disparitas (3.4) dan angka indek paritas di tingkat SMA (1.07).

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Untuk mengetahui Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Bojonegoro, berikut ini adalah tabel jumlah usia sekolah yang terserap dalam tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA.

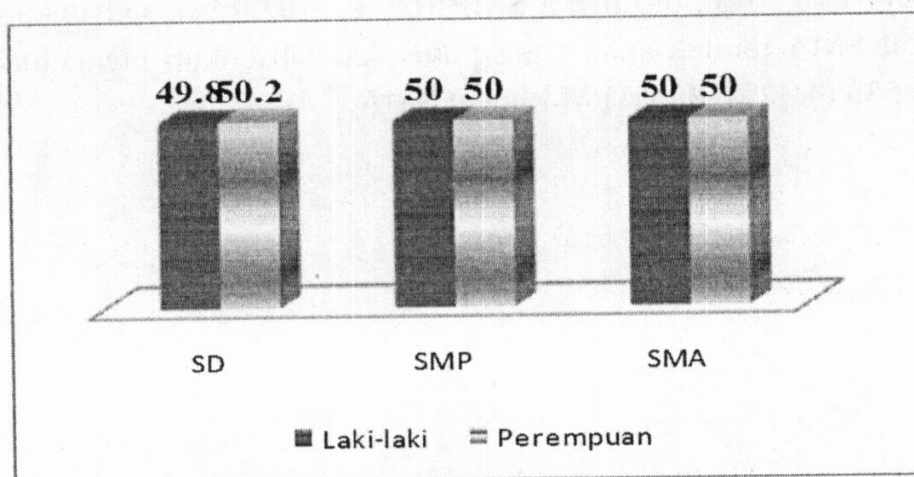
Tabel 5.2
APM di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat	Jumlah		Total	Prosentase (%)		Dis paritas	Indek paritas
	L	P		L	P		
SD	9.845	9.931	19.776	49,8	50,2	0,4	1.0
SMP	9.125	9.116	18.241	50,0	50,0	0.0	1.0
SMA	6.186	6.194	12.380	50.0	50.0	0.0	1.0

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di masing-masing tingkat pendidikan adalah berjumlah 50.397 siswa. Di tingkat SD jumlahnya 19.776 dengan perbandingan 9.845 adalah laki-laki (49,8%) dan 9.931 adalah perempuan (50,2%). Di tingkat SMP berjumlah 18.241 dengan perbandingan 9.125 adalah laki-laki (50%) dan 9.116 adalah perempuan (50%). Kemudian di tingkat SMA berjumlah 12,380 dengan perbandingan 6.186 adalah laki-laki (50%) dan 6.194 adalah perempuan (50%). Untuk membandingkan jumlah prosentase antara laki-laki dan perempuan di masing-masing tingkat bisa digambarkan dalam gdiagram berikut.

Diagram 5.2
APM sesuai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin



Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa prosentase antara laki-laki dan perempuan di masing-masing tingkat sudah ada keseimbangan. Misalnya, di tingkat SMP dan SMA perbandingan antar laki-laki dan perempuannya sama yaitu 50%, sedangkan di tingkat SD laki-lakinya 49.8% dan perempuannya 50.2%. Dari perbandingan prosentase ini, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bojonegoro antara laki-laki dan perempuan telah setara.

Jika kita lihat disparitas dan indeks paritas di masing-masing tingkat, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bojonegoro relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, artinya keterserapan usia sekolah di lembaga pendidikan tidak ada kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa dilihat angka disparitas dan indekparitas di masing-masing tingkat tidak menunjukkan kesenjangan (*gap*) yang berarti.

C. Jumlah Anak Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA

Dari total Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA (sebanyak 50.397 anak), jumlah Anak Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi yakni sebesar 602 (1,19 %). Kemudian jika ditinjau dari masing-masing jumlah Angka Partisipasi Murni di masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA maka di tingkat SD, jumlah anak yang putus sekolah adalah 51 (0,26%), di tingkat SMP 16 anak (0,09 %), sedangkan di tingkat SMA jumlah anak yang putus sekolah cukup mengejutkan yaitu 535 (4,32%) dari APM tingkat SMA.

Tabel 5.3
Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

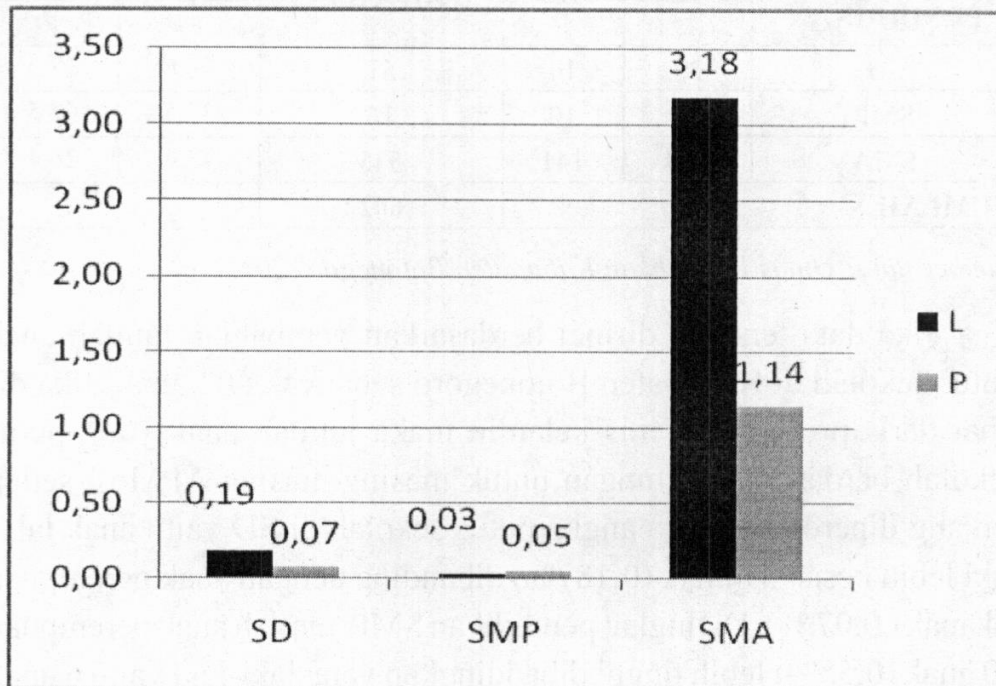
TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH L+P	PROSENTASE	
	L	P		L	P
SD	37	14	51	63,6	27,4
SMP	6	10	16	37,5	62,5
SMA	394	141	535	73,6	26,4
JUMLAH			602		

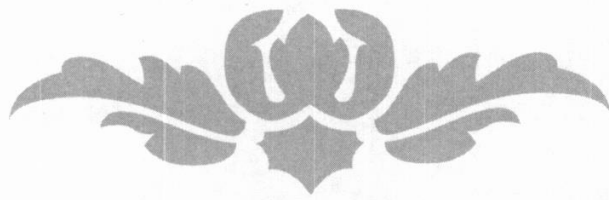
Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro 2011

Jika data tersebut dirinci berdasarkan pembagian jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 602 anak. Jika dilihat dari prosentase jenis kelamin maka jumlah anak yang putus sekolah berdasarkan hitungan untuk masing-masing APM di setiap jenjang diperoleh bahwa angka putus sekolah di SD yaitu anak laki-laki lebih besar 37 anak (0,187%) dibanding dengan anak perempuan 14 anak (0,07 %). Di tingkat pendidikan SMP, jumlah anak perempuan 10 anak (0,55%) lebih tinggi dibandingkan yang laki-laki yaitu 6 anak (0,033%). Kemudian di tingkat SMA, jumlah anak laki-laki putus sekolah lebih tinggi daripada anak perempuan, yakni 394 laki-laki (3,18%) berbanding 141 perempuan (1,14 %).

Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan putus sekolah akan selalu terjadi pada laki-laki daripada perempuan.

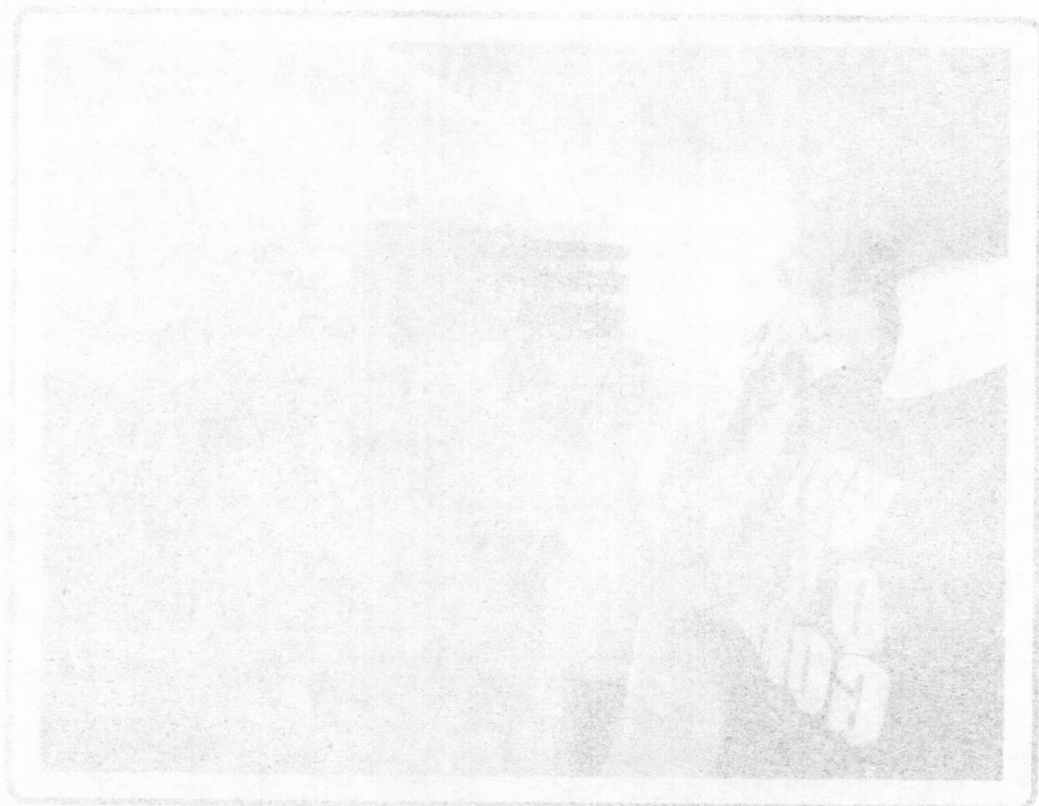
Diagram 5.3
Jumlah Anak Putus Sekolah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin





*Bidang Ekonomi, Ketenagakerjaan
dan Komunikasi*





Bildung Chronom. Kalendarium
der Kommunikation

Bab VI

Bidang Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Komunikasi

Tersedianya lapangan/kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Tenaga kerja adalah orang yang siap masuk dalam pasar kerja sesuai dengan upah yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan. Jumlah tenaga kerja dihitung dari jumlah penduduk usia produktif (umur 15 thn–65 thn) yang masuk kategori angkatan kerja.

Umumnya tingkat pengangguran yang dimiliki oleh Negara berkembang jauh lebih tinggi dari angka ideal. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran.

Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam bidang tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana berikut :

A. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja dari sektor formal yang tersebar pada 523 perusahaan di Kabupaten Bojonegoro adalah 27.793 orang 27.781 orang adalah berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 12 orang berkewarganegaraan Asing (WNA). (Sumber : Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro).

B. Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Jumlah tenaga kerja migran antar kerja antar daerah di Kabupaten Bojonegoro adalah 158 orang. Jumlah angkatan kerja dalam kategori ini dinominasi laki-laki yaitu 85 orang atau 53.8%, sedangkan yang perempuan berjumlah 73 orang atau 46.2%. Perbandingan AKAD antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Jumlah Tenaga Migran Antar Kerja Antar Daerah
Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin

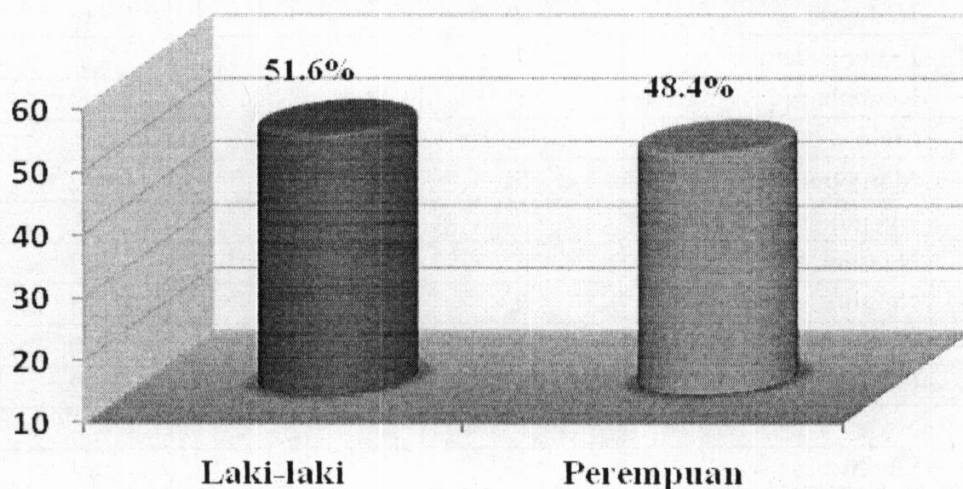
No	Kecamatan	Tenaga Migrant Antar Kerja Antar Daerah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Balen	2	1	3
2	Baureno	-	-	-
3	Bojonegoro	5	5	10
4	Bubulan	26	14	40
5	Dander	3	7	10
6	Gondang	1	1	2
7	Kalitidu	2	1	3
8	Kanor	2	1	3
9	Kapas	-	-	-
10	Kasiman	-	-	-
11	Kedewan	-	-	-
12	Kedungadem	5	5	10
13	Kepohbaru	-	-	-
14	Malo	-	-	-
15	Margomulyo	-	-	-
16	Ngambon	2	1	3
17	Ngasem	2	3	5
18	Ngraho	-	-	-
19	Padangan	-	-	-
20	Purwosari	-	-	-
21	Sekar	-	-	-
22	Sugihwaras	-	-	-
23	Sukosewu	-	-	-
24	Sumberrejo	4	4	8
25	Tambakrejo	-	-	-

26	Temayang	24	25	49
27	Trucuk	6	5	11
Jumlah		85	73	158

Sumber data: Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro 2011

Berdasarkan tabel di atas bahwa Kecamatan yang memiliki AKAD tertinggi di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kecamatan Temayang jumlah AKAD mencapai 49 orang, dan menunjukkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan yakni 24 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Sedangkan Kecamatan Bubulan jumlah AKAD 40 orang (26 orang laki-laki dan 14 orang perempuan).

Diagram 6.1
Prosentase Tenaga Migran Antar Kerja Antar Daerah
Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin



C. Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Jika dibandingkan dengan jumlah Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), jumlah Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN) jauh lebih tinggi baik dan angka perbandingan antara laki dan perempuannya berbanding terbalik. Artinya di dalam AKAD jumlah laki-laki yang dominan, sedangkan di dalam AKAN jumlah perempuan yang dominan (211 laki-laki dan 236 perempuan).

Tabel 6.2
Jumlah Tenaga Migran AKAN Kabupaten Bojonegoro
Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Tenaga Migrant Antar Kerja Antar Negara		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Balen	12	13	15
2	Baureno	7	5	12
3	Bojonegoro	2	4	6
4	Bubulan	13	8	23
5	Dander	22	56	78
6	Gondang	4	4	8
7	Kalitidu	6	8	14
8	Kanor	2	3	5
9	Kapas	1	2	3
10	Kasiman	35	18	53
11	Kedewan	10	4	14
12	Kedungadem	4	3	7
13	Kepohbaru	1	2	3
14	Malo	3	2	5
15	Margomulyo	5	7	12
16	Ngambon	3	2	5
17	Ngasem	5	7	12
18	Ngraho	8	6	14
19	Padangan	4	6	10
20	Purwosari	3	9	12
21	Sekar	1	2	3
22	Sugihwaras	5	8	13
23	Sukosewu	8	12	20
24	Sumberrejo	17	10	27
25	Tambakrejo	16	8	24
26	Temayang	7	8	15
27	Trucuk	4	7	11
Jumlah		211	236	447

Sumber data: Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro 2011

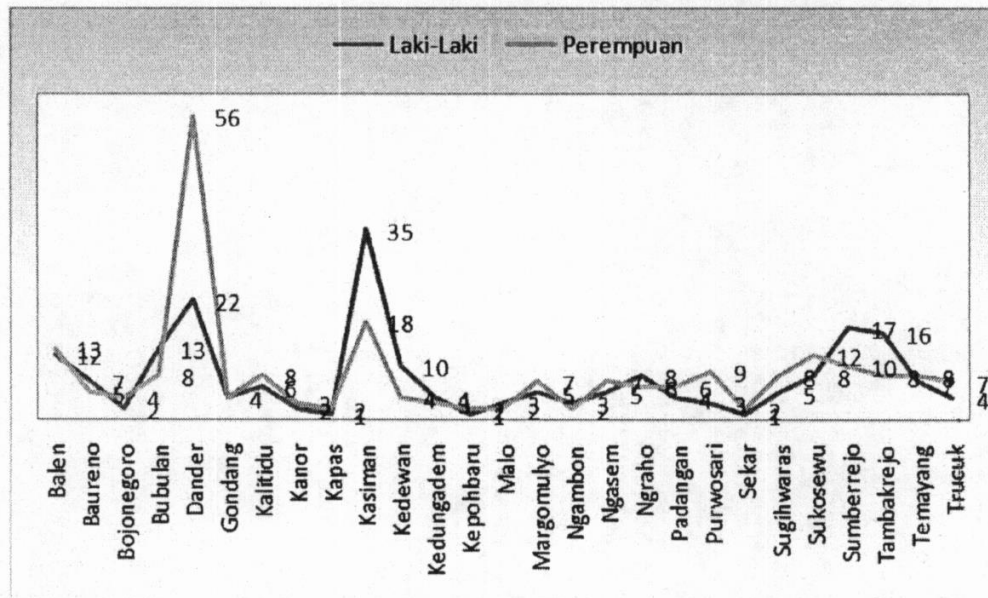
Tabel di atas menunjukkan bahwa dua Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi pengirim TKI antar Negara yaitu Kecamatan

rintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Sebagai gambaran keberadaan para pelaku UKM di Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut:

Dander jumlah AKAN tertinggi (78 orang) dengan rincian TKI 22 orang dan TKW 56 orang, menyusul Kecamatan Kasiman 53 orang terdiri dari TKI 35 orang dan TKW 18 orang. Untuk memberikan gambaran lebih jelas kondisi AKAN di atas, dapat diperhatikan grafik berikut ini.

Grafik 6.1
Jumlah Tenaga Migran AKAN Kabupaten Bojonegoro
Menurut Jenis Kelamin



D. UKM di Kabupaten Bojonegoro

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu membuktikan bahwa UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan peme-

Tabel 6.3

Data Terpilah UKM Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Kelompok/Pemilik	Jumlah		Prosentase		Jumlah Anggota	Disparitas	Indeks Paritas
			L	P	L	P			
1	Balen	8.300	16,600	15,112	52.3	47.7	31,712	-4.7	0.9
2	Baureno	8.901	25,305	26,703	48.7	51.3	52,008	2.7	1.1
3	Bojonegoro	23.492	32,156	31,103	50.8	49.2	63,259	-1.7	1.0
4	Bubulan	1.650	2,350	2,105	53	47.3	4,455	-5.5	0.9
5	Dander	2.900	3,850	3,450	53	47.3	7,300	-5.5	0.9
6	Gondang	1.225	1,375	1,225	53	47.1	2,600	-5.8	0.9
7	Kalitidu	5.225	7,870	7,200	52.2	47.8	15,070	-4.4	0.9
8	Kanor	3.350	4,750	3,355	59	41.4	8,105	-17.2	0.7
9	Kapas	8.703	13,054	11,200	53.8	46.2	24,254	-7.6	0.9
10	Kasiman	2.200	3,300	3,040	52	47.9	6,340	-4.1	0.9
11	Kedewan	1.150	1,143	862	57	43	2,005	-14.0	0.8
12	Kedungadem	3.500	5,170	3,930	56.8	43.2	9,100	-13.6	0.8
13	Kepohbaru	3.300	4,260	3,990	52	48.4	8,250	-3.3	0.9
14	Malo	2.600	2,250	2,252	50	50	4,502	0.0	1.0
15	Margomulyo	2.300	5,600	4,300	57	43.4	9,900	-13.1	0.8
16	Ngambon	1.350	1,600	1,200	57	42.9	2,800	-14.3	0.8
17	Ngasem	1.400	1,200	950	55.8	44.2	2,150	-11.6	0.8

No.	Kecamatan	Kelompok/Pemilik	Jumlah		Prosentase		Jumlah Anggota	Disparitas	Indeks Paritas
			L	P	L	P			
18	Ngraho	1.420	1,422	1,101	56.4	43.6	2,523	-12.7	0.8
19	Padangan	3.350	12,150	11,150	52	47.9	23,300	-4.3	0.9
20	Purwosari	2.350	3,050	3,520	46	53.6	6,570	7.2	1.2
21	Sekar	1.105	1,412	1,350	51	48.9	2,762	-2.2	1.0
22	Sugihwaras	3.400	5,350	4,850	52	47.5	10,200	-4.9	0.9
23	Sukosewu	2.700	5,100	4,450	53	46.6	9,550	-6.8	0.9
24	Sumberrejo	9.150	20,310	22,875	47	53	43,185	5.9	1.1
25	Tambakrejo	1.430	2,230	1,345	62.4	37.6	3,575	-24.8	0.6
26	Temayang	2.400	4,300	3,350	56	43.8	7,650	-12.4	0.8
27	Trucuk	3.300	3,198	2,475	56.4	43.6	5,673	-12.7	0.8
Jumlah		112.151	190,355	178,443	51.6	48.4	368,798	-3.2	0.9

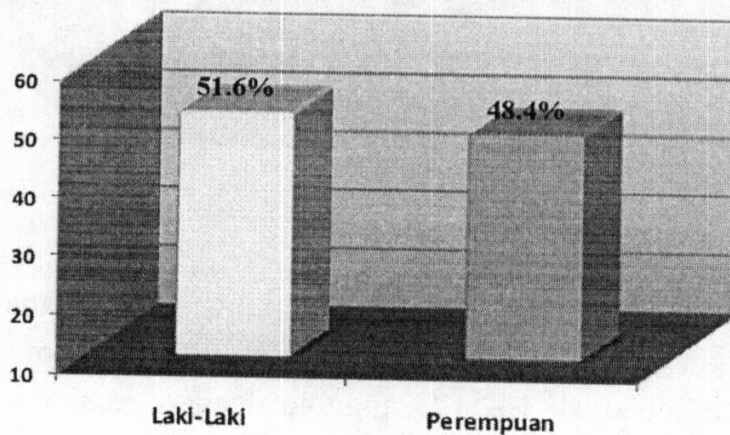
Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pemilik/kelompok UKM di Kab. Bojonegoro sebanyak 112.151. Kecamatan Malo dan Sekar anggota UKM laki-laki dan perempuan masing-masing 50%, telah setara dengan indeks paritas 1, menyusul Kecamatan Bojonegoro laki-laki 50,8% perempuan 49,2%. Sedangkan Tambakrejo merupakan Kecamatan yang belum menunjukkan setara yaitu laki-laki 62,4%, perempuan 37,6% dengan indeks paritas 0,6.

Dari total keseluruhan pengusaha sejumlah 368.798, perempuan memiliki prosentase sebesar 48.4% yakni pada jumlah 178.443 selebihnya adalah di si pelaku bidang ekonomi laki-laki yang memiliki prosentase 51.6% atau 190.355 orang yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan yang terdapat di Bojonegoro. Dari data ini kemudian diketahui bahwa indeks paritas antara laki-laki dan perempuan adalah 0.94 mendekati angka setara antara laki-laki dan perempuan yakni pada angka 1. Sedangkan disparitas masih terdapat -3.23 yang berarti juga masih ada selisih atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dengan prosentase laki-laki lebih tinggi. Sebagaimana pada diagram 5.2, masih terdapat kesenjangan pelaku koperasi antara laki-laki dan perempuan meski tidak signifikan.

Dalam bentuk diagram dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Diagram 6.2
Data Terpilah UKM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Jenis Kelamin

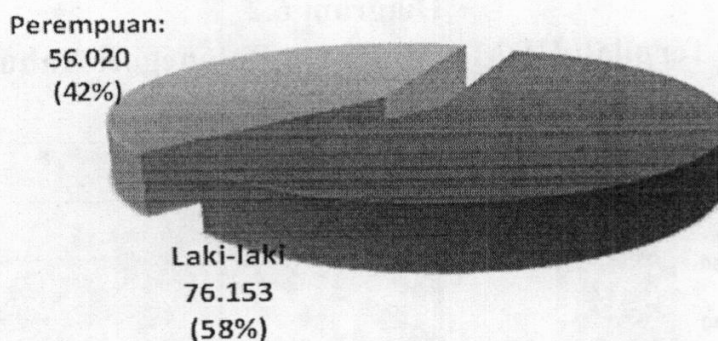


E. Keanggotaan Koperasi Tahun 2011 Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Indonesia melalui UU 1945 Pasal 33 memandang bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena beberapa hal; *pertama*: Koperasi mendidik sikap self helping, *kedua*: Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan sendiri; *ketiga*: Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli Indonesia; *keempat*: Koperasi menentang segala paham yang berbau individualism dan kapitalisme.

Dalam era globalisasi ekonomi sekarang, koperasi tetap dipandang sebagai sokoguru perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari jatidiri koperasi itu sendiri dalam gerakan dan cara kerjanya selalu mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam asas-asas pembangunan nasional.

Diagram 6.3
Keanggotaan Koperasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Jenis Kelamin



Sebagai gambaran keberlangsungan koperasi yang ada di Bojonegoro berikut adalah prosentase dari keseluruhan anggota koperasi yang tercatat sebanyak 132.173 anggota dengan prosentase keang-

gotaan laki-laki sejumlah 76.153 orang (57.6%), sedangkan perempuan tercatat sebanyak 56.020 orang (42.4%) yang tersebar di kecamatan dan desa se Bojonegoro.

Bobot kesenjangan dapat dilihat bahwa angka disparitas dari keanggotaan laki-laki dan perempuan adalah -15. Sebagaimana tersebut di atas telah disampaikan bahwa semakin tinggi nilai absolute disparitas maka semakin terjadi kesenjangan. Sedangkan indeks paritasnya adalah 0.74 yang berarti masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 6.4

Keanggotaan Koperasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah		Prosentase (%)		Jumlah Anggota	Disparitas	Indek Paritas
			L	P	L	P			
1	Balen	41	4.419	2.403	64,8	35,2	6.822	-29.6	0.5
2	Baureno	49	4.430	3.049	59,2	40,8	7.479	-18.5	0.7
3	Bojonegoro	193	15.740	8.702	64,4	35,6	24.442	-28.8	0.6
4	Bubulan	12	1.989	1.133	63,7	36,3	3.122	-27.4	0.6
5	Dander	38	2.308	2.620	46,8	53,2	4.928	6.3	1.1
6	Gondang	12	95	191	33,2	66,8	286	33.6	2.0
7	Kalitidu	39	2.301	2.172	51,4	48,6	4.473	-2.9	0.9
8	Kanor	42	2.419	1.942	55,5	44,5	4.361	-10.9	0.8
9	Kapas	48	4.439	4.554	49,4	50,6	8.993	1.3	1.0
10	Kasiman	19	2.360	1.226	65,8	34,2	3.586	-31.6	0.5
11	Kedewan	12	125	369	25,3	74,7	494	49.4	3.0
12	Kedungadem	46	1.700	2.088	44,9	55,1	3.788	10.2	1.2
13	Kepohbaru	40	3.095	2.773	52,7	47,3	5.868	-5.5	0.9
14	Malo	32	2.431	1.355	64,2	35,8	3.786	-28.4	0.6
15	Margomulyo	11	1.100	1.341	45,1	54,9	2.441	9.9	1.2
16	Ngambon	11	1.430	1.241	53,5	46,5	2.671	-7.1	0.9
17	Ngasem	41	2.446	2.390	50,6	49,4	4.836	-1.2	1.0

No.	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah		Prosentase (%)		Jumlah Anggota	Disparitas	Indek Paritas
			L	P	L	P			
18	Ngraho	24	2.000	1.479	57,5	42,5	3.479	-15.0	0.7
19	Padangan	36	2.004	1.903	51,3	48,7	3.907	-2.6	0.9
20	Purwosari	19	1.108	1.251	47,0	53,0	2.359	6.1	1.1
21	Sekar	13	1.740	723	70,6	29,4	2.463	-41.3	0.4
22	Sugihwaras	36	1.448	2.249	39,2	60,8	3.697	21.7	1.6
23	Sukosewu	20	215	379	36,2	63,8	594	27.6	1.8
24	Sumberrejo	64	2.975	2.837	51,2	48,8	5.812	-2.4	1.0
25	Tambakrejo	25	2.300	1.252	64,8	35,2	3.552	-29.5	0.5
26	Temayang	12	7.830	2.324	77,1	22,9	10.154	-54.2	0.3
27	Trucuk	23	1.706	2.074	45,1	54,9	3.780	9.7	1.2
	Jumlah	958	76.153	56.020			132.173		

Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro tahun 2011

Data di atas menunjukkan bahwa secara umum jumlah anggota koperasi di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 132.173 orang dengan rincian laki-laki 76.153 orang dan perempuan 56.020 orang. Dilihat dari jumlah prosentase laki-laki sebagai anggota koperasi jauh lebih besar dibanding dengan perempuan. Kecamatan Sekar 71% anggota koperasi adalah laki-laki, perempuan 29% menyusul Kecamatan Tambakrejo, Balen, dan Kecamatan Bojonegoro menunjukkan laki-laki 64%, perempuan 36%. Sebaliknya di Kecamatan Temayang dan Kedewan partisipasi perempuan anggota koperasi mencapai 74,8%. Kecamatan Kapas dan Ngasem menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dan perempuan sebagai anggota koperasi telah setara dengan disparitas 1 dan -1, dan indek paritasnya 1,03 dan 0,98.

F. Prosentase Jumlah Pinjaman Kredit Di Bank Jatim Menurut Jenis Kelamin

Data akses kredit yang diajukan kepada bank jatim pada periode tahun 2010-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5

Data Pinjaman Kredit Bank Jatim Menurut Jenis Kelamin

No	Peminjam	Peminjam	% Peminjam	Dis P	IP	Jumlah Pinjaman (Rp)	% Pinjaman	Dis P	IP
1	Laki-laki	6.280	54	-4	0,9	273.831.349.473	58	-0,16	0,7
2	Perempuan	5.350	46			198.291.666.860	42		
Jumlah		11.630				472.123.016.333			

Sumber data Bank Jatim Cabang Kab. Bojonegoro

Dari data ini dapat diketahui bahwa pelaku usaha yang melakukan pinjaman melalui Bank Jatim dari total pinjaman yakni Rp 472,123,016,333 dengan jumlah peminjam 11.630 dapat dipilah bahwa peminjam dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 46% sedangkan laki-laki 54%, Sehingga Indeks paritas dalam jumlah peminjam adalah 0.1 sedangkan disparitasnya -0.1. jika dilihat dari

aspek jumlah pinjaman maka akses yang diperoleh laki-laki adalah 58% sedangkan perempuan adalah 42% dengan indeks paritas 0.7 dan disparitas -0.16. Meskipun mendekati indeks paritas dan menipisnya disparitas antara perempuan dan laki-laki, kondisi tersebut menggambarkan bahwa partisipasi bidang ekonomi perempuan tetap harus ditingkatkan.

G. Data Penerima Kredit/Pinjaman Tahun 2011 BPR Bank Daerah Bojonegoro

Berikut adalah tabel data penerima kredit dari Jumlah penerima kredit/pinjaman pada tahun 2011 oleh BPR di Bojonegoro mencatat ada 1.732 nasabah dengan total pinjaman mencapai Rp. 34.668.750.000.

Table 6.6

Jumlah Pinjaman dan Peminjam Kredit BPR Bank Daerah Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin

No	Peminjam	Peminjam	% Peminjam	Dis P	IP	Jumlah Pinjaman (Rp)	% Pinjaman	Dis P	IP
1	Laki-laki	1.148	66	-32	0,51	24.882.750.000	71,8	-43,6	0,39
2	Perempuan	584	34			9.786.000.000	28,2		
	Jumlah	1.732	100			34.668.750.000	100		

Sumber data: Bank BPR Daerah Bojonegoro 2011

Dana tersebut, diakses oleh peminjam dengan prosentase jenis kelamin perempuan mengakses sebesar 33.7% (584) sedangkan laki-laki mengakses sebesar 66.3% (1148). Jumlah laki-laki jauh lebih besar dari perempuan dalam memanfaatkan pinjaman kredit yang dikeluarkan oleh BPR Daerah Bojonegoro.

H. Data Pinjaman/Kredit Bank BRI Tahun 2010-2011 Menurut Jenis Kelamin

Table 6.7

Peminjam Dana Bank Menurut Jenis Kelamin

No	Peminjam	Peminjam	% Peminjam	Dis P	IP	Jumlah Pinjaman (Rp)	% Pinjaman	Dis P	IP
1	Laki-laki		76	-52	0,315	654.220.000.000	77	-54	0,3
2	Perempuan	10.204	24			204.377.000.000	23		
	Jumlah	32.311	100			888.597.000.000	100		

Sumber data: Bank BRI Cabang Kab. Bojonegoro 2011

Dari table di atas dapat diketahui bahwa dari total peminjam pada tahun 2011 yakni 42.515 nasabah, prosentase perempuan adalah pada angka 24 % (8.946 orang), sedangkan pada laki-laki prosentase peminjam adalah 76% (28.330 orang). Sedangkan total pinjaman sejumlah Rp. 888,597,000,000 perempuan memiliki prosentase 23% (Rp. 204,377,000,000), sedangkan laki-laki memiliki akses 77% (Rp.684,220,000,000).

Tabel 6.8

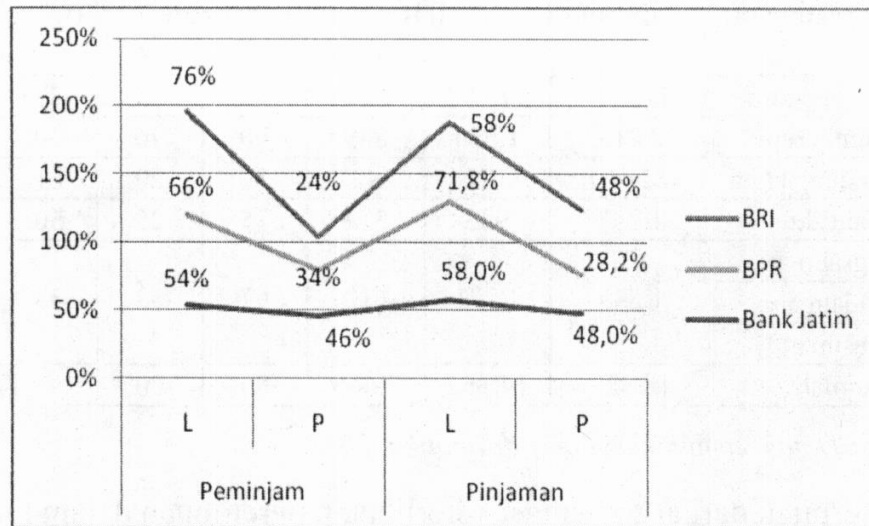
Rekapitulasi Peminjam Dana Bank Menurut Jenis Kelamin

No.	Bank	Peminjam				Dis P	IP
		L	%	P	%		
1.	Bank Jatim	6.280	54	5.350	46	-8,0	0,85
2.	BPR Bojonegoro	1.148	66	584	34	-32,6	0,51
3.	BRI	32.311	76	10.204	24	-52,0	0,31
	Jumlah	39.739		16.138			

Adapun nilai perbandingannya dapat dilihat sebagaimana pada gambar di bawah ini yang menunjukkan laki-laki lebih banyak mengakses perbankan daripada perempuan. Kondisi rendahnya akses terhadap perbankan terhadap perempuan dapat diprediksi karena perempuan lebih mendominasi pada usaha kecil dan bekerja informal, sementara laki-laki menguasai aset ekonomi dengan skala besar seperti pertanian dan usaha.

Grafik 6.1

Perbandingan Nasabah Tiga Bank Menurut Jenis Kelamin



I. PELANGGAN TELEKOMUNIKASI

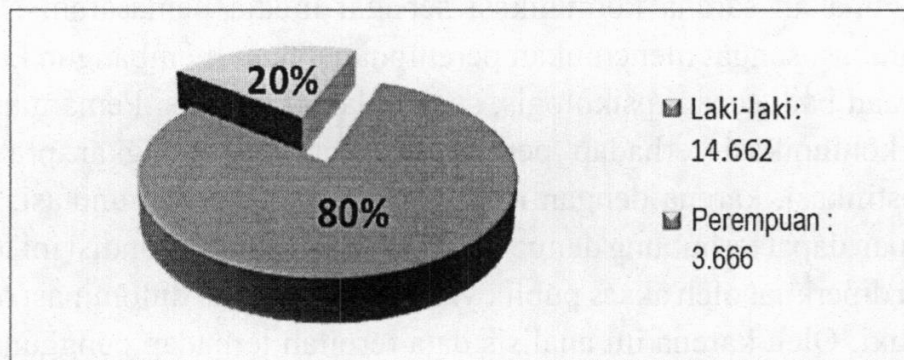
Komunikasi menentukan kualitas kesejahteraan masyarakat. Manusia menggunakan komunikasi untuk mempermudah akses, transaksi, berjejaring untuk memenuhi dan mengembangkan hubungan interpersonal, menambah pengetahuan serta memproduksi dan menggunakan sarana komunikasi sebagai media pemasaran. Nilai komunikasi sangat menentukan perempuan dalam membangun kesejahteraan baik secara psikologis, sosial, dan ekonomis. Pemanfaatan akses komunikasi terhadap perempuan akan membongkar praktik domestifikasi, karena dengan melanggan teknologi komunikasi, perempuan dapat terhubung dengan dunia di luar rumah. Kondisi ini juga sudah diperkuat oleh akses publik yang sudah banyak didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu analisis data terpilah terhadap penggunaan jasa telekomunikasi sangat penting untuk melihat seberapa intensif perempuan menggunakan teknologi dan dampak terhadap penggunaan teknologi terhadap kesejahteraan perempuan.

Tabel 6.9**Pelanggan Saluran Telepon Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011**

No	Kecamatan	Saluran Terpasang	Jml		Prosentase		Dis P	IP
			L	P	L	P		
1	Bojonegoro	12.809	11.000	1.809	86	14	-72	0,16
2	Sumberejo	2.219	1.334	889	60	40	-20	0,66
3	Kedungadem	214	172	42	80	20	-61	0,24
4	Kalitidu	1.237	925	312	75	25	-50	0,34
5	Ngraho	1.849	1.231	618	67	33	-33	0,50
6	Padangan							
7	Kasiman							
Jumlah		18.329	14.662	3.666	80	20		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2011

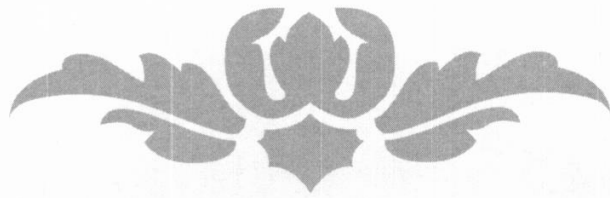
Berpijak dari argumentasi keterlibatan perempuan dalam menggunakan teknologi telekomunikasi, berikut ini data terpilah pelanggan telepon yang melanggan saluran telepon di tahun 2011 yang diambil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Diagram 6.4**Pelanggan Saluran Menurut Jenis Kelamin Telepon Tahun 2011**

Sementara itu jika dilihat dari perbedaan dan tingkat kesenjangannya, perempuan mempunyai akses terhadap teknologi komunikasi khususnya terkait dengan penyambungan saluran telepon berbeda secara signifikan dengan laki-laki. Oleh karena itu terjadi kesenjangan kebutuhan terhadap layanan sambungan telepon baru

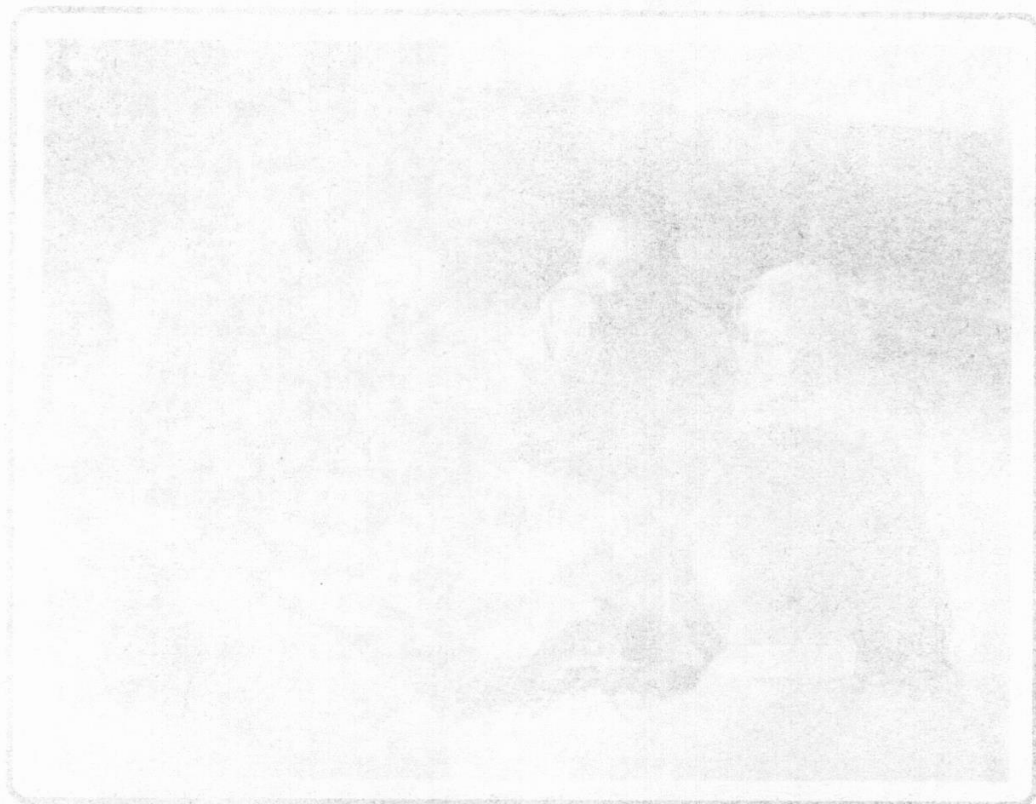
antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini mencerminkan jika unsur-unsur kepentingan domestik masih didominasi oleh kebutuhan perempuan.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
AND ARCHITECTURE



*Bidang Politik
dan Pengambilan Keputusan*





dan Pengambilan Keputusan
Bidang Politik

Bab VII

Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Secara umum krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum termasuk yang paling rentan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Krisis tersebut antara lain berupa tingginya angka kematian ibu dan bayi, memburuknya kondisi kesehatan anak-anak, meningkatnya arus pekerja migran perempuan (TKW), meningkatnya angka *drop-out* sekolah dan angka pengangguran. Dampak-dampak buruk itu telah meningkatkan kesadaran tentang perlunya menyusun sebuah agenda politik yang lebih peka gender (*gender sensitive*). Kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan gender.

Kebutuhan meningkatkan representasi politik perempuan berpangkal dari kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus dirombak dan semua itu mustahil dapat dicapai dengan sistem politik yang ada. Jika kaum perempuan mau serta bisa tampil untuk memegang berbagai posisi publik, niscaya mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka. Meningkatkan representasi politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok mereka serta masyarakat luas, juga mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dari semua latar belakang tersebut kemudian pemerintah telah membuka ruang partisipasi perempuan lebih luas dengan kuota 30% hal yang serupa juga bisa diakomodir dalam peran politik local sebagaimana LKMD. Namun sebagaimana sudah banyak dibahas dalam berbagai diskusi, kuota ini hanyalah mengatur pencalonan perempuan dalam legislatif saja bukan pada hasil akhir komposisi dalam keanggotaan lembaga legislative maupun lembaga politik di tingkat daerah. Perempuan secara riil masih menghadapi banyak faktor yang menghambat untuk berpartisipasi, sumbernya adalah adanya pemahaman yang membedakan antara ruang privat dan publik, juga ideologi gender yang beroperasi dalam masyarakat. Pada akhirnya pemahaman ini berpengaruh pada perempuan dalam menentukan posisinya di ruang publik.

Berikut adalah gambaran dari keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam posisi politik dan pengambilan keputusan.

A. Partisipasi di Lembaga Legislatif Berdasarkan Jenis Kelamin

1. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro menurut jenis kelamin

Tabel berikut adalah data terpilah jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014 berdasarkan jumlah partai dan jenis kelamin.

Table 7.1
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro
Menurut Jenis Kelamin

No	Partai Politik	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Partai Golkar	5	2	7
2.	PAN	6	1	7
3.	Partai Demokrat	5	1	6
4.	PDI Perjuangan	5	-	5
5.	PKB	4	1	5

6.	PKS	4	-	4
7.	PPP	1	2	3
8.	PKNU	3	-	3
9.	HANURA	2	-	2
10.	PBR	2	-	2
11.	PNBKI	2	-	2
12.	PKPI	1	-	1
13.	Partai Pelopor	-	1	1
14.	PKPB	1	-	1
15.	Partai Gerindra	-	1	1
		41	9	50

Sumber data: DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan anggota yang berjumlah 50 orang, perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuannya masih ada kesenjangan yang sangat tinggi yaitu 41 laki-laki dan 9 perempuan. Dari sembilan anggota perempuan tersebut berasal dari 8 partai politik dari 15 partai politik yang ada, dan ada 7 partai yang tidak mempunyai wakil perempuan di lembaga legislatif. Ini berarti kader politik perempuan dalam partai masih belum mendapat perhatian untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik.

Kemudian untuk melihat prosentase perbandingan antara anggota DPRD laki-laki dan perempuan dapat digambarkan dalam diagram berikut:

Diagram 7.1
Prosentase Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro
Menurut Jenis Kelamin

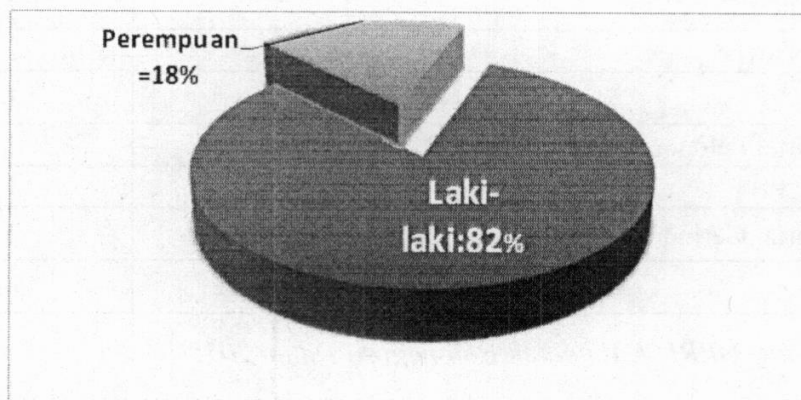


Diagram di atas menjelaskan bahwa perbandingan antara jumlah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang laki-laki dan perempuan masih ada kesenjangan yang cukup tinggi, yaitu 82% laki-laki dan hanya 18% yang perempuan. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih jauh dari harapan seperti yang diamanatkan undang-undang yakni diupayakan minimal mencapai 30%.

Melihat kondisi demikian, program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bojonegoro perlu terus ditingkatkan agar lebih banyak lagi perempuan yang mampu berperan di bidang politik, sehingga kebijakan daerah yang dihasilkan juga bisa lebih menyuarakan kepentingan perempuan dan lebih berkeadilan gender.

2. Anggota Komisi DPRD Periode Tahun 2009-2014 menurut jenis kelamin

Angka partisipasi perempuan dalam perpolitikan pada tingkat DPRD pada periode tahun 2009-2014 pada masing-masing komisi secara umum belum sesuai target yang telah dicanangkan pemerintah yakni 30%. Hanya ada satu komisi yakni komisi D yang telah memenuhi target minimal 30% dengan jumlah 33% perwakilan perempuan. Angka indeks paritas yang terjadi pada seluruh komisi adalah 0.2 sedangkan disparitasnya ada -60.9, sehingga masih masuk dalam kategori belum

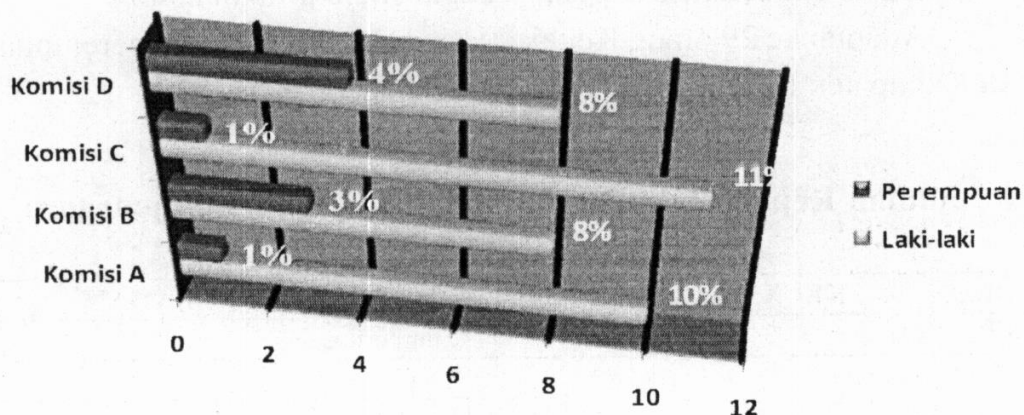
setara antara capaian perempuan dan laki-laki dengan dominasi jenis kelamin laki-laki sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Jumlah Anggota Komisi DPRD Kabupaten Bojonegoro
Menurut Jenis Kelamin

No.	Komisi	Jenis Kelamin		Prosentase		Jml	Dis P	IP
		L	P	L	P			
1	Komisi A	10	1	91	9	11	-81.8	0.1
2	Komisi B	8	3	73	27	11	-45.5	0.38
3	Komisi C	11	1	92	8	12	-83.3	0.09
4	Komisi D	8	4	67	33	12	-33.3	0.5
	Jumlah	37	9	80	20	46	-60.9	0.2

Dari table di atas dapat dijadikan diagram yang menggambarkan partisipasi perempuan dalam bidang politik masih jauh dari harapan kuota 30 %. Jika dilihat dari disparitasnya, perempuan belum menunjukkan kualitas partisipasi dalam bidang politik parlementer karena kesenjangannya masih cukup tinggi. Di lain pihak indeksparitas yang menunjukkan capaian kesetaraan juga belum diperoleh secara maksimal:

Diagram 7.2
Prosentase Anggota Komisi DPRD
Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin



3. Camat dan Kepala Desa/Lurah serta Anggota LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Di tingkat desa dan kecamatan, partisipasi perempuan dapat diketahui dengan melihat kuota keterwakilan perempuan yang menduduki posisi Kepala Desa, Camat dan beberapa posisi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga desa seperti LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).

Posisi perempuan yang menduduki Kepala Desa di seluruh Kabupaten Bojonegoro juga mulai merangkak semakin baik. Secara keseluruhan posisi Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 419 orang dengan rincian laki-laki sejumlah 389 orang (93%) dan perempuan sejumlah 30 orang (7%) yang tersebar pada 15 Kecamatan. Berdasarkan hitungan data pilah tersebut, jika dilihat dari disparitas gender (-86) dan indeksparitas gender (0.075) masih cukup tinggi bobot kesenjangannya. Sedangkan Jumlah Lurah di Kecamatan Bojonegoro sebanyak 11 orang yakni, laki-laki 10 orang dan perempuan 1 orang, artinya kurang dari 10%. Namun jika dilihat dari kemajuan partisipasi, jabatan Kepala Desa/Lurah perempuan sudah mulai mengubah cara berpikir dan nilai partisipasi perempuan dalam merebut akses pada pencalonan Kepala Desa. Dalam konteks ini, perempuan sebagai pemimpin, pada tingkat pemikiran masyarakat Bojonegoro tidak lagi dianggap sebagai suatu pilihan tabu.

Adapun ke 29 orang Kepala Desa dan 1 orang Lurah perempuan di Kabupaten Bojonegoro dimaksud adalah:

Tabel 7.3
Jumlah Kepala Desa Perempuan di Kabupaten Bojonegoro Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN
1	Dander	1	Sumbertlaseh
2	Baureno	2	Tlogoagung
		3	Sembunglor
3	Kepohbaru	4	Krangkong

4	Sumberejo	5	Pekuwon
		6	Pejambon
		7	Sumberejo
5	Kasiman	8	Batokan
		9	Besah
6	Kedungadem	10	Balongcabe
7	Ngasem	11	Ngasem
		12	Bonorejo
8	Malo	13	Ngujung
		14	Cemlaran
		15	Sukorejo
9	Kalitidu	16	Mojosari
		17	Panjunan
10	Sugihwaras	18	Glagahan
		19	Siwalan
		20	Glagahwangi
11	Purwosari	21	Punggur
		22	Tlatah
12	Tambakrejo	23	Sendangrejo
		24	Kacangan
		25	Tambakrejo
13	Sukosewu	26	Sukosewu
14	Margomulyo	27	Kalangan
15	Kapas	28	Kalianyar
		29	Sambiroto
16	Bojonegoro	30	(Kelurahan) Kadipaten
JUMLAH		30 Kepala Desa/Lurah	

Sumber data: BPM Kab. Bojonegoro 2011

Namun demikian jumlah Kepala Desa perempuan tidak sebanding dengan jumlah Camat perempuan. Pada struktur pemerintahan di atasnya, yakni di tingkat kecamatan, partisipasi perempuan sebagai Camat masih sangat terbatas dan mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Jumlah kecamatan di bawah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 kecamatan. Posisi Jabatan Camat yang dipegang oleh perempuan hanya 3 kecamatan yaitu Camat Bojonegoro, Camat Kalitidu, dan Camat Trucuk. Ini membuktikan jika pengkaderan untuk jabatan Camat sangat terbatas.

Selain memilah unsur Kepala Desa dan Camat, yang perlu ditinjau untuk dianalisis atas data terpilah adalah LKMD. Di tingkat desa LKMD berperan dalam membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat guna melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga selain sebagai salah satu seksi dalam struktur organisasi dan tata kerja LKMD, adalah juga merupakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif bergerak di wilayah Kelurahan, dan juga mengemban tugas pembinaan masyarakat di bidang lingkungan hidup di Kelurahan terutama pada kaum perempuan.

Melihat fungsinya yang strategis, partisipasi perempuan di LKMD tersebut belum dapat memenuhi target kuota yang representatif bagi perwakilan perempuan, hal ini terlihat dari data-data berikut :

Tabel 7.4
Anggota LKMD Kabupaten Bojonegoro Menurut Jenis Kelamin

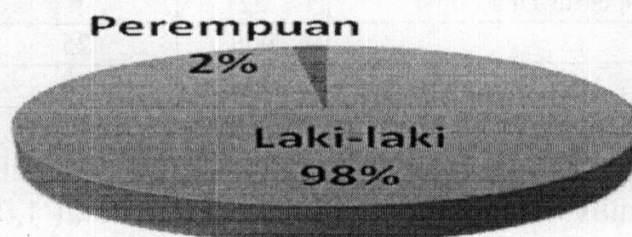
No	Kecamatan	Desa	Jumlah		Jml L-P	Prosentase		Dis P	IP
			L	P		L	P		
1	Balen	23	68	1	69	98.6	1.45	-97.1	0.01
2	Baureno	25	72	3	75	96.0	4	-92	0.04
3	Bojonegoro	18	53	1	54	98.1	1.85	-96.3	0.02
4	Bubulan	5	15	-	15	100	0	-100	0
5	Dander	16	48	-	48	100	0	-100	0
6	Gondang	7	21	-	21	100	0	-100	0
7	Kalitidu	24	70	2	72	97.2	2.78	-94.4	0.03
8	Kanor	25	72	3	75	96	4	-92	0.04
9	Kapas	21	62	1	63	98.4	1.59	-96.8	0.016
10	Kasiman	10	30	-	30	100	0	-100	0
11	Kedewan	5	15	-	15	100	0	-100	0
12	Kedungadem	23	68	1	69	98.6	1.45	-97.1	0.01
13	Kepohbaru	25	72	3	75	96	4	-92	0.04
14	Malo	20	60	-	60	100	0	-100	0

15	Margomulyo	6	18	-	18	100	0	-100	0
16	Ngambon	5	15	-	15	100	0	-100	0
17	Ngasem	23	67	2	69	97.1	2.9	-94.2	0.03
18	Ngraho	16	47	1	48	97.9	2.08	-95.8	0.02
19	Padangan	16	48	-	48	100	0	-100	0
20	Purwosari	12	36	-	36	100	0	-100	0
21	Sekar	6	18	-	18	100	0	-100	0
22	Sugihwaras	17	50	1	51	98	1.96	-96.1	0.02
23	Sukosewu	14	42	-	42	100	0	-100	0
24	Sumberrejo	26	75	3	78		3.85	-92.3	0.04
25	Tambakrejo	18	53	1	54		1.85	-96.3	0.02
26	Temayang	12	36	-	36	100	0	-100	0
27	Trucuk	12	44	3	47	93,6	6.4	-87.2	0.07
Jumlah			430	26	1275		1301		

Sumber data: BPM Kabupaten Bojonegoro 2011

Jika dilihat dari diagram di bawah, maka dapat diketahui prosentase partisipasi perempuan dalam kepengurusan LKMD di Bojonegoro pada seluruh Desa yang terdiri dari 430 Desa dapat disimpulkan sebagai berikut.

Diagram 7.3
Kepengurusan LKMD Menurut Jenis Kelamin



Sumber: LKMD Kabupaten Bojonegoro 2011

Di Bojonegoro angka partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan LKMD hanya 2% atau 26 orang dari jumlah keseluruhan 1.301 anggota LKMD, sedangkan 98% lainnya, didominasi laki-laki. Jumlah ini menunjukkan terjadinya disparitas yang sangat tinggi yakni -96, dengan indeks paritas 0.02. Dengan demikian par-

tisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan publik di tingkat desa di Kabupaten Bojonegoro masih sangat tertinggal dibanding laki-laki.

4. Partisipasi pada Lembaga Yudikatif Menurut Jenis Kelamin

Data yang diperoleh dari kehakiman dan Kejaksaan Negeri pada tahun 2011 menunjukkan jika prosentase dan jumlah data pilah pejabat bidang yudikatif sesuai jenis kelamin sebagaimana berikut :

Tabel 7.5
Personil POLRI POLRES Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

NO	Jenis Kepangkatan		Jumlah Polisi		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Perwira Menengah				
	A	Komisaris Besar Polisi	0	0	0
	B	Ajun Komisaris Besar Polisi	2	0	2
	C	Komisaris Polisi	7	0	7
2	Perwira Pertama				
	A	Ajun Komisaris Polisi	40	3	43
	B	Inspektur Satu Polisi	17	0	17
	C	Inspektur Dua Polisi	22	0	22
3	Bintara		905	25	930
	Jumlah		993	28	1.021

Sumber data: Polres Kabupaten Bojonegoro 2011

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari total 1.021 personil POLRES Kabupaten Bojonegoro, jumlah personil perempuan hanya 28 orang dengan kepangkatan Perwira Pertama 3 orang dan Bintara 25 orang. Kesenjangan pada jabatan ini sangat mencolok baik dalam hal jumlah maupun posisi kepangkatannya.

Tabel 7.6
Anggota lembaga yudikatif di Kabupaten Bojonegoro
Sesuai Jenis Kelamin

Tahun 2011	Hakim		Prosentase		Jaksa		Prosentase	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
	5	2	71%	29%	7	4	58.3%	41.7%

Sumber data: Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari data di atas kemudian dapat dihitung angka disparitas gender adalah - 0.43 pada profesi hakim, sedangkan angka indeks-paritasnya adalah 0.4. Berdasarkan data menunjukkan jika masih terjadi kesenjangan di kelembagaan yudikatif menyangkut partisipasi perempuan sebagai pejabat hakim dibanding dengan laki-laki. Sementara itu pada profesi jaksa, angka disparitasnya mencapai -0.7 dan indeksparitasnya sebesar 0.71. Jika dibanding dengan hakim, partisipasi perempuan lebih tinggi di posisi jaksa.

5. Kepengurusan Partai Politik

Tabel 7.7
Kepengurusan Partai Politik Menurut Jenis Kelamin

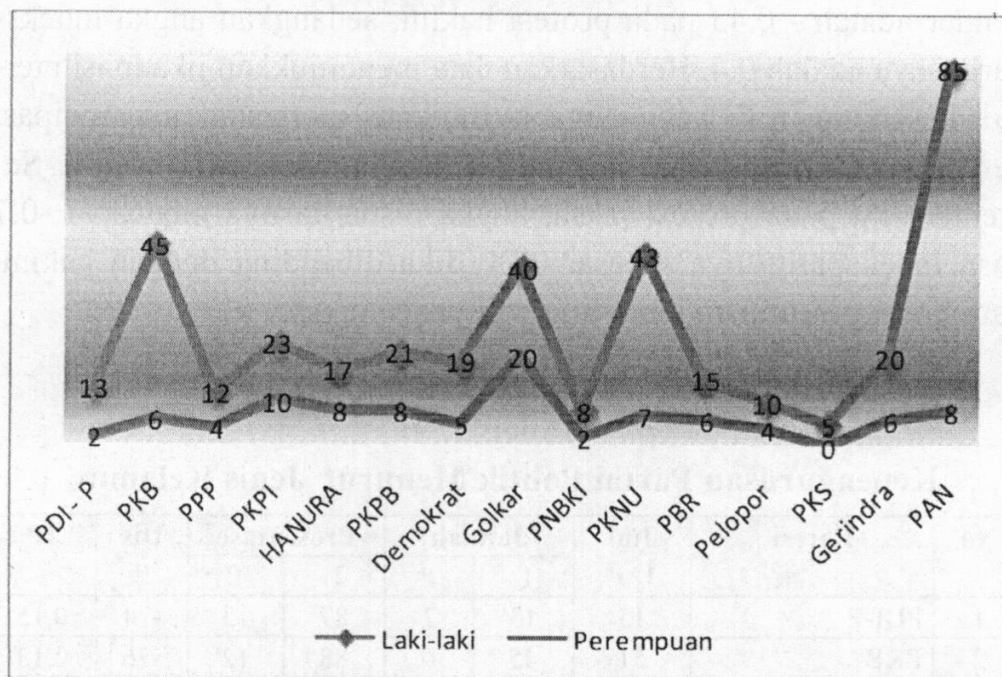
No	Partai	Jml L-P	Jumlah		Prosentase		Dis	IP
			L	P	L	P		
1	PDI-P	15	13	2	87	13	-74	0,15
2	PKB	51	45	6	88	12	-76	0,13
3	PPP	16	12	4	75	25	-50	0,33
4	PKPI	33	23	10	70	30	-40	0,43
5	HANURA	25	17	8	68	32	-36	0,47
6	PKPB	29	21	8	72	28	-44	0,38
7	PartaiDemokrat	24	19	5	79	21	-58	0,36
8	PartaiGolkar	60	40	20	67	33	-34	0,50
9	PNBKI	10	8	2	80	20	-60	0,25
10	PKNU	50	43	7	86	14	-72	0,16
11	PBR	21	15	6	71	29	-42	0,41
12	PartaiPelopor	14	10	4	71	29	-42	0,41
13	PKS	5	5	0	100	0	-100	0

14	Gerindra	26	20	6	77	23	-54	0,30
15	PAN	93	85	8	91	9	-82	0,10
Jumlah		472	376	96	79,7	20,3	-59,4	0,25

Sumber data: Bakesbangpolinmas Kabupaten Bojonegoro 2011

Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan pada grafik berikut ini.

Grafik 7.1
Jumlah Kepengurusan Partai di Kabupaten Bojonegoro
Menurut Jenis Kelamin



Data yang ditampilkan pada diagram ini adalah gambaran dari partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik yang ada di Bojonegoro.

Dari jumlah total seluruh pengurus partai yakni 472, perempuan yang termasuk didalam kepengurusan partai tercatat sejumlah 96 orang yakni 20.3 % dari jumlah keseluruhan, sedangkan laki-laki yang menjadi pengurus partai berjumlah 376 atau 79.7% dari total keseluruhan dan tersebar pada seluruh partai politik yang ada di Bojonegoro.

Indeks paritas yang terdapat dalam data ini adalah 0.25 sehingga masih terdapat kesenjangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki. Sedangkan disparitas yang terjadi adalah -59,4, kesimpulannya adalah masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kepengurusan partai politik.

B. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bojonegoro

Tenaga PNS di Kabupaten Bojonegoro merupakan representasi dari pemerintah sebagai aparatur negara. Untuk mendapatkan gambaran umum berdasarkan jenis kelamin pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro berikut ini dapat dirinci data terpilah menurut jenis kelamin:

Tabel 7.8
Anggota PNS Sekda dan DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin

No.	Instansi/Unit Kerja	Jumlah Tahun 2011						
		Jumlah	Jumlah		Prosentase		Dis P	IP
		L+P	L	P	L	P		
I	Sekretariat Daerah	230	150	80	65,2	34,8	-0,30	0,53
II	Sekretariat DPRD	44	31	13	70,5	29,5	-0,41	0,42
JUMLAH		274	181	93	66,1	33,9	-0,32	0,51

Sumber data: BKD Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari 274 total pegawai negeri sipil yang bekerja pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, pegawai laki-laki sejumlah 181 orang (66.1%) sedangkan perempuan sejumlah 93 orang (33.9%). Angka disparitas berada pada -32 dan indeksparitasnya berada pada 0.51. Ketika standar disparitas dan indeksparitas dijadikan pedoman untuk menganalisi jumlah anggota PNS di Sekda dan Sekretaris DPRD, maka kesenjangan gender masih kuat dan kuota kerja pada instansi ini belum mencapai pemerataan dan partisipasi perempuan.

Tabel 7.9
Data PNS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Jenis Kelamin

No.	Dinas	JUMLAH TAHUN 2011						
		Total	Jumlah		Prosentase (%)		Dis P	IP
			L+P	L	P	L	P	
1.	Pertanian	143	114	29	79,7	20,3	-59	0,25
2.	Nakertrans Dan Sos	57	43	14	75,44	24,56	-50,88	0,33
3.	Kependudukan Dan Capil	42	30	12	71,43	28,57	-42,86	0,40
4.	Pekerjaan Umum	86	82	4	95,35	4,65	-90,70	0,05
5.	Pengairn	104	90	14	86,54	13,46	-73,08	0,16
6.	Perindag	38	24	14	63,16	36,84	-26,32	0,58
7.	Perhutanan & Perkebunan	60	52	8	86,67	13,33	-73,33	0,15
8.	Peternakan Dan Perikanan	105	84	21	80,00	20,00	-60,00	0,25
9.	Pendapatan Pengelolaan Keu. & Asset	78	52	26	66,67	33,33	-33,34	0,50
10.	Pendidikan	7.996	4.110	3.886	51,40	48,60	-2,80	0,95
11.	Perhubungan	136	126	10	92,65	7,35	-85,29	0,08
12.	Kebudayaan & Pariwisata	60	48	12	80,00	20,00	-60,00	0,25
13.	Kesehatan	835	294	541	35,21	64,79	29,58	1,84
14.	Koperasi Dan UKM	39	31	8	7,49	20,51	-58,97	0,26
15.	Komunikasi & Informatika	63	38	25	60,32	39,68	-20,63	0,66
16.	Kebersihan & Pertamanan	181	138	43	76,24	23,76	-52,49	0,31
17.	Inspektorat	38	28	10	73,68	26,32	-47,37	0,36
Jumlah		10.061	5.384	4.667	53,51	46,49	-7,03	0,87

Sumber data: BKD Kabupaten Bojonegoro tahun 2011

Berikut juga dijabarkan data kepegawaian berdasarkan Dinas yang ada di Bojonegoro. Jumlah anggota PNS adalah 10.061 orang, dengan rincian pegawai laki-laki sejumlah 5.384 (53.5%) sedangkan perempuan sejumlah 4.677 orang (46.5%). Angka disparitas yang ada

adalah -7.03, sedangkan indeksparitasnya adalah 0.87. Disparitas dan indeksparitas juga masih menyisakan kesenjangan terhadap peran-peran perempuan terutama Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan kedinasan.

Tabel 7.10
PNS Pada Badan di Kab.Bojongoro Tahun 2011
Menurut Jenis Kelamin

No.	BADAN	JUMLAH TAHUN 2011						
		Jml	Jumlah		Prosentase		Dis P	IP
		L+P	L	P	L	P		
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	42	26	16	61,9	38,1	-23,8	0,6
2.	Kepegawaian Daerah	46	32	14	69,6	30,4	-39,1	0,4
3.	Kesbang Linmas	39	32	7	82,1	17,9	-64,1	0,2
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	31	23	8	74,2	25,8	-48,4	0,3
5.	Pemberdayaan Perempuan Dan KB	169	84	85	49,7	50,3	0,6	1,0
6.	Lingkungan Hidup	33	20	13	60,6	39,4	-21,2	0,7
7.	Badan Perijinan	22	17	5	77,3	22,7	-54,5	0,3
8.	BPBD Klasifikasi B	31	27	4	87,1	12,9	-74,2	0,1
Jumlah		413	261	152	63,2	36,8	-26,4	0,6

Sumber data: BKD Kabupaten Bojonegoro tahun 2011

Data diatas adalah data pegawai negeri sipil yang bekerja pada badan tertentu yang ada di Bojonegoro. Secara keseluruhan untuk PNS yang berada di bawah badan-badan sejumlah 413 orang. Semua dapat dijabarkan bahwa jumlah perempuan yang PNS pada seluruh badan sejumlah 152 orang (36.8 %) dan laki-laki sejumlah 261 orang (63.2%). Disparitas yang muncul adalah -26.3 sedangkan indeks paritasnya adalah 0.58. Dengan demikian masih terjadi kesenjangan gender yang cukup signifikan, sehingga kondisi ini perlu diubah melalui kebijakan pihak terkait agar representasi perempuan pada perekrutan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro ke depan menjadi perhatian.

Tabel 7.11
PNS di RSUD Kab. Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Jenis Kelamin

No.	RSUD	JUMLAH TAHUN 2011						
		Juml	Jumlah		Prosentase		Dis P	IP
		L+P	L	P	L	P		
1.	RSUD Kelas B Bojonegoro	423	199	224	47,05	52,95	5,45	1,12
2.	RSUD Kelas D Sumberejo	57	31	26	54,39	45,61	-8,78	0,84
3.	RSUD Kelas D Padangan	47	17	30	36,17	63,83	27,66	1,76
JUMLAH		527	247	280	46,87	53,13	6,26	1,13

Sumber data: BKD Kabupaten Bojonegoro tahun 2011

Gambaran selanjutnya mengetahui bagaimana data pilah gender yang dibangun dari rincian Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan RSUD Kabupaten Bojonegoro. Secara keseluruhan jumlah PNS di lingkungan RSUD, perkantoran dan kecamatan sebanyak 527 orang dengan rincian 247 orang laki-laki (46.9%) dan perempuan sejumlah 280 orang (53.1%). Hasil analisis gender yang dilihat dari analisis disparitas dan indekparitas menunjukkan bahwa disparitas gender menunjukkan angka 6.3 dan indeksparitas mencapai 1.1. Berdasarkan capaian tersebut pegawai negeri sipil di RSUD secara ideal sudah mewakili pencapaian partisipasi gender yang seimbang. Hal ini menunjukkan jika disparitas gendernya telah mencapai nilai di atas standar minimal dan indeksparitasnya menunjukkan angka absolut. Jadi dapat disimpulkan jika partisipasi gender untuk kategori PNS di RSUD sesuai dengan kriteria indikator pembangunan gender.

Tabel 7.12
PNS Pada Kantor Kab.Bojonegoro Tahun 2011
Menurut Jenis Kelamin

No.	KANTOR	JUMLAH TAHUN 2011						
		Jml	Jumlah		Prosentase		Dis P	I P
		L+P	L	P	L	P		
1.	Ketahanan Pangan	19	14	5	73,68	26,32	-47,36	0,36
2.	Arsip dan Perpustakaan	24	17	7	70,83	29,17	-41,66	0,41
3.	Satpol dan Pamongpraja	43	37	6	86,05	13,95	-72,1	0,16
JUMLAH		86	68	18	79,07	20,93	-58,14	0,26

Sumber data: BKD Kabupaten Bojonegoro 2011

Sementara itu data kepegawaian perkantoran Arsip dan Perpustakaan, Ketahanan Pangan, dan Satpol PP di Bojonegoro menunjukkan jumlah PNS adalah 86 orang dengan rincian 68 laki-laki (79.1%) dan perempuan 18 orang (20.9%). Adapun angka disparitas belum mencapai indikator yang ditetapkan dan masih mencapai -58.1 dan indeksparitasnya sebesar 0.3. Melihat angka minus dari angka disparitas dan jauhnya indeksparitas dari angka absolut maka pada konteks data kepegawaian di tiga instansi ini masih terjadi kesenjangan gender yang cukup tinggi.

Tabel 7.13
PNS Pada Kecamatan di Kab.Bojonegoro
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011

No.	KECAMATAN	JUMLAH TAHUN 2011						
		Juml	Jumlah		PROSENTASE		Dis P	IP
		L+P	L	P	L	P		
1.	KECAMATAN (27)	920	776	144	84,35	15,65	-68,7	0,18
JUMLAH		920	776	144	84,35	15,65	-68,7	0,18

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Data kepegawaian berdasarkan kecamatan yang ada di Bojonegoro jumlah anggota PNS yang ada adalah 920 orang, dengan rincian 776 laki-laki (84.3%) dan perempuan sejumlah 144 orang (15.7%). Angka disparitas menunjukkan disparitas -68.7 dan indeksparitas sebesar 0.186. Artinya kesenjangan gender cukup signifikan yang tidak menunjukkan perimbangan partisipasi perempuan.

Diagram 7.4
Prosentase PNS Kabupaten Bojonegoro
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011



Sumber data: BKD Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari keseluruhan data pegawai negeri yang ada di Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa keterwakilan atau partisipasi perempuan sebesar 43.7% perempuan dan laki-laki 56.3%. Meskipun belum mencapai kesetaraan gender, tetapi partisipasi perempuan untuk Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan partisipasi mereka di sejumlah sektor pembangunan lainnya.

Tabel 7.14
Jabatan Fungsional & Struktural Pada Dinas Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro 201 Menurut Jenis Kelamin

No	Dinas	Jml L-P	Jumlah		Prosentase		Dis P	IP
			L	P	L	P		
1	Pertanian	121	96	25	79,3	20,66	-58,64	0,26
2	Nakertransos	36	27	9	75	25	-50,00	0,33
3	Kependudukan dan Capil	21	15	6	71,4	28,6	-42,86	0,39
4	Pekerjaan umum	63	61	2	96,8	3,17	-93,65	0,03
5	Pengairan	79	68	11	86,1	13,9	-72,15	0,16
6	Perindag	20	13	7	65	35	-30	0,54
7	Perhutanan &n Perkebunan	40	36	4	90	10	-80	0,11
8	Peternakan dan Perikanan	80	69	11	86,2	13,8	-72,5	0,16
9	Pendapatan Pengelolaan KEU & ASSET	49	33	16	67,3	32,7	-34,69	0,48
10	Pendidikan	7.915	4.033	3.882	50,95	49,04	-1,91	0,96
11	Perhubungan	117	108	9	92,30	7,69	-84,61	0,08
12	Kebudayaan & Pariwisata	39	33	6	84,61	15,38	-69,23	0,18
13	Kesehatan	784	261	523	33,29	66,71	33,42	2,00
14	Koperasi UKM	20	18	2	90	10	-80	0,11
15	Komunikasi & Informatika	42	26	16	61,90	38,15	-23,75	0,61
16	Kebersihan & Pertanaman	167	126	41	75,45	24,55	-50,9	0,32
17	Inspektorat	18	12	6	66,67	33,33	-33,34	0,49
	Jumlah	9.613	5.037	4.576	52,39	47,61	-4,78	0,91

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro 2011

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah 9.613 orang pejabat fungsional dan struktural di lingkungan dinas-dinas di Kab. Bojonegoro dengan rincian laki-laki 5.037 orang (52,39%), dan perempuan mencapai 4.576 orang (47,61%). Jumlah pejabat fungsional pada Dinas Kesehatan perempuan surplus dengan Indek Paritas 2, sedangkan pada Dinas Pendidikan perempuan hampir setara dengan laki-laki.

Jika dikomparasikan dengan jabatan fungsional saja, perempuan sebagai tenaga medis/para medis dan guru lebih banyak dibanding dengan jabatan fungsional pada Dinas lainnya di Kab. Bojonegoro.

Tabel 7.15

**Jabatan Fungsional & Struktural Pada Badan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis
Kelamin**

No	Badan	Jml L-P	Jumlah		Prosentase		Dis P	IP
			L	P	L	P		
1	BAPPEDA	25	14	11	56	44	-12	0,78
2	Kepegawaian Daerah	29	21	8	72,41	27,58	-44,83	0,38
3	Kesbangpolinmas	18	16	2	88,89	11,11	-77,78	0,12
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	14	8	6	57,14	42,85	-14,29	0,74
5	Pemberdayaan Perempuan & KB	125	57	68	45,6	54,4	8,8	1,19
6	Lingkungan Hidup	17	9	8	52,94	47,06	-5,88	0,88
7	Perijinan	14	11	3	78,57	21,43	-57,14	0,27
8	BPBD Klasifikasi B	26	23	3	88,46	11,54	-76,92	,13
	Jumlah	268	159	109	59,33	40,67	-18,66	0,68

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Jumlah jabatan fungsional dan structural pada badan di lingkungan Kabupaten Bojonegoro 268, dengan rincian laki-laki 159 (59.33%) dan perempuan 109 (40,67%). Dari delapan Badan tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) jumlah perempuan surplus yaitu 68 (54,4%) perempuan dan 57 (45,6%) laki-laki. Data ini jika dikomplilasikan dengan tenaga penyuluh KB pada jabatan fungsional bahwa jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sebagai penyuluh KB.

Tabel 7.16
Jabatan Fungsional & Struktural Pada RSUD
Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin

No	RSUD	Jml L-P	Jumlah		Prosentase		Dis P	IP
			L	P	L	P		
1	RSUD Kls B Bojonegoro	402	189	213	47,02	52,98	5,96	1,12
2	RSUD Kls D Sumberejo	53	29	24	54,72	45,28	-9,44	0,82
3	RSUD Kls D Padangan	43	16	27	37,21	62,79	25,58	1,68
	Jumlah	498	234	264	47	53	6,02	1,13

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Dari seluruh jumlah jabatan fungsional maupun struktural pada **RSUD** Kabupaten Bojonegoro 498, perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki yaitu perempuan mencapai 264 (53%), laki-laki 264 (47%) dengan disparitas 6 dan indek paritas mencapai 1,3. Hanya RSUD kelas II Dengan secara umum posisi perempuan pada jabatan di RSUD Kab. Bojonegoro telah menunjukkan kemajuan dibanding dengan unit kerja lainnya.

Tabel 7.17
Pejabat Fungsional & Struktural Pada Kantor di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis
Kelamin

No	Kantor	Jml L-P	Jumlah		Prosentase		Dis P	IP
			L	P	L	P		
1	Ketahanan Pangan	14	10	4	71,43	28,57	-42,86	0,39
2	Arsip dan Perpustakaan	19	13	6	68,42	31,58	-36,84	0,46
3	Satpol dan Pamongpraja	38	32	6	84,21	15,79	-68,42	0,18
	Jumlah	71	55	16	77,46	22,54	-54,92	0,29

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Tabel di atas menggambarkan bahwa secara umum perempuan belum setara dalam menduduki jabatan fungsional maupun structural pada Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Laki-laki masih mendominasi dengan capaian 77,46%, sedangkan perempuan hanya 22,54%. Kesenjangan gender yang terjadi dapat diperhatikan pula pada disparitasnya mencapai -54,92 dengan indeks paritas 0,29.

Tabel 7.18

Jabatan Fungsional & Struktural Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jml L-P	Jumlah		Prosentase		Dis P	IP
			L	P	L	P		
1	Kecamatan (27)	610	515	95	84,43	15,57	-68,86	0,18
	Jumlah	610	515	95	84,43	15,57	-68,86	0,18

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Pada lingkungan Kecamatan, pejabat fungsional dan structural menunjukkan kesenjangan gender yang sangat signifikan. Dari 27 kecamatan, jumlah jabatan 610 laki-laki mencapai 515 (84%), sedangkan perempuan hanya 95 (15,57%). Disparitas yang ditemukan -68,86 dan indeks paritas 0,18.

Tabel 7.19

Pejabat Fungsional & Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin

No	Instansi	Jml L-P	Jumlah		Prosentase		Dis P	IP
			L	P	L	P		
1	Sek Daerah	178	109	69	61,24	38,76	-22,48	0,63
2	Sek DPRD	28	21	7	75	25	-50	0,33
3	Dinas	9.611	5.035	4.576	52,4	47,6	-4,76	0,91
4	Badan	268	159	109	59,3	40,7	-18,66	0,68
5	RSUD	498	234	264	47	53	6,04	1,13
6	Kantor	71	55	16	77,46	22,54	-54,92	0,31
7	Kecamatan	610	515	95	84,43	15,57	-68,86	0,18
	Total	11.264	6.128	5.136	54,41	45,59	-8,82	0,83

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2011 secara keseluruhan masih terjadi kesenjangan yaitu dari 11.264 posisi jabatan struktural dan fungsional laki-laki mencapai 6.128 orang (54,41%), perempuan 45,59 (45,59%). Disparitas -8,82 dan indeks paritas 0,83. Jika diperhatikan dari penyebaran perempuan dan laki-laki pada seluruh SKPD, perempuan surplus terkonsentrasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.

Tabel 7.20

Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin

No	Dinas	Eselon II b		Eselon IIIa		Eselon III b		Eselon IVa		Eselon IVb	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pertanian	1	0	1	1	3	0	14	3	0	0
2	Nakertransos	1	0	1	0	3	1	11	4	0	0
3	Kependudukan dan Capil	1	0	1	0	3	1	10	5	0	0
4	Pekerjaan umum	1	0	1	0	4	0	15	2	0	0
5	Pengairan	1	0	1	0	4	0	13	3	3	0
6	Perindag	1	0	1	0	1	2	8	5	0	0
7	Perhutanan dan Perkebunan	1	0	1	0	4	0	10	4	0	0
8	Peternakan dan Perikanan	1	0	1	0	2	2	11	8	0	0
9	Pendapatan Pengelolaan KEU & ASSET	1	0	1	0	6	0	11	10	0	0
10	Pendidikan	1	0	1	0	5	0	43	3	27	1
11	Perhubungan	1	0	1	0	3	0	12	0	1	1
12	Kebudayaan & Pariwisata	1	0	1	0	3	1	10	4	0	1
13	Kesehatan	1	0	1	0	2	2	29	16	0	0
14	Koperasi UKM	1	0	1	0	3	1	8	5	0	0
15	Komunikasi & Informatika	1	0	0	1	3	1	7	7	1	0
16	Kebersihan & Pertanaman	1	0	1	0	3	0	7	2	0	0
17	Inspektorat	1	0	5	0	0	0	10	4	0	0
	Jumlah	17	0	19	2	52	11	229	85	32	3

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada dinas di lingkungan pemerintah Kab. Bojonegoro tahun 2011, jabatan eselon II b sebanyak 17 orang semuanya laki-laki, perempuan nihil. Sedangkan pada eselon III a, laki-laki 19 orang, perempuan hanya 2 orang yaitu pada Dinas Pertanian dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada eselon III b, jumlah laki-laki mencapai 52, sedangkan perempuan tertinggal jauh hanya 11 orang. Posisi ini lebih senjang lagi jika dilihat pada eselon IV a, laki-laki mencapai 229, perempuan hanya 85, dan pada eselon IV b laki-laki 32, perempuan hanya 3 orang. Secara umum perempuan kurang dari 10% menduduki jabatan eselon II hingga eselon IV.

Tabel 7.21

Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Badan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin

No	Badan	Eselon IIb		Eselon IIIa		Eselon IIIb		Eselon IVa		Eselon IV b	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	BAPPEDA	1	0	1	0	3	1	7	4	0	0
2	Kepegawaian Daerah	1	0	1	0	3	1	6	5	0	0
3	Kesbangpolinmas	1	0	2	0	4	0	9	5	0	0
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	0	1	0	4	0	9	2	0	0
5	Pemberdayaan Perempuan & KB	0	1	1	0	1	3	25	13	0	0
6	Lingkungan Hidup	1	0	1	0	3	1	6	4	0	0
7	Perijinan	1	0	1	0	3	0	1	2	0	0
8	BPBD Klasifikasi B	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0
	Jumlah	6	1	9	0	21	6	66	36	0	0

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Jabatan struktural pada badan di lingkungan pemerintah Kab. Bojonegoro tahun 2011 pada eselon II b perempuan hanya 1 orang yaitu Badan PPKB sedangkan 7 badan lainnya diduduki oleh 9 orang laki-laki. Pada eselon III perempuan nihil, eselon III b laki-laki 21, perempuan 6 orang. Sedangkan pada eselon IV a jumlah perempuan meningkat yakni 36 orang dan laki-laki 66 orang.

Tabel 7.22
Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV RSUD Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin

No	RSUD	Eselon IIb		Eselon IIIa		Eselon IIIb		Eselon IVa		Eselon V b	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	RSUD Kls B Bojonegoro	1	0	2	0	3	2	4	9	0	0
2	RSUD Kls D Sumberejo	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
3	RSUD Kls D Padangan	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0
	Jumlah	1	0	3	1	3	2	6	13	0	0

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika jumlah perempuan pada jabatan fungsional Dinas Kesehatan adalah surplus, tetapi fenomena ini menjadi tidak sama dan sebangun ketika dilihat dari jabatan struktural. Meskipun jumlah perempuan lebih banyak, posisi pengambil keputusan pada di lingkungan RSUD. Perempuan hanya surplus pada posisi eselon IV a yaitu mencapai 13 orang.

Tabel 7.23
Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Kantor Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin

No	Kantor	Eselon IIb		Eselon IIIa		Eselon IIIb		Eselon IVa		Eselon Vb	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Ketahanan Pangan	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0
2	Arsip dan Perpustakaan	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0
3	Satpol dan Pamongpraja	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0
	Jumlah	0	0	3	0	0	0	10	2	0	0

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Data pejabat struktural pada Kantor pemerintah Kab. Bojonegoro 2011, perempuan hanya 2 orang menempati eselon IV a, sedangkan 3 orang pada eselon IIIa dan 10 orang eselon IVa seluruhnya laki-laki.

Tabel 7.24

Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Eselon IIb		Eselon IIIa		Eselon IIIb		Eselon IVa		Eselon IVb	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan (27)	0	0	24	3	26	1	125	13	86	32
	Jumlah	0	0	24	3	26	1	125	13	86	32

Sumber data: BKD Kab. Bojonegoro 2011

Pada 27 Kantor Kecamatan posisi perempuan pada eselon IIIa sebanyak 3 orang, eselon IIIb 1 orang, sedangkan IVa sebanyak 13 orang dan IVb hanya 32 orang. Jadi secara keseluruhan perempuan jumlah perempuan hanya mencapai sekitar 10%.

Tabel 7.25

Pejabat Fungsional Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin

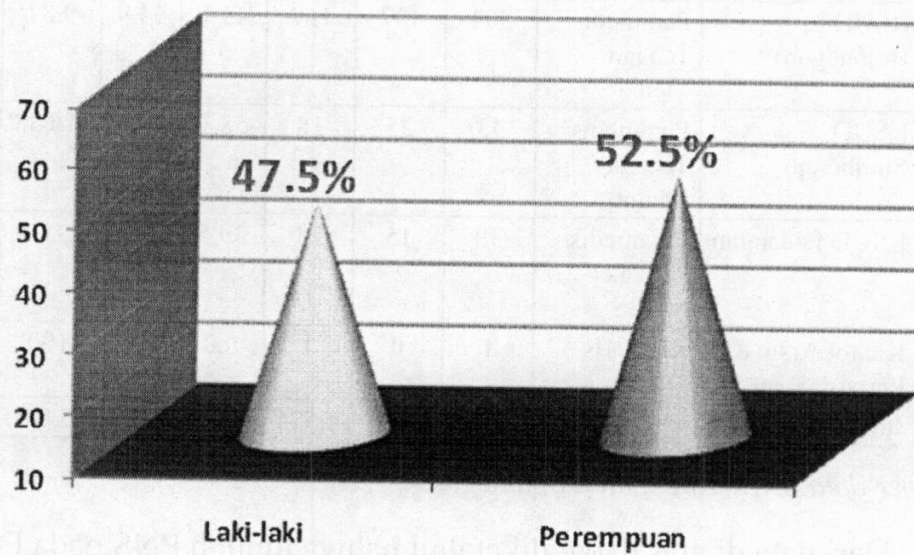
No	Dinas/Instansi	Jabatan Fungsional	Jml L-P	Jumlah		%		Dis P	IP
				L	P	L	P		
1	Dinas Pertanian	Penyuluh	90	76	14	84,4	15,6	-68,9	0,18
2	Dinas Hutbun	Penyuluh	14	12	2	85,7	14,3	-71,43	0,17
3	Badan P2KB	Penyuluh KB	83	36	47	43,4	56,6	13,25	1,31
4	Kantor Ketahanan Pangan	Penyuluh	1	1	0	100	0,0	-100	0,00

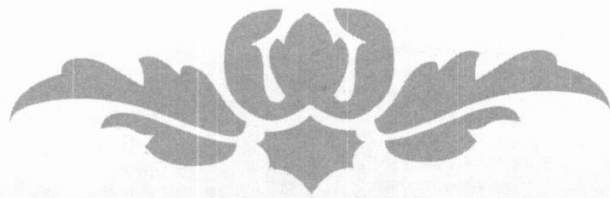
5	Dinas Pendidikan	Guru	7.305	3.503	3.802	48,0	52,0	4,09	1,09
		Pengawas TK/SD/SDLB/PLS	143	137	6	95,8	4,2	-91,61	0,04
6	Dinas Perhubungan	PKB	8	8	0	100	0,0	-100	0,00
7	Dinas Kesehatan	Paramedis/Tenaga Media	586	142	444	24,2	75,8	51,54	3,13
8	RSUD Bojonegoro	Paramedis/Tenaga Media	304	137	167	45,1	54,9	9,87	1,22
9	RSUD Sumberejo	Paramedis/Tenaga Media	43	25	18	58,1	41,9	-16,38	0,72
10	RSUD Padangan	Paramedis/Tenaga Media	38	15	23	39,5	60,5	21,05	1,53
11	Kantor Arsip & Perpustakaan	Arsiparis	1	0	1	0,0	100	100	0,00
	Jumlah		8.616	4.092	4.524	47,5	52,5	5,01	1,11

Sumber data: BKD Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah PNS pada Dinas dan Instansi dalam **jabatan fungsional** di Kabupaten Bojonegoro sampai tahun 2011 secara umum sejumlah 8.616 orang, dengan rincian 4.524 orang adalah perempuan (52.5%), dan laki-laki sejumlah 4.092 pegawai (47.5%). Dari prosentase yang ada dapat diketahui bahwa disparitas laki-laki dan perempuan sebesar 5.01 dan indeksparitas di atas angka absolut yakni 1.1, dapat diartikan bahwa partisipasi perempuan pada PNS jauh lebih baik. Adapun pada konteks indeksparitas di atas nilai absolut berarti posisi laki-laki dan perempuan dikategorikan setara dan memiliki akses yang sama, meskipun ketika dilihat dari jumlah perempuan pada posisi jabatan struktural tidak serta merta selaras dengan jabatan fungsional.

Diagram 7.5
Jumlah PNS Jabatan Fungsional Kabupaten Bojonegoro 2011
Menurut Jenis Kelamin





*Bidang Hukum
dan Sosial Budaya*





den Social Budaya
Bidang Hutan

Bab VIII

Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia mempunyai amanah untuk melindungi hak-hak perempuan setara dengan laki-laki dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dianut berdasarkan Konvensi Wanita yaitu prinsip persamaan substantif, non diskriminasi dan prinsip kewajiban negara dengan mengharmonisasikannya ke dalam hukum nasional sesuai dengan azas kesetaraan dan keadilan gender.

Oleh karena itu, negara tidak saja wajib menjamin persamaan hak secara *de jure* (substansi hukumnya) tetapi juga dari segi *de facto* yaitu dengan mendorong realisasi terwujudnya hak perempuan. Misalnya, mencabut/mengamandemen peraturan, kebijaksanaan, kekuasaan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan dan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang sensitif gender.

Dengan demikian, untuk menegakkan hukum yang berkeadilan gender, pemerintah harus mencegah diskriminasi terhadap perempuan, melarang diskriminasi perempuan, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap perempuan dan menjalankan langkah-langkah untuk mengatasinya, melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminatif terhadap perempuan, memberikan dukungan pada penegakan hak-hak

perempuan dan mendorong persamaan, kesetaraan dan keadilan melalui langkah proaktif, dan meningkatkan persamaan *de facto* perempuan dan laki-laki.

Di samping itu, dalam bidang sosial budaya, pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis kultural sehingga program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan berjalan dengan optimal serta dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

Sebagai gambaran pelaksanaan program penegakan hukum dan sosial-budaya di Kabupaten Bojonegoro, berikut ini adalah pendataan dan penjelasan tentang jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), jumlah penduduk lanjut usia, penyandang cacat, dan program perlindungan sosial terhadap keluarga miskin.

A Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2011 (per Oktober 2011), jumlah keseluruhan narapidana adalah 189 orang. Tabel berikut menunjukkan jumlah penghuni LAPAS berdasarkan data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Tabel 8.1
Jumlah Penghuni LAPAS Kelas II Kabupaten Bojonegoro
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kategori	Buta Huruf	SD	SMP	SMA	PT	Jumlah
1	Laki-laki	5	55	58	40	3	161
2	Anak			14			14
3	Perempuan	2	6	2	3	1	14
Jumlah Total		7	61	74	43	4	189

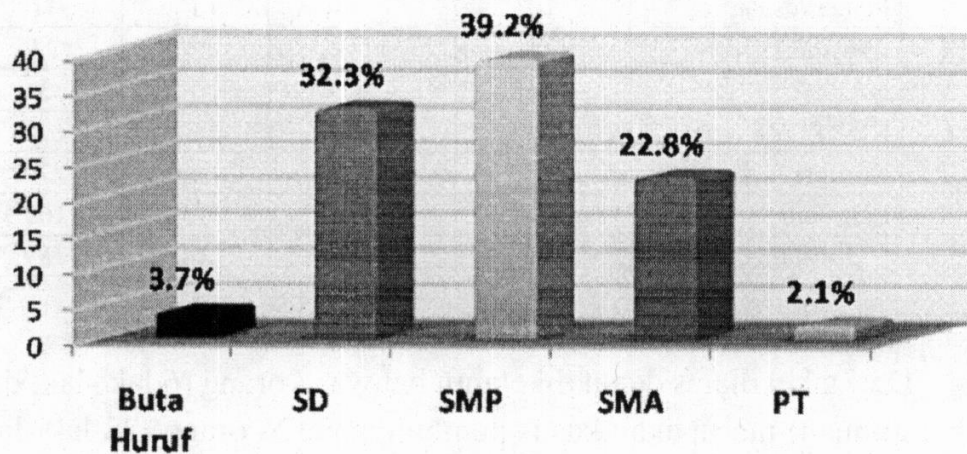
Sumber Data: Lapas Kelas II Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas jumlah penghuni LAPAS di Bojonegoro paling banyak dihuni oleh laki-laki yaitu sebanyak 161 orang, sedangkan jumlah penghuni perempuan dan anak-anak sama yaitu masing-masing 14.

Kemudian jika dilihat dari jenjang pendidikannya, penghuni terbanyak adalah berpendidikan SMP yakni sebanyak 74 orang, terbanyak kedua adalah penghuni dengan berpendidikan SD sebanyak 61, kemudian yang berpendidikan SMA 43 orang, perguruan tinggi 4 orang, dan yang buta huruf berjumlah 7 orang. Jumlah prosentase penghuni LAPAS berdasarkan tingkat pendidikan, bisa digambarkan dalam grafik berikut ini.

Diagram 8.1

**Prosentase Jumlah Penghuni Lapas Kabupaten Bojonegoro 2011
Menurut Jenjang Pendidikan**



Berdasarkan diagram di atas, jumlah penghuni LAPAS menurut tingkat pendidikan, yang paling banyak adalah berpendidikan SMP/ Sederajat sebesar 39%, kemudian yang tamat SD/Sederajat sebesar 32.3%, yang lulusan SMA/Sederajat 22.8%, orang dengan buta huruf sebesar 3.7 % dan lulusan perguruan tinggi sebesar 2.1%.

Jumlah di atas bisa dijelaskan berdasarkan kategori tindak kejahatan yang dilakukan oleh para narapidana di LAPAS Bojonegoro. Pemilihan berdasarakan jenis kasus yang dilakukan penghuni LAPAS dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 8.2
Data Kasus Pidana Kabupaten Bojonegoro 2011
Menurut Jenis Kelamin

No	Kasus	Kategori			
		Laki-laki	Perempuan	Anak	Jml
1	Pembunuhan	6	2		8
2	Pencurian	23	3		26
3	Pemeriksaan	10		1	11
4	Asusila	23			23
5	NAPZA	2	1		3
6	KDRT	2			2
7	Korupsi	6	1		7
8	Lain-lain	89	7	13	109
Jumlah		161	14	14	189

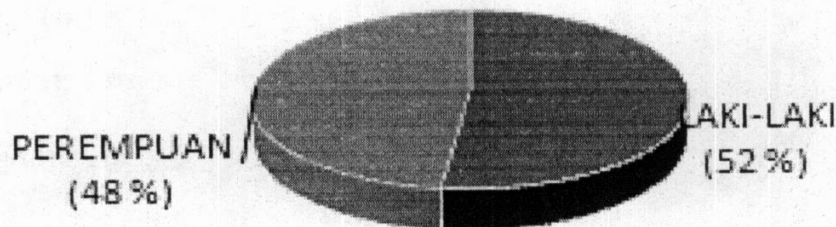
Sumber data: LAPAS Kelas II Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, 8 orang (6 laki-laki dan 2 perempuan) merupakan kasus pembunuhan, 26 orang (23 laki-laki dan 3 perempuan) merupakan kasus pencurian, 11 orang (10 laki-laki dan 1 anak remaja) merupakan kasus pemeriksaan, 23 orang (semuanya laki-laki) merupakan tindak pidana, 3 orang (2 laki-laki dan 1 perempuan) karena kasus narkoba (NAPZA), 2 orang kasus KDRT, 7 orang kasus korupsi, dan kasus lainnya seperti perjudian, pengrusakan, penganiyaan, pembalakan liar atau *illegal logging*, dan lain-lain (109 orang).

B. Jumlah Lansia

Penduduk lanjut usia (lansia) di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 3.870 jiwa. Jumlah ini terdiri dari laki-laki 2.012 jiwa (52 %) dari jumlah keseluruhan dan perempuan 1.870 jiwa (48 %) dari jumlah keseluruhan.

Diagram 8.2
Prosentase Lansia di Kabupaten Bojonegoro 2011
Menurut Jenis Kelamin

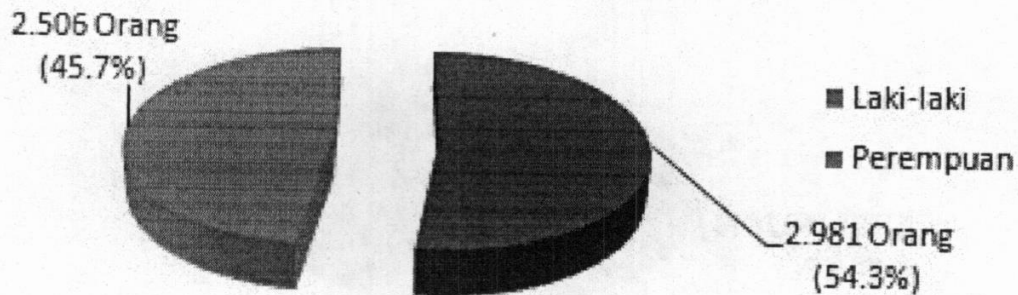


Dilihat dari jumlah lansia yang cukup besar ini sangat perlu untuk mendapat perhatian lebih serius baik dari pihak pemerintah maupun organisasi sosial dan keagamaan yang mempunyai kepedulian terhadap lansia. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mereka sama sekali tidak terserap dalam lapangan usaha, artinya mereka tidak bekerja (menganggur), tidak diketahui pula aktivitas mereka yang produktif.

C. Penyandang Cacat

Penduduk yang menyandang cacat di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 5.487 jiwa. Data pilah berdasarkan jenis kelamin, penyandang cacat laki-laki berjumlah 2.981 dan penyandang cacat perempuan berjumlah 2.506 jiwa. Jika diprosentasekan, jumlah penyandang cacat yang ada di Kabupaten Bojonegoro dapat dijelaskan dalam grafik berikut; penyandang cacat laki-laki lebih banyak dari penyandang perempuan yaitu 54.3% sedangkan yang perempuan 45.0%.

Diagram 8.3
Jumlah Penyandang Cacat Kabupaten
Bojonegoro 2011 Menurut Jenis Kelamin



Jumlah penduduk yang menyandang cacat di atas masih tergolong tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan swasta agar mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Karena berdasarkan data terhimpun, seluruh penyandang cacat tersebut tidak mempunyai aktivitas yang mampu menambah pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

D. Program Perlindungan Sosial

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pemerataan ekonomi yang mampu mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Semakin berkurang jumlah penduduk miskin berarti semakin sukses program pembangunan yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Melihat masih tingginya penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro, perlu upaya lebih optimal lagi terutama dalam percepatan bidang ekonomi dan penyerapan angkatan kerja.

Untuk mengetahui lebih rinci tentang kategori keluarga, dalam buku profil ini disajikan dua versi yaitu data yang bersumber dari Badan PPKB dan data yang bersumber dari Dinas Nakertansos sebagai berikut:

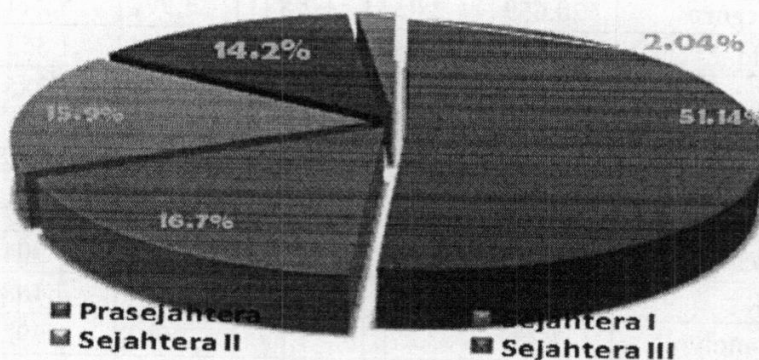
Tabel 8.3
Pentahapan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

NO	Kecamatan	Jml	Tahapan KS				
			Pra S	S 1	S 2	S 3	S3 +
1	Ngraho	13.336	9.347	1.660	795	1.354	180
2	Tambakrejo	15.468	5.975	6.603	2.395	467	28
3	Ngambon	4.132	2.536	977	551	68	0
4	Ngasem	24.734	13.837	7.334	2.026	1.294	143
5	Bubulan	4.543	3.443	346	510	236	8
6	Dander	20.841	9.696	5.593	3.289	2.232	31
7	Sugihwaras	14.035	9.322	383	1.955	1.952	423
8	Kedungadem	25.417	15.989	1.702	1.240	4.827	1.659
9	Kepohbaru	19.218	7.525	6.030	3.815	1.724	124
10	Baureno	22.592	9.987	2.934	2.408	7.008	255
11	Kanor	17.814	9.744	1.658	4.334	1.967	111
12	Sumberejo	21.470	11.768	2.220	2.102	4.469	911
13	Balen	19.364	9.602	4.061	2.503	2.608	590
14	Kapas	14.943	5.331	1.500	5.112	2.883	117
15	Bojonegoro	20.659	2.033	2.883	5.997	8.244	1.502
16	Kalitidu	17.418	7.957	3.531	4.254	1.352	324
17	Malo	9.062	6.635	618	752	785	272
18	Purwosari	8.936	4.541	1.663	1.743	691	298
19	Padangan	11.385	5.257	1.605	2.799	1.478	246
20	Kasiman	8.620	5.370	1.144	1.760	297	49
21	Temayang	11.038	6.397	2.023	1.913	704	1
22	Trucuk	11.430	5.270	665	1.009	4.468	18
23	Margomulyo	7.382	3.876	1.895	1.062	492	57
24	Sukosewu	13.089	8.256	23	3.543	1 237	30
25	Kedewan	3.753	3.027	355	291	80	0
26	Gondang	7.995	4176	2050	1167	492	110
27	Sekar	8.692	5981	1445	731	319	216
Jumlah		377.366	192.978	62.901	60.056	53.728	7.703
Prosentase		100%	51,14%	16,7%	15,9%	14,2%	2,04%

Sumber data: Badan PPKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

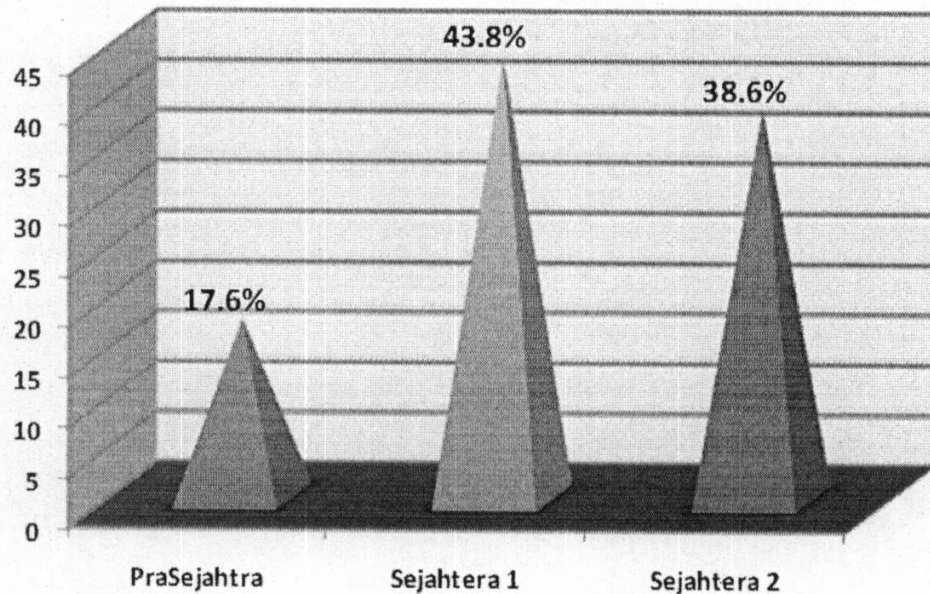
Dilihat dari tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Bojonegoro tahun 2011, dari jumlah keluarga 377.366 yang masih dalam kategori pra sejahtera sebanyak 192.978 KK (51,14%). 62.901 KK (16,7%) tahap keluarga sejahtera I, 60.056 KK (15,9%) tahap keluarga sejahtera II, 53.728 KK (14,2%) tahap keluarga sejahtera III, dan hanya 7.703 KK (2,04%) termasuk kategori keluarga sejahtera plus. Kecamatan Bojonegoro paling rendah jumlah keluarga tahap pra sejahtera dan yang tertinggi tahap sejahtera III plus, sedangkan Kecamatan Kedewan jumlah keluarga pra sejahtera sangat tinggi yaitu dari 3.753 KK, tahap keluarga pra sejahtera mencapai 3.027 KK, dan keluarga sejahtera plus nihil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga sejahtera masih didominasi masyarakat perkotaan, sebaliknya kemiskinan masih terkonsentrasi di pedesaan.

Diagram 8.4
Pentahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2011



Adapun Menurut pendataan Program Perlindungan Sosial Kabupaten Bojonegoro, saat ini penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 128.981 jiwa. Jumlah ini dipilah menjadi 3 kategori yaitu, pra sejahtera (17,6), sejahtera I (43,8), dan sejahtera II (38,6).

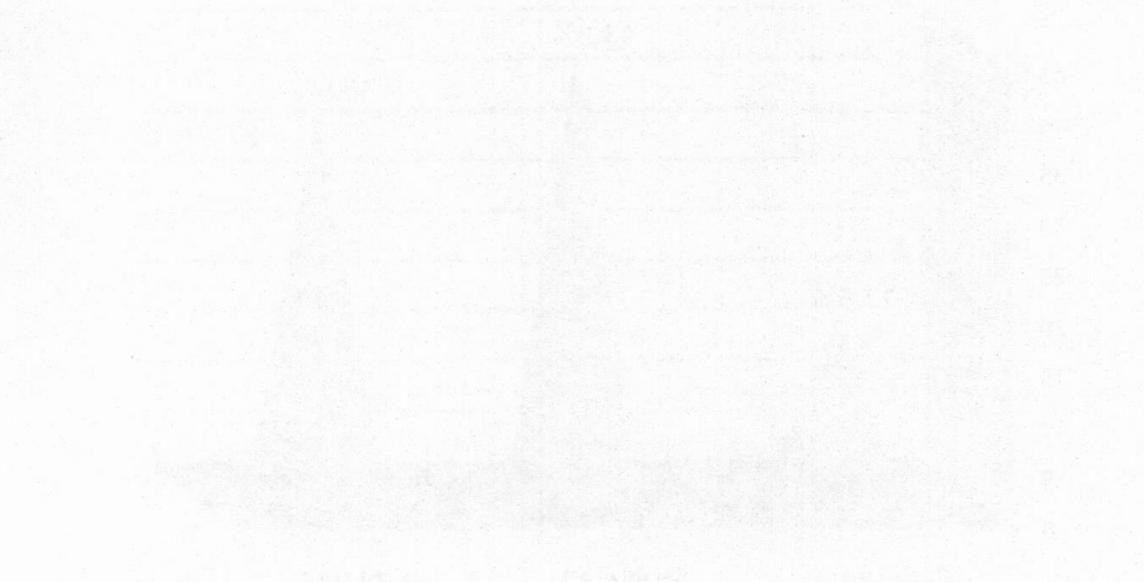
Diagram 8.5
Prosentase Program Perlindungan Sosial



Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi. 17.6% merupakan keluarga pra sejahtera, sedangkan keluarga sejahtera I adalah 43.8%, dan 38.6% kategori keluarga sejahtera II. Untuk itu, program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus terus ditingkatkan dan lebih menyentuh sendi-sendi perekonomian rakyat agar problem kemiskinan bisa teratasi.

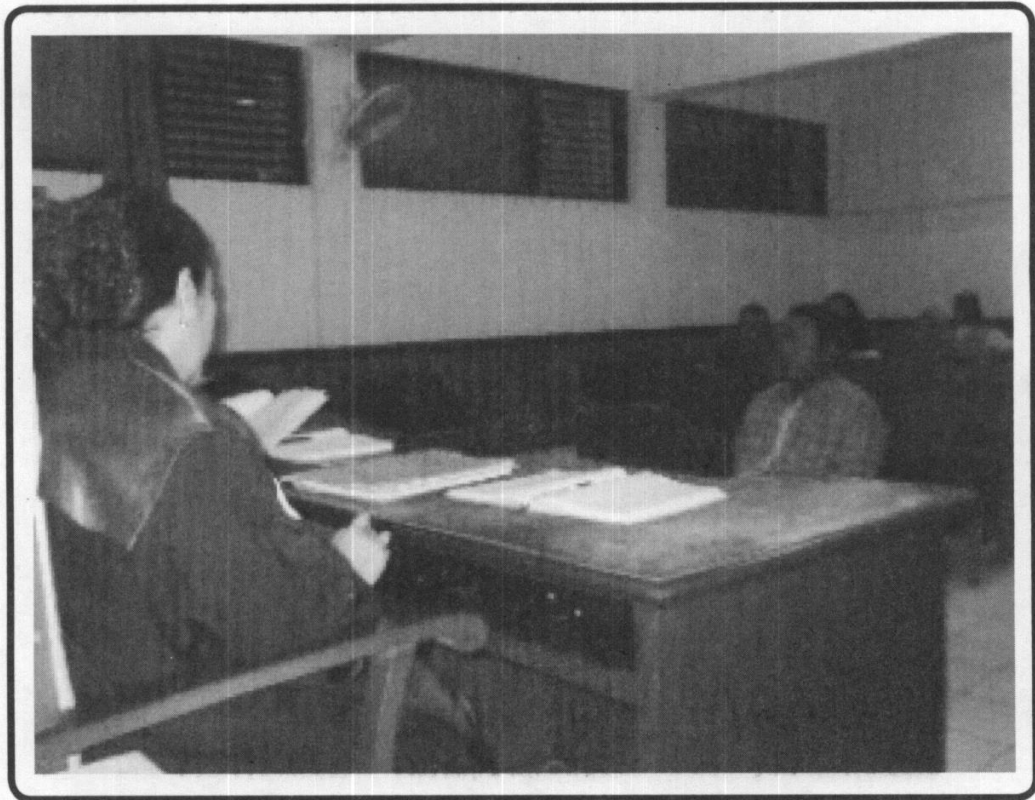
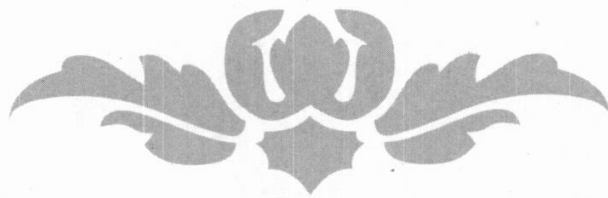
Diagram 2

Control and Feedback Mechanism in a System



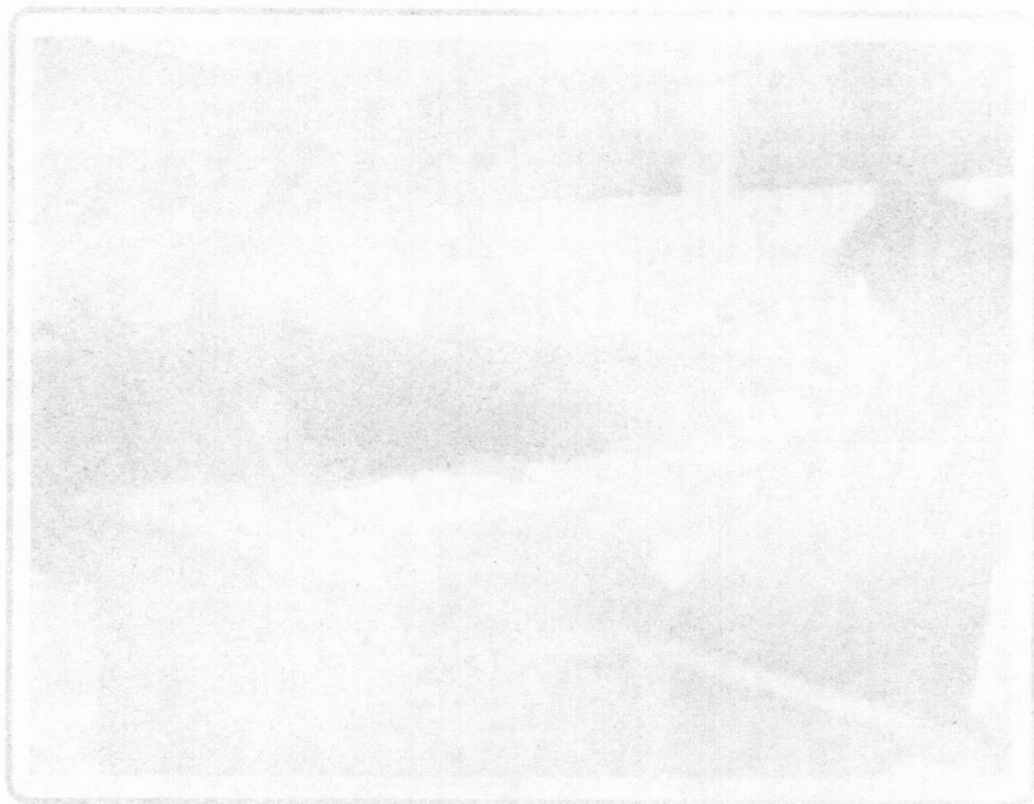
The diagram illustrates a control and feedback mechanism in a system. It shows a Reference Input feeding into a Summing Junction. The Summing Junction outputs to a Controller, which then feeds into a Plant. The Plant outputs to a Feedback block, which feeds back into the Summing Junction. This configuration allows the system to adjust its output based on the difference between the reference input and the feedback signal.

The system is designed to maintain a desired output level by continuously comparing the actual output (feedback) with the reference input. The controller adjusts the plant's input to minimize the error signal at the summing junction. This is a classic negative feedback control loop, which is widely used in engineering and control systems to achieve stable and accurate performance.



Kekerasan Terhadap Perempuan





Verkeken Verkeken Verkeken

Bab IX

Kekerasan Terhadap Perempuan

Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota menyelaraskan undang-undang negara mereka dengan hukum internasional yang terkait dengan pelarangan tindak kekerasan berbasis gender.

Namun demikian, di berbagai daerah masih ada sejumlah peraturan daerah yang mendiskriminasi perempuan dan jumlah kekerasan terhadap perempuan juga masih sering terjadi. Sepanjang tahun 1998 hingga 2011 ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat terdapat 400.939 kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 93.960 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual, dengan perkosaan menempati jumlah terbanyak, 4.845 kasus. Sisanya adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Dari 8.784 kasus kekerasan seksual yang datanya telah terpilah, perkosaan menempati urutan pertama (4.845), berikutnya perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (1.359), pelecehan seksual (1.049), penyiksaan seksual (672). Sisanya antara lain berupa eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga pemaksaan perkawinan.

Menurut Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, salah satu faktor masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah sistem hukum

Indonesia saat ini masih belum memberikan akses yang cukup bagi perempuan korban perkosaan. Misalnya, di KUHP perkosaan hanya diadopsi sebagai bentuk penetrasi alat kelamin laki-laki ke perempuan, dan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. Padahal pengalaman korban menunjukkan perkosaan bisa juga dilakukan dengan jari, benda tumpul atau benda lainnya. Di samping itu, kultur hukum di Indonesia juga masih menghambat korban perkosaan dalam mendapatkan akses keadilan dan hukum. Masih banyak penyelenggara hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban.

Untuk itu, menurut pemerhati masalah sosial dan perempuan, Risa Amrikasari, sebagai komitmen terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah saat ini harus mampu membongkar persepsi budaya yang keliru dan akhirnya menjustifikasi pelanggaran hukum atas kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memaksimalkan usaha untuk menekan jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dengan beberapa langkah strategis dan perlu mensinergikan dengan berbagai kekuatan sosial budaya dalam rangka mencegah meluasnya kekerasan terhadap perempuan.

A. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bojonegoro

Secara umum tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bojonegoro. Data berikut menggambarkan tingkat kekerasan di Kabupaten Bojonegoro baik dari sisi korban maupun pelaku. Kemudian di bagian kedua akan digambarkan kasus perdagangan orang di Kabupaten Bojonegoro.

a. Korban

Untuk melihat jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bojonegoro berikut ini dapat dilihat berdasarkan umur, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status perkawinan, jenis kekerasan, tempat kejadian, frekuensi kekerasan, dan jenis pelayanan yang diberikan. Tabel dan diagram berikut akan menggambarkan masing-masing kategori tersebut.

Tabel 9.1
Perempuan Korban Kekerasan Menurut Umur di Tiap
Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Total
		Anak (0<18 Tahun)	Remaja (18-<25 Tahun)	25 Tahun ke atas	
1	Balen	-	1	-	1
2	Baureno	1	1	2	4
3	Bojonegoro	5	2	7	14
4	Bubulan	1	-	1	2
5	Dander	4	2	-	6
6	Gondang	-	-	-	-
7	Kalitidu	1	-	-	1
8	Kanor	1	-	1	2
9	Kapas	1	1	1	3
10	Kasiman	1	1	1	3
11	Kedewan	-	-	-	-
12	Kedungadem	2	1	-	3
13	Kepohbaru	-	-	-	-
14	Malo	-	-	1	1
15	Margomulyo	-	-	-	-
16	Ngambon	-	-	1	1
17	Ngasem	-	-	1	1
18	Ngraho	2	-	1	3
19	Padangan	-	-	1	1
20	Purwosari	-	1	-	1
21	Sekar	-	-	-	-
22	Sugihwaras	-	-	-	-
23	Sukosewu	-	-	1	1
24	Sumberrejo	1	1	1	3
25	Tambakrejo	5	-	-	5
26	Temayang	3	-	-	3
27	Trucuk	1	-	-	1
Jumlah		29	11	20	60

Sumber data: P3A Kabupaten Bojonegoro 2011

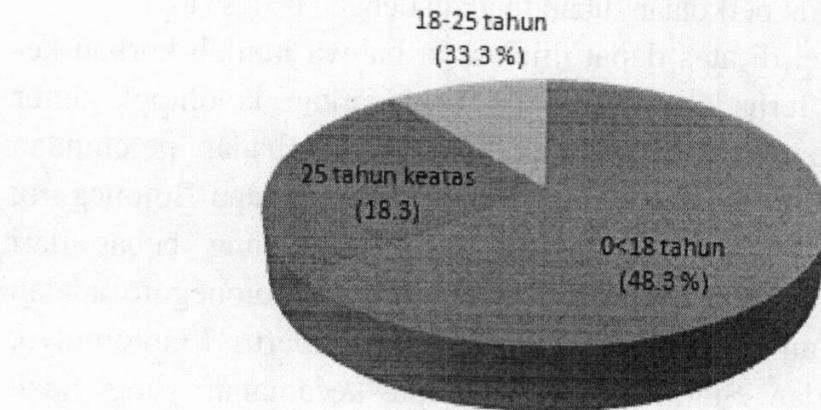
Dilihat dari jumlah korban berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan, maka kecamatan Kota Bojonegoro menempati urutan

pertama (14 kasus). Dengan demikian masyarakat perkotaan cenderung memiliki masalah kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan pedesaan. Hal ini diikuti pula oleh akses terhadap informasi mengenai UU PKDRT yang lebih cepat diterima oleh masyarakat perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kelompok umur sejumlah 60 orang. Tindak kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah di kecamatan Bojonegoro, yaitu 14 orang, sedangkan kecamatan yang bebas dari tindak kekerasan terhadap perempuan di Bojonegoro adalah kecamatan Gondang, Kedewan, Kepohbaru, Margomulyo, Sekar, dan Sugihwaras. Beberapa kecamatan yang tidak memiliki rekaman kasus kekerasan terhadap perempuan, bukan berarti kasus tersebut memang tidak ada di lapangan, melainkan bisa jadi karena mereka tidak memahami adanya undang-undang PKDRT sehingga meskipun terjadi peristiwa kekerasan terhadap perempuan, masyarakat tidak memiliki pengetahuan bahwa kasus tersebut dapat dilaporkan.

Kemudian jika dilihat berdasarkan kelompok umur, jumlah terbanyak adalah anak-anak ($0 < 18$ Tahun) yaitu 29 anak (48.3 %), kemudian terbanyak kedua adalah berumur 25 tahun ke atas sebanyak 20 orang (18.3 %), menyusul remaja sebanyak 11 orang (33.3 %). Jumlah dalam prosentase tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut.

Diagram 9.1
Prosentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Umur
Tahun 2011



Tabel 9.2
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

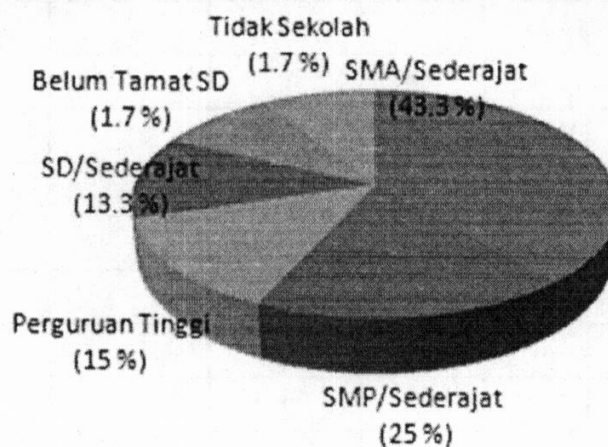
No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					
		Tdk/Blm Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Balen	-	-	-	-	-	1
2	Baureno	-	-	-	1	3	-
3	Bojonegoro	1	-	-	4	7	2
4	Bubulan	-	1	1	-	-	-
5	Dander	-	-	-	1	4	1
6	Gondang	-	-	-	-	-	-
7	Kalitidu	-	-	-	1	-	-
8	Kanor	-	-	-	-	-	-
9	Kapas	-	-	-	1	1	1
10	Kasiman	-	-	-	-	3	-
11	Kedewan	-	-	-	-	-	-
12	Kedungadem	-	-	-	2	1	-
13	Kepohbaru	-	-	-	-	-	-
14	Malo	-	-	-	-	-	1

15	Margomulyo	-	-	-	-	-	-
16	Ngambon	-	-	-	-	1	-
17	Ngasem	-	-	1	-	-	-
18	Ngraho	-	-	-	1	1	1
19	Padangan	-	-	-	-	-	1
20	Purwosari	-	-	-	-	1	-
21	Sekar	-	-	-	-	-	-
22	Sugihwaras	-	-	-	-	-	-
23	Sukosewu	-	-	-	-	-	1
24	Sumberrejo	-	-	1	1	1	-
25	Tambakrejo	-	-	5	-	-	-
26	Temayang	-	-	-	2	1	-
27	Trucuk	-	-	-	5	-	-
Jumlah: 60		1	1	8	15	24	9

Sumber data: P3A Kabupaten Bojonegoro 2011

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Bojonegoro yang paling banyak adalah berpendidikan SMA/Sederajat yaitu 26 orang, SMP/ sederajat berjumlah 15 orang, perguruan tinggi 9 orang, SD 1 orang, dan tidak bersekolah 1 orang. Kalau diprosentasekan jumlah tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut:

Diagram 9.2
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut
Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011



Tabel 9.3

**Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status
Pekerjaan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011**

No	Kecamatan	Status Pekerjaan					
		Wira swasta	Tdk bekerja	Buruh/ Karyawan	Buruh Tani Lepas	Pekerja non pertanian	Pelajar
1	Balen		1				
2	Baureno		3			1	
3	Bojonegoro	5	4	3			2
4	Bubulan		1				1
5	Dander		2	1			3
6	Gondang						
7	Kalitidu						1
8	Kanor		1				1
9	Kapas		2	1			
10	Kasiman		2				1
11	Kedewan						
12	Kedungadem			1			2
13	Kepohbaru						
14	Malo			1			
15	Margomulyo						
16	Ngambon				1		
17	Ngasem	1					
18	Ngraho		2				1
19	Padangan			1			
20	Purwosari		1				
21	Sekar						
22	Sugihwaras						
23	Sukosewu			1			
24	Sumberrejo					1	2

25	Tambakrejo						5
26	Temayang		1			1	1
27	Trucuk						1
Jml: 60		6	20	9	1	3	21

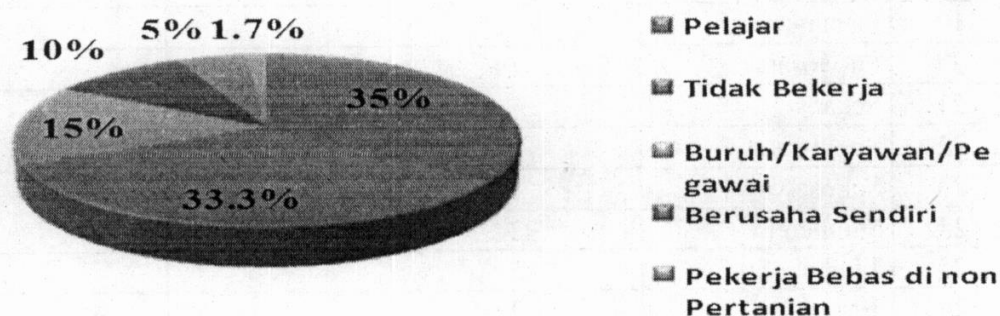
Sumber data: P3A Kabupaten Bojonegoro 2011

Kemudian jika dilihat dari status pekerjaan para korban tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bojonegoro yang paling banyak adalah masih berstatus pelajar yakni sebanyak 21 orang (35 %), tidak bekerja sebanyak 20 orang (33.3 %), berusaha sendiri sebanyak 9 orang (6 %), bekerja di sektor non-pertanian sebanyak 3 orang (5 %), dan bekerja di sektor pertanian 1 orang (1,7 %).

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada diagram berikut ini.

Diagram 9.3

**Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
Berdasarkan Status Pekerjaan**



Tabel 9.4**Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten
Bojonegoro 2011 Menurut Status Perkawinan**

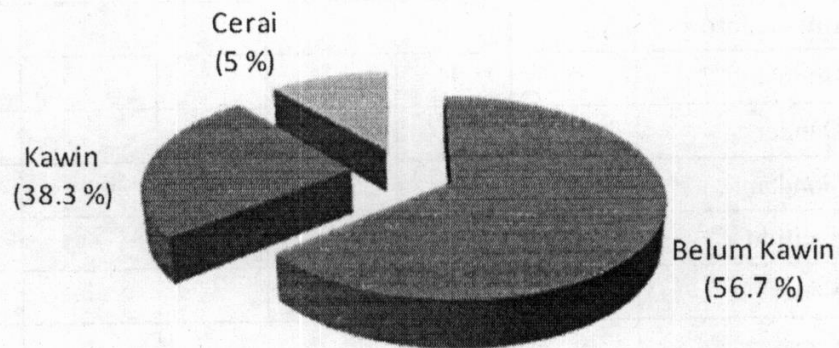
No	Kecamatan	Status Perkawinan		
		Belum Kawin	Kawin	Cerai
1	Balen		1	
2	Baureno	1	3	1
3	Bjonegoro	6	7	
4	Bubulan	1	1	
5	Dander	6		
6	Gondang			
7	Kalitidu	1		
8	Kanor	1	1	
9	Kapas		2	1
10	Kasiman	1	2	
11	Kedewan			
12	Kedungadem	2	1	
13	Kepohbaru			
14	Malo		1	
15	Margomulyo			
16	Ngambon		1	
17	Ngasem			1
18	Ngraho	2	1	
19	Padangan		1	
20	Purwosari	1		
21	Sekar			
22	Sugihwaras			
23	Sukosewu	1		
24	Sumberejo	2	1	
25	Tambakrejo	5		
26	Temayang	3		
27	Trucuk	1		
Juml: 60		34	23	3

Sumber data: P3A Kabupaten Bojonegoro 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa korban tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bojonegoro kalau dilihat dari status perkawinannya, yang paling dominan adalah yang

belum kawin yakni sebanyak 34 orang (56.7 %), sedangkan yang sudah kawin sejumlah 23 orang (38.7), dan 3 orang (5 %) berstatus cerai. Jumlah tersebut, jika diprosentasekan bisa digambarkan dalam diagram berikut :

Diagram 9.4
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten
Bojonegoro 2011 Menurut Status Perkawinan



Tabel 9.5
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Bojonegoro
Tahun 2011 Menurut Jenis Kekerasan

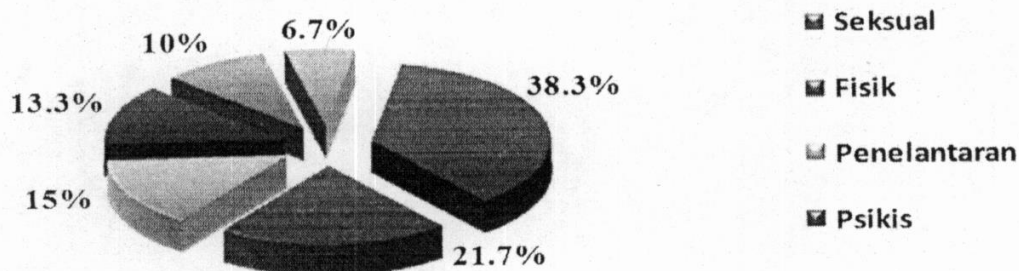
No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lain2
1	Balen	1					
2	Baureno	2		2	1		
3	Bojonegoro	2	2	5		3	2
4	Bubulan	1	1				
5	Dander			4	2		
6	Gondang						
7	Kalitidu			1			
8	Kanor			1		1	
9	Kapas	1				1	1
10	Kasiman		2	1			
11	Kedewan						
12	Kedungadem	2					1
13	Kepohbaru						
14	Malo		1				
15	Margomulyo						
16	Ngambon	1					
17	Ngasem					1	
18	Ngraho			2		1	
19	Padangan		1				
20	Purwosari				1		
21	Sekar						
22	Sugihwaras						
23	Sukosewu					1	
24	Sumberejo	1		2			

25	Tambakrejo	2		2		1	
26	Temayang			2			1
27	Trucuk			1			
Jml: 60		13	7	23	4	9	5

Sumber data: P3A Kabupaten Bojonegoro 2011

Kemudian berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban, tabel di atas menggambarkan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk tindak kekerasan yang paling sering menimpa korban yakni 23 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 13 kasus, penelantaran 9 kasus, 8 kasus kekerasan psikis, tindak pidana perdagangan orang 4 kasus, dan tindak kekerasan lainnya 6 kasus. Jika diprosentasekan, jenis kekerasan yang ditimpa oleh para korban dapat digambarkan dalam diagram berikut.

Diagram 9.5
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Bojonegoro
Tahun 2011 Menurut Jenis Kekerasan



Dari berbagai jenis kekerasan yang dialami perempuan di Bojonegoro tersebut kebanyakan terjadi di dalam rumah tangga yakni 36 kasus, di tempat kerja 2 kasus, dan 22 kasus terjadi selain di rumah tangga dan tempat kerja. Sedangkan frekuensi kekerasan yang terjadi ada 17 kasus baru dan hanya satu kasus kekerasan yang berulang. Akibat dari berbagai kasus kekerasan tersebut ada 42 orang yang harus dirujuk ke rumah sakit setempat.

Kemudian jenis pelayanan yang telah diberikan untuk membantu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bojonegoro adalah dua jenis pelayanan yakni menyediakan media pengaduan, yakni ada 29 kasus yang diadukan dan ada 31 kasus yang telah diproses di pengadilan dan masih dalam pendampingan.

b. Pelaku

Dalam penjelasan sebelumnya tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bojonegoro dilihat berdasarkan data korban, berikut ini akan dijelaskan berdasarkan pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 9.6

**Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Di Bojonegoro
Tahun 2011 Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Kab/Kota	Tidak /Belum Sekolah		Belum Tamat SD		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		Per- guruan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Balen									1			
2	Baureno									4			
3	Bojonegoro							2		8	2	3	
4	Bubulan							1				1	
5	Dander							1		3			
6	Gondang												
7	Kalitidu									1			
8	Kanor									1		1	
9	Kapas							1		2			
10	Kasiman									2		1	
11	Kedewan												
12	Kedungadem									1		2	
13	Kepohbaru												
14	Malo											1	
15	Margomulyo												
16	Ngambon									1			
17	Ngasem									1			
18	Ngraho									2		1	
19	Padangan									1			
20	Purwosari												
21	Sekar												
22	Sugihwaras												

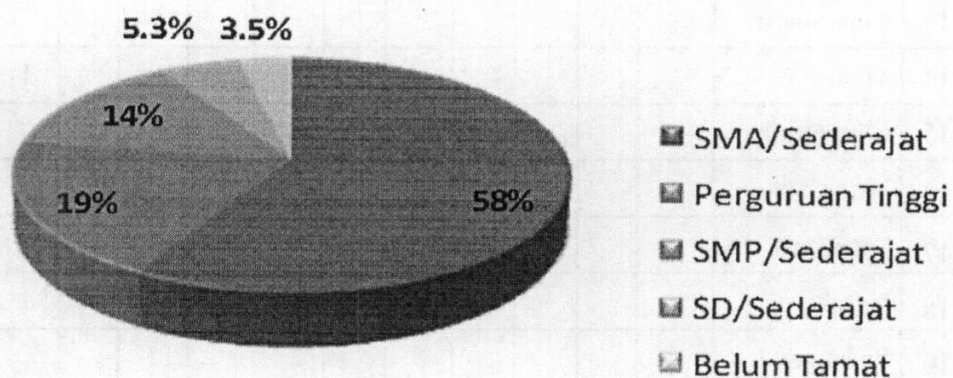
23	Sukosewu										1	
24	Sumberrejo						3					
25	Tambakrejo			3		2						
26	Temayang								2			
27	Trucuk								1			
Jml: 57				3		2		8		31	2	11

Sumber data: P3A Kabupaten Bojonegoro 2011

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bojonegoro adalah 57 orang, yakni 55 laki-laki dan 2 perempuan. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, mereka mayoritas tamatan SMA/ sederajat yakni 33 orang (58%), 11 orang lulusan perguruan tinggi (19%), 8 orang tamatan SMP/ sederajat (14%), 3 orang lulusan SD/ sederajat (5.3%), dan 2 orang tidak tamat SD/ sederajat (3.5%).

Diagram 9.6

Pelaku Tindak Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Menurut Tingkat Pendidikan



Tabel 9.7
Pelaku Tindak Kekerasan Di Bojonegoro
Menurut Jenis Pekerjaan

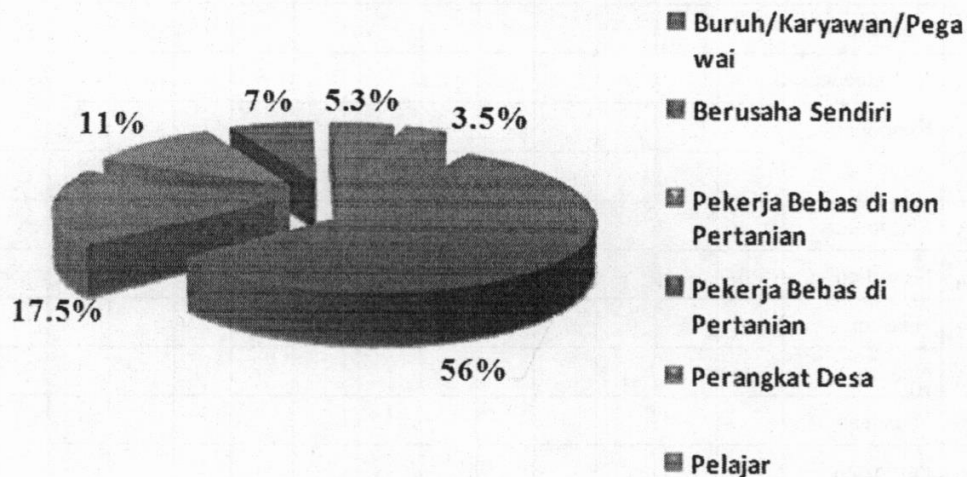
No	Kecamatan	Berusaha sendiri		Perangkat Desa		Berusaha dibantu buruh tetap		Buruh/ Karyawan/ Pegawai		Pekerja bebas di pertanian		Pekerja bebas di non pertanian		Pekerja keluarga	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Balen											1			
2	Baureno	1						1			1	1			
3	Bojonegoro	3	1					9				1		1	
4	Bubulan							2							
5	Dander	1						1				2			
6	Gondang														
7	Kalitidu	1													
8	Kanor							2							
9	Kapas	2						1							
10	Kasiman			1				2							
11	Kedewan														
12	Kedungadem							2		1					
13	Kepohbaru														
14	Malo							1							
15	Margomulyo														
16	Ngambon			1											
17	Ngasem							1							
18	Ngraho			1				2							
19	Padangan							1							
20	Purwosari														
21	Sekar														
22	Sugihwaras														
23	Sukosewu							1							
24	Sumberrejo							1		1		1			
25	Tambakrejo							4		1					
26	Temayang	1						1							

27	Trucuk												1	
Jumlah: 57		9	1	3				32		3	1	6		2

Sumber data: P3A Kabupaten Bojonegoro 2011

Kemudian jika dilihat dari status pekerjaan, mayoritas para pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bojonegoro adalah berasal dari orang-orang yang sudah bekerja baik sebagai buruh, karyawan, maupun pegawai yaitu 56 % atau 32 orang, kemudian 10 orang punya usaha sendiri (17.5%), 6 orang merupakan pekerja bebas di sektor non pertanian (11%), 4 orang adalah pekerja bebas di sektor pertanian (7%), 3 orang merupakan perangkat desa (5.3%) dan 2 orang masih berstatus sebagai pelajar (3.5%). Jumlah prosentase tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut.

Diagram 9.7
Jumlah Pelaku Tindak Kekerasan Di Bojonegoro
Berdasarkan Status Pekerjaan



Sedangkan jika dilihat dari hubungan pelaku dengan korban, mayoritas pelaku ternyata masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban bahkan ada yang orang tua korban sendiri yang melakukannya. Tabel berikut menjelaskan jumlah pelaku berdasarkan hubungannya dengan korban.

Tabel 9.8

**Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Hubungan
Dengan Korban di Kabupaten Bojonegoro 2011**

No	Kecamatan	Hubungan dengan Korban							
		Orang Tua		Keluarga		Suami		Lainnya	
		L	P	L	P			L	P
1	Balen					1			
2	Baureno			1		2		1	
3	Bojonegoro	1	1			8		5	
4	Bubulan					1		1	
5	Dander							4	
6	Gondang								
7	Kalitidu			1					
8	Kanor					1		1	
9	Kapas					2		1	
10	Kasiman					2		1	
11	Kedewan								
12	Kedungadem					1		2	
13	Kepohbaru								
14	Malo					1			
15	Margomulyo								
16	Ngambon					1			
17	Ngasem							1	
18	Ngraho			1		1		1	
19	Padangan					1			
20	Purwosari								
21	Sekar								
22	Sugihwaras								
23	Sukosewu					1			
24	Sumberrejo	1				1		1	

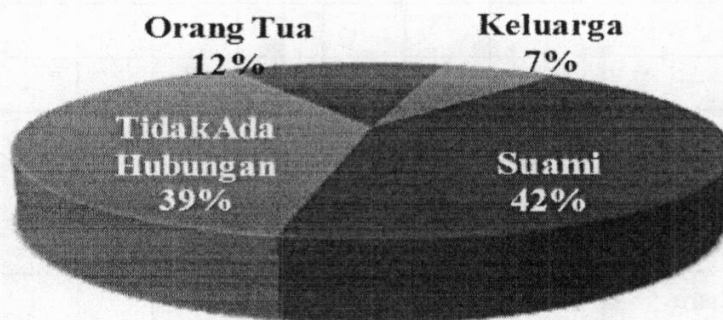
25	Tambakrejo	3					2	
26	Temayang			1				
27	Trucuk						1	
		5	1	4		24	22	

Sumber data: P3A Kabupaten Bojonegoro 2011

Jika diprosentasekan, jumlah di atas secara rinci bisa digambarkan dalam diagram berikut; suami sebagai pelaku menempati urutan paling banyak yaitu 24 kasus (42.1%), orang tua sebanyak 7 kasus, keluarga dekat 4 kasus, dan yang lain pelakunya adalah orang lain bahkan ada yang belum diketahui pelakunya.

Diagram 9.8

Jumlah Pelaku Dalam Hubungannya Dengan Korban



B. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking) menurut umur di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 4 orang perempuan. 1 orang berasal dari Baureno, 2 orang dari Dander, dan 1 orang dari Purwosari. Jika dilihat berdasarkan umur mereka, 2 orang masih tergolong remaja (< 18 tahun) dan 2 orang < 25 tahun. Menurut tingkat pendidikannya, keempat korban tersebut 1 orang lulusan SMP/ sederajat dan 3 orang tamatan SMA/ sederajat. Adapun menurut status perkawinan adalah 1 orang sudah kawin dan 3 orang belum menikah.

Jenis Pelayanan yang diberikan kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking).

Dari keempat kasus yang terjadi tersebut, jenis pelayanan yang diberikan untuk membantu korban adalah melakukan proses identifikasi masalah kemudian dilakukan pendampingan untuk dicarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi korban. Proses Hukum Pelaku Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Trafiking). Dari hasil identifikasi dan pendampingan yang telah dilakukan, 3 korban akhirnya bisa dipulangkan, dan masih tinggal 1 korban yang belum bisa terselesaikan masalahnya.

Untuk menangani berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang (trafiking) yang terjadi di Bojonegoro tersebut, menurut Kepala Divisi Advokasi Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro, Ummu Hanik, telah dilakukan langkah konkret mulai dari sosialisasi undang-undang sampai proses secara hukum.

Hasilnya adalah ada yang diselesaikan secara hukum hingga ke tingkat pengadilan, ada pula yang berakhir dengan jalan damai karena berbagai pertimbangan, seperti pelaku maupun korban sama-sama pelajar dan bayi yang ada dalam kandungan si perempuan membutuhkan status sebagai anak yang perlu memiliki orangtua.

Untuk menekan jumlah kasus kekerasan seks terhadap anak, pihak P3A terus menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan P3A didukung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan para pegiat hukum. Misalnya seperti yang telah dilakukan oleh Kepolisian. Juru bicara Kepolisian Resor Bojonegoro, Inspektur Satu Subarata mengatakan bahwa kasus-kasus kekerasan seks yang dilaporkan ke Kepolisian seluruhnya diteruskan hingga penuntutan di pengadilan.

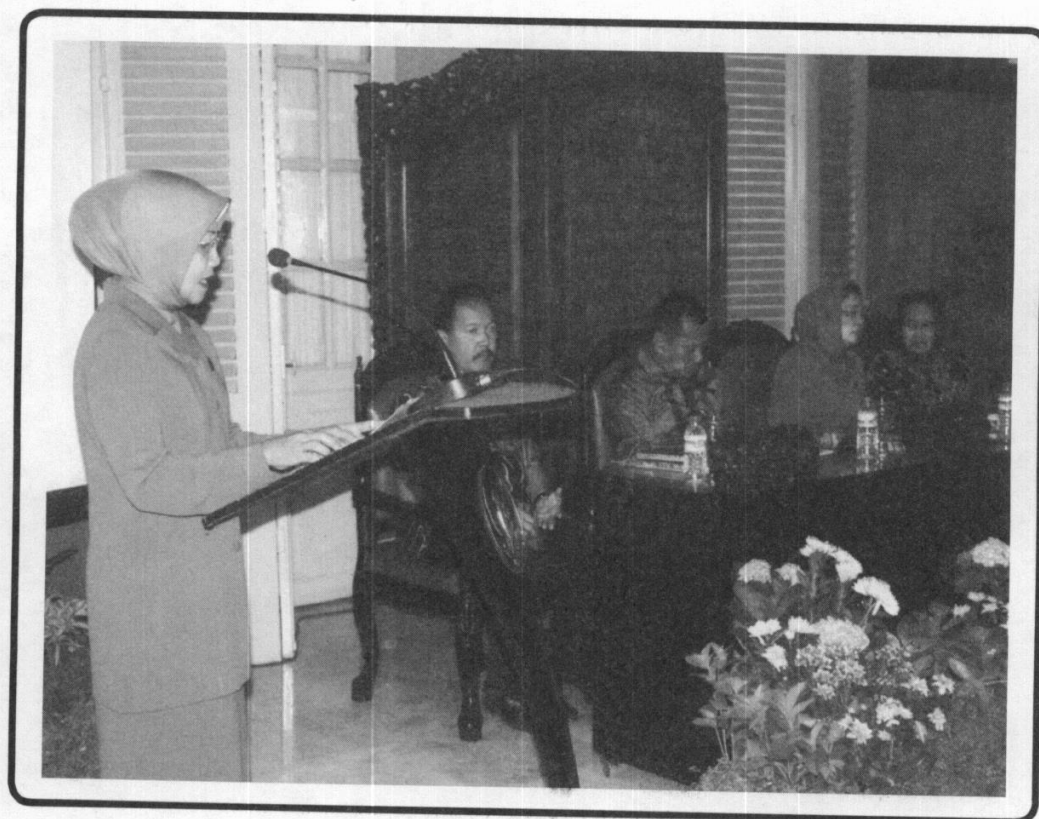
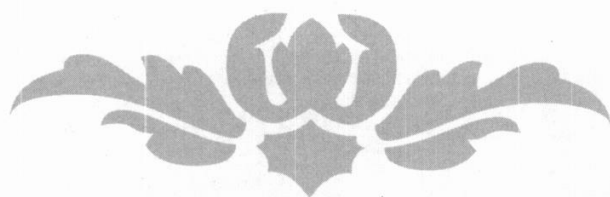
Das folgende ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung. Die Ergebnisse sind in drei Hauptbereiche unterteilt: 1. Die Ergebnisse der Untersuchung der ... 2. Die Ergebnisse der Untersuchung der ... 3. Die Ergebnisse der Untersuchung der ...

Die Ergebnisse der Untersuchung der ... sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der Untersuchung der ... in der folgenden Tabelle dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchung der ... sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der Untersuchung der ... in der folgenden Tabelle dargestellt.

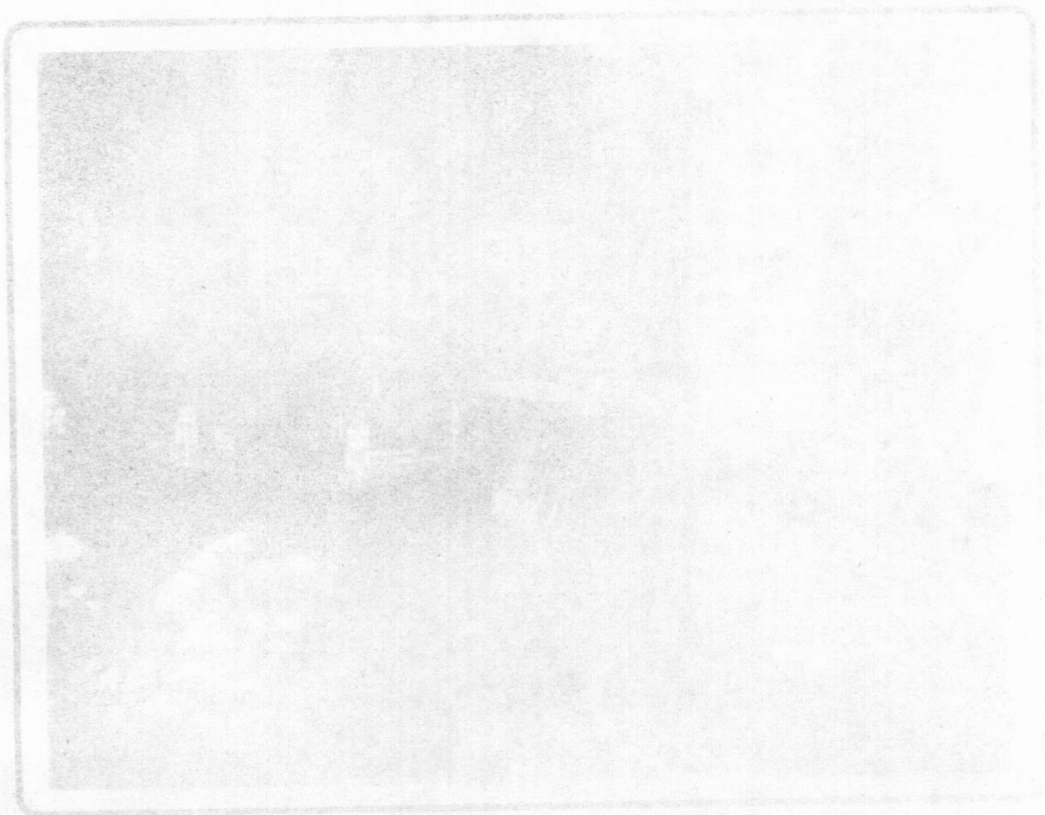
Die Ergebnisse der Untersuchung der ... sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der Untersuchung der ... in der folgenden Tabelle dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchung der ... sind in der folgenden Tabelle dargestellt.



*Isu-isu Strategis Kesenjangan
Gender di Kabupaten Bojonegoro*





General di Kapupaten Bojonegoro
Kedudukan Strategis Keselamatan

Bab X

Isu-isu Strategis Kesenjangan Gender di Kab. Bojonegoro

Sebagaimana tercantum dalam Misi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 yaitu:

1. Meningkatkan keshalehan sosial masyarakat yang didukung oleh pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara murni dan konsekuen;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai daya utama pembangunan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan;
4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Namun demikian Kabupaten Bojonegoro masih menyisakan isu-isu strategis pembangunan upaten Bojonegoro meliputi:

1. Kemiskinan;
2. Pengangguran;
3. Pelayanan pendidikan;
4. Pelayanan kesehatan;

5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Infrastruktur; dan
7. Manajemen pemerintahan. (RPJMD Kab. Bojonegoro 2008-2013).

Untuk itu diperlukan berbagai strategi pembangunan untuk mengatasi isu-isu tersebut yang antara lain adalah pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender agar seluruh warga masyarakat di Kabupaten Bojonegoro baik laki-laki maupun perempuan memiliki kontribusi dan juga mendapatkan kesejahteraan yang berkeadilan gender.

Dengan memperhatikan data yang tersaji pada bab-bab sebelumnya, perlu dibahas secara khusus isu-isu strategis tentang kesenjangan gender dan perempuan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2011. Adapun isu-isu tersebut meliputi:

1. Kesenjangan pada peran pengambilan keputusan publik.

Salah satu isu kesenjangan gender di Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2011 ini adalah masih rendahnya peran pengambilan keputusan publik. Data yang diperoleh pada bab sebelumnya bahwa mulai dari posisi perempuan pada berbagai jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, jumlah Hakim, Jaksa, dan Polisi, jumlah anggota DPRD perempuan, jumlah dan posisi perempuan dalam kepengurusan partai politik, pengurus dan anggota LKMD, Kepala Desa dan Camat di Kabupaten Bojonegoro seluruhnya masih jauh dari kuota 30% sebagaimana yang diharapkan.

Jumlah pegawai negeri sipil laki-laki 56,3% sedangkan perempuan 43,7%. Data ini seolah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sebagai PNS mengalami kesenjangan tetapi telah melampaui kuota 30%. Jika diuraikan lebih rinci akan tampak bahwa kesenjangan terjadi hampir merata. Komposisi PNS pada Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disparitas yang ditemukan agak lebih dekat yaitu -7,03% dengan indek paritasnya 0,87. Hal ini disebabkan oleh sumbangan jumlah PNS dari Dinas Pendi-

dikan yaitu pada posisi jabatan fungsional guru perempuan surplus dengan disparitasnya mencapai 4,09 dan indek paritasnya 1,09. Jumlah ini juga diperkuat oleh posisi tenaga medis dan para medis pada Dinas Kesehatan perempuan surplus mencapai 75,8%, laki-laki hanya 24,2% sehingga pada jabatan fungsional pada Dinas ini disparitasnya sangat tinggi 51,54 dengan indek paritas 3,13.

PNS pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD mengalami disparitas yang cukup signifikan yaitu -0,23 dengan indek paritasnya 0,51. Lain halnya ketika diperhatikan kesenjangan gender PNS pada Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disparitasnya cukup signifikan yaitu -26,4 dengan indek paritas 0,6. Dari delapan Badan dimaksud yang menunjukkan telah berkesetaraan gender adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB yaitu laki-laki 49,7% dan perempuan mencapai 50,3% sehingga disparitas yang ditemukan hanya 0,6 dengan indek paritas 1,0. Sumbangan terbesar dari Badan PPKB ini adalah tenaga penyuluh KB perempuan mencapai 56,6% sedangkan laki-laki 44,4% sehingga disparitasnya 13,25 dengan indek paritas 1,31. Demikian pula PNS pada tiga Kantor yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kesenjangan lebih signifikan -58,14 dengan indek paritas mencapai 0,26. PNS di lingkungan 27 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro disparitasnya sangat signifikan yaitu -68,7 dengan indek paritas 0,18. Kondisi ini sangat berbeda dengan PNS yang berada di lingkungan RSUD Kab. Bojonegoro hingga tahun 2011 ini prosentase perempuan menunjukkan surplus yakni 53,13%, sedangkan laki-laki 46,87% sehingga disparitasnya mencapai 6,26 dengan indek paritas 1,13.

Surplus perempuan secara umum juga menggambarkan bahwa masih ada kesenjangan gender pada PNS yang disebabkan gender *stereotype* pada peran dan tanggung jawab tertentu sebagai PNS. Pada Dinas Pendidikan misalnya, guru di tingkat pendidikan Dasar mayoritas diperankan oleh perempuan, sekalipun pada jenjang lebih atas hingga perguruan tinggi laki-laki justru lebih mendominasi. Anggapan bahwa guru untuk anak-anak yang masih kecil terutama pada

pendidikan anak usia dini (PAUD) dianggap oleh masyarakat sebagai peran yang dekat dengan pengasuhan dan perawatan yang pantas dilakukan oleh ibu/perempuan. Anggapan bahwa peran-peran tersebut sebagai kelanjutan dari peran reproduksi sosial dalam keluarga bahkan secara umum masih sangat lekat pada mindset masyarakat.

Pada Dinas Kesehatan terjadi kesenjangan yang lebih tinggi lagi dari sumbangan posisi PNS di bidang tenaga medis dan para medis. Hampir sama dengan argumentasi di atas bahwa merawat dan melayani tidak hanya di wilayah domestik saja, perempuan juga dianggap cocok untuk peran ini di lingkungan publik hingga profesi yang ditekuni seperti perawat di Rumah Sakit. Di satu sisi, memang diperlukan pemenuhan kebutuhan gender praktis untuk memberikan pelayanan medis khusus yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan menyusui, sehingga Perawat, Bidan dan Dokter Spesialis Kandungan lebih nyaman bagi pasien perempuan. Namun yang sering terjadi bahwa profesi yang diperankan perempuan ini masih mengalami hambatan dalam promosi jabatan struktural di lingkungan RSUD. Hingga tahun 2011 Kepala Rumah Sakit selalu laki-laki. Dalam perspektif gender, fenomena ini disebabkan oleh stigmatisasi bahwa perempuan lemah, tidak tegas, kurang cerdas, kurang memiliki tanggung jawab, kurang tegas, tidak pantas dan sebagainya harus diakui masih menjadi hambatan bagi perempuan dalam meniti karier untuk kemajuan pembangunan Daerah.

Kesenjangan lebih mencolok ketika posisi perempuan pada jabatan struktural dari tingkat eselon IIb hingga eselon IVb perempuan mengalami kesenjangan dengan laki-laki. Eselon IIb perempuan hanya 1 orang sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Jabatan yang bertitel perempuan ini saja yang ditempati perempuan karena jika dipegang oleh laki-laki dianggap kurang cocok. Jumlah perempuan pada jabatan eselon IIIa sebanyak 6 orang, sedangkan laki-laki 48 orang. Eselon IIIb laki-laki sebanyak 102 orang, perempuan hanya 20 orang. Pada eselon IVa laki-laki mencapai 426 orang. Adapun eselon IVb laki-laki sebanyak 118 orang, perempuan 45 orang. Posisi Jabatan Camat yang dipegang oleh perempuan hanya

laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang secara dikotomis disetting dalam budaya yang masih mengunggulkan jenis kelamin laki-laki. Sebagai kepala keluarga, laki-laki diberi peran publik seperti pencari nafkah, pemimpin dan pelindung keluarga, di mana akses mereka pada ranah publik sebagai dasar akses dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik lebih dominan. Sedangkan perempuan biasanya mengambil peran publik yang tidak banyak sebagai pengambil keputusan, seperti kegiatan sosial kemasyarakatan yang lebih menekankan pada peran pelayanan dan peran-peran lain sebagai pendukung keputusan laki-laki.

Partisipasi perempuan di Polres Kabupaten Bojonegoro terlihat belum setara. Dari 1.021 personil yang terdiri dari Pangkat Perwira Menengah, Perwira Pertama hingga Bintara jumlah perempuan hanya 28 orang. Dilihat dari posisi kepangkatanpun hanya ada 2 Perwira Pertama dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi, dan selebihnya (28 personil) pada pangkat Bintara. Dengan demikian masih diperlukan perubahan mindset bahwa peran perempuan sebagai polisi bukan hal yang menakutkan atau dikonsepkan sebagai peran maskulin, dekat dengan keperkasaan tetapi polisi wanita (Polwan) adalah mulia dan diperlukan sebagai pengayom, pelindung dan mitra masyarakat sebagaimana laki-laki.

Pada lembaga Yudikatif, khususnya partisipasi perempuan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro masih menunjukkan kesenjangan. Laki-laki 71%, perempuan 29%. Demikian pula peran perempuan sebagai jaksa, masih terjadi kesenjangan 58,3% laki-laki dan 41,7% perempuan, meski kesenjangan dimaksud tidak terlalu mencolok. Kesenjangan ini juga tidak lepas dari pandangan bahwa perempuan dicitrakan sebagai makhluk lemah yang tidak cocok berperan untuk mengambil keputusan yang menyangkut penegakan hukum, sehingga masih ditemukan hambatan psikologis bagi perempuan yang akan mengakses peran hakim atau jaksa karena dianggap sebagai peran yang beresiko tinggi.

3 kecamatan yaitu Camat Bojonegoro, Camat Kalitidu, dan Camat Trucuk. Sedangkan Kepala Desa sebanyak 419 orang dengan rincian laki-laki sejumlah 389 orang (93%) perempuan hanya 29 orang, 1 orang Lurah (7%).

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa realitasnya perempuan masih belum setara dalam menduduki jabatan struktural yang disebabkan oleh, *Pertama*, stereotype bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki sehingga posisi di masyarakat ditentukan oleh pandangan ini; *Kedua*, akibat posisi dianggap tidak setara maka perempuan lebih ditempatkan sebagai subordinat dari laki-laki sehingga promosi jabatan dan kepangkatan biasanya dipengaruhi oleh pandangan gender seseorang.

Jumlah kepengurusan partai masih sangat minim. Dari 472 jumlah pengurus dari 15 partai, laki-laki 79,7%, sedangkan perempuan hanya 20,3% sehingga disparitasnya mencapai -59,4 dengan indeks paritas 0,25. Demikian pula jika dilihat dari posisi perempuan dalam kepengurusan juga kurang strategis untuk diproyeksikan sebagai calon legislatif oleh partainya. Hal ini berdampak terjadinya kesenjangan gender pada partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Dari seluruh jumlah anggota DPRD Kab. Bojonegoro 50 orang, perempuan hanya 9 orang (18%), sedangkan laki-laki 41 orang (82%). Karena jumlah perempuan sangat minim sehingga penyebaran perempuan dalam Komisi sangat terbatas. Perempuan 1 orang pada Komisi A dan C, 3 orang pada Komisi B dan 4 orang pada Komisi D. Anggota DPRD perempuan 50% pada Komisi D ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa Komisi ini membidangi pendidikan, kesehatan, sosial dan kesejahteraan, di mana peran-peran yang diemban diasumsikan kelanjutan dari peran ibu rumah tangga sebagai pemelihara, pengasuh dan perawat. Pandangan ini tidak lepas dari konstruksi sosial di masyarakat bahwa perempuan sebagai “konco wingking” dalam budaya Jawa sehingga perempuan ditempatkan pada komisi yang lebih dekat dengan peran domestik reproduktif.

Peran perempuan di lembaga Desa (LKMD) hanya 2% (26 orang) dari sejumlah 1.301 orang anggota. Kondisi ini dipengaruhi oleh posisi

2. Kesenjangan pada peran ekonomi

Berdasar Misi ketiga Kabupaten Bojonegoro adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat secara merata dan berkeadilan. Untuk itu tujuan dan sasaran pembangunan Daerah adalah untuk, *Pertama*, mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari; *Kedua*, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan perkapita penduduk dan penurunan angka pengangguran secara signifikan. (RPJMD Kab. Bojonegoro 2008-2013).

Tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan misi tersebut harus dibangun ekonomi yang berkesetaraan gender, agar sumber daya manusia di Kab. Bojonegoro produktif, sejahtera dan berkeadilan. Mengingat jumlah kepala keluarga yang tidak bekerja mencapai 6,2%. Jika dilihat dari Kecamatan tertinggi kepala keluarga yang tidak bekerja mencapai 12%.

Isu kesenjangan gender di bidang ekonomi berdasarkan data pada bab sebelumnya bahwa pelaku ekonomi di Kabupaten Bojonegoro masih terjadi kesenjangan gender meskipun tidak signifikan. Laki-laki 51,6%, perempuan 48,4%. Jumlah anggota Koperasi juga terjadi kesenjangan, laki-laki 57,6%, perempuan 42,4%. Disparitas gender terjadi pada partisipasi perempuan sebagai peminjam kredit. Pada Bank Jatim laki-laki 54%, perempuan 46% dengan jumlah pinjaman laki-laki 58% dan 42% perempuan, Bank BPRD Bojonegoro, laki-laki 66%, perempuan 44% dengan jumlah pinjaman 71,8%, perempuan hanya 28,2%, dan pada Bank BRI, laki-laki 76%, perempuan 24% dengan jumlah pinjaman 77% laki-laki dan hanya 23% perempuan.

Dari data di atas menggambarkan terjadi kesenjangan gender jika semata-mata dilihat dari jenis pinjaman dan peminjam, namun perlu dikaji ulang penggunaan pinjaman dimaksudkan untuk tujuan pengembangan produksi atau konsumsi. Ketika pinjaman tersebut di-

maksudkan sebagai kegiatan produktif maka partisipasi perempuan dalam mengakses permodalan cenderung rendah dibandingkan laki-laki, tetapi jika hal ini dinilai sebagai pinjaman konsumtif, maka perempuan lebih dapat dikembangkan satuan analisis data terkait dengan fungsi dan nilai guna dari pinjaman tersebut.

3. Kesenjangan pada bidang pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu dari tiga indikator capaian indek pembangunan manusia. Dalam salah satu indikator *Millenium Development Goals* adalah tercapaian pendidikan dasar khususnya bagi perempuan, sehingga pembangunan bidang pendidikan diarahkan menghapus buta huruf dan menekan jumlah anak putus sekolah. Sebagaimana tertuang dalam Misi 2 Kab. Bojonegoro adalah “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya utama pembangunan”. Dengan sasarannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan.

Dalam salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Bojonegoro adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dengan sasarannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun Indikator sasaran; *Pertama*, meningkatkan angka melek huruf masyarakat; *Kedua*, meningkatkan angka rata-rata lamanya penduduk bersekolah. (RPJMD Kab. Bojonegoro 2008-2013).

Hingga tahun 2011 data menunjukkan masih ada anak-anak putus sekolah sebanyak 602 anak di Kab. Bojonegoro dengan rincian, tingkat SD 51 anak, laki-laki 72,6% dan anak perempuan 27,4%. Di tingkat SMP sebanyak 16 anak, laki-laki 37,5%, anak perempuan 62,5%. Sedangkan jumlah anak putus sekolah di tingkat SMA dan sederajat jumlahnya cukup fantastis yaitu 535 anak, laki-laki 73,6% dan anak perempuan 26,4%. Anak laki-laki mendominasi dari seluruh jumlah anak putus sekolah.

Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi faktor pendukung terjadinya putus sekolah terutama tingkat pendidikan me-

nengah atas. Pada masyarakat yang masih menonjolkan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama juga turut menyumbang tingginya anak laki-laki putus sekolah karena menggantikan peran ayah sebagai pencari nafkah terutama. Hal ini lebih rentan di kalangan masyarakat miskin. Jika data ini dikomparasikan dengan data jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Bojonegoro masih signifikan yaitu tahapan keluarga pra sejahtera mencapai 51,14%, artinya separuh lebih keluarga di Kabupaten Bojonegoro hidup dalam kondisi belum sejahtera. Dengan demikian jika keluarga semakin sejahtera akan semakin kecil jumlah anak putus sekolah.

4. Kesenjangan pada bidang kesehatan

Salah satu isu strategis Kabupaten Bojonegoro adalah pelayanan kesehatan. Menurut data yang terekam pada bab sebelumnya, terdapat kesenjangan pada jumlah pasangan usia subur (PUS) dengan jumlah akseptor KB baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah PUS 279.842, sedangkan akseptor KB 179.697 orang. Artinya, masih ada 100.145 PUS yang tidak terdaftar sebagai akseptor KB. Untuk itu perlu dilakukan pendataan lebih lanjut dari PUS non akseptor KB tersebut apakah menggunakan KB tradisional atau sedang bermasalah dengan kesehatan reproduksinya.

Pada masyarakat pedesaan di kalangan keluarga miskin dan pola hidup yang kurang memperhatikan kesehatan reproduksi, sering timbul masalah kesehatan reproduksi tetapi akses mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan masih terbatas yang disebabkan juga oleh jarak tempuh tempat tinggal dengan Puskesmas atau dokter, terbatasnya transportasi, serta kepedulian masyarakat terhadap masalah kesehatan reproduksi. Untuk itu tidak hanya meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi sebagai akseptor KB tetapi juga diperhatikan pula dampak penggunaan dan pendampingan untuk keamanan dan kenyamanan sebagai pengguna alat kontrasepsi KB tersebut. Dalam hal ini perempuan yang sering mengaami resiko lebih berat dibanding laki-laki, sehingga kesehatan ibu menjadi prioritas pula dalam kesehatan keluarga.

5. Kekerasan terhadap perempuan

Dalam penetapan indikator kinerja daerah tercantum bahwa untuk Urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi; Pertama, program peningkatan kualitas hidup; Kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia; Ketiga, program pemberdayaan perempuan dan anak, serta meningkatnya jumlah peranan lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. (RPJMD Kab. Bojonegoro 2008-2013).

Data yang terekam dari Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi, kendatipun sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terus dilakukan oleh P3A dan semua pihak seperti berbagai organisasi wanita dan kelompok masyarakat. Medan sosial seperti TP-PKK, pengajian-pengajian dan berbagai forum juga tidak luput dari sasaran sosialisasi bahkan sebagian di antara mereka telah menjadi *Focal Point* pendamping kasus (paralegal) yang aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dilihat dari penyebaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, terdapat 21 Kecamatan yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat perkotaan lebih tinggi kasus KDRT dibanding dengan masyarakat pedesaan. Kasus kekerasan terhadap perempuan, menurut teori fenomena gunung es di tengah laut bahwa besaran jumlah kasus yang dilaporkan merupakan sebagian kecil kasus yang tampak di masyarakat. Karena itu bukan berarti kecamatan yang bebas dari kasus ini tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan, dan bukan pula di luar jumlah yang terdata oleh pihak berwajib dan pendamping benar-benar nihil. Sebab kasus kekerasan terutama KDRT sering terjadi tetapi tidak dilaporkan yang disebabkan oleh; Pertama, KDRT merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutup, bahkan korban masih menaruh harapan pada pasangannya agar suatu waktu akan berubah menjadi baik; Kedua, ketidakpahaman perempuan korban atau bahkan pelaku terhadap UU PKDRT yang diterapkan di

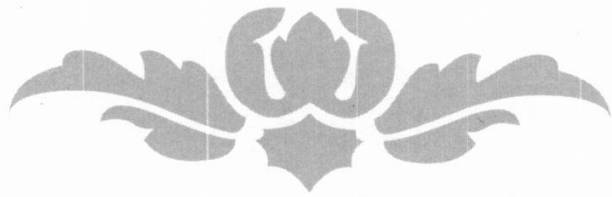
Indonesia; *Ketiga*, korban takut melapor karena diancam oleh pelaku; *Keempat*, kekhawatiran nasib korban terutama masalah ekonomi keluarga ketika pelaku dipenjara.

Dilihat dari usia korban, dari 60 perempuan korban kekerasan anak-anak menempati urutan tertinggi yaitu 29 (hampir separuh), urutan kedua usia korban di atas 25 tahun (20 orang) dan usia 18-15 tahun sebanyak 11 orang. Dengan demikian perempuan korban kekerasan terjadi pada semua kategori usia di atas. Dilihat dari tingkat pendidikan korban juga menunjukkan penyebarannya mulai tidak/belum sekolah hingga sarjana. Lulus SMA menempati urutan pertama (26 orang). Dari status pekerjaan korban juga bervariasi, tetapi pelajar mencapai 21 anak, dan yang tidak bekerja (bias jadi ibu rumah tangga) sebanyak 20 orang. Selebihnya bekerja di berbagai sektor. Dilihat dari status perkawinan, 34 korban masih belum menikah, artinya korban kekerasan telah dialami perempuan sebelum hidup bersama suami mereka. Jika dikomparasikan dengan data status korban mayoritas adalah masih pelajar berarti remaja putri di Kabupaten Bojonegoro perlu disosialisasikan kiat-kiat khusus untuk menghindari dari kekerasan berbasis gender atau lainnya, di samping semua warga masyarakat diwajibkan menghindari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dari jenis kekerasan yang dialami perempuan, bentuk kekerasan seksual (23 korban) tertinggi, menyusul kekerasan fisik, penelantaran dan kekerasan psikis. Kategori kekerasan yang terekam ini perlu pula diteliti lebih lanjut, sebab setiap kekerasan biasanya tidak tunggal, tetapi bisa jadi kekerasan ganda atau multi.

Dari sisi pelaku, kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh mayoritas laki-laki yang berpendidikan SMA dengan status pekerjaan buruh/karyawan. Dilihat dari hubungan pelaku dengan korban, suami menempati urutan tertinggi (42,1%), menyusul tidak ada hubungan keluarga (38,6%), orang tua 12,3%, dan ada hubungan keluarga 7%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bojonegoro masih perlu mendapatkan perhatian oleh semua pihak terutama stakeholder kunci sebagai pengambil kebijakan diharapkan melakukan langkah-langkah efektif

dalam mengatasi masalah ini. Sebab salah satu penghambat partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan adalah kekerasan dalam berbagai bentuknya.



Denutup





Don't know

Bab XI

Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian bab per bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa, gambaran umum Kabupaten Bojonegoro masih menunjukkan kesenjangan gender. Kesenjangan ini terjadi pada peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik, baik pada posisi pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Di lingkungan lembaga legislatif dan judikatif juga belum menggambarkan adanya kesetaraan gender, seperti jumlah dan posisi kepangkatan personil polisi, hakim dan jaksa juga masih jauh dari harapan. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat Desa/Kelurahan juga terjadi disparitas yang sangat tinggi. Di bidang ekonomi, perempuan sebagai pelaku ekonomi juga masih bias gender. Gejala ini dilihat pada mayoritas peran perempuan di sektor usaha ekonomi mikro, sedangkan laki-laki lebih pada ekonomi makro, jumlah anggota Koperasi dan UKM, pinjaman kredit dan jumlah pinjaman juga terjadi kesenjangan.

Isu-isu gender yang terekam di lapangan bahwa masih tingginya putus sekolah pada murid laki-laki di tingkat SMA, dan murid perempuan di tingkat SMP. Pada sektor kesehatan sudah menunjukkan adanya partisipasi laki-laki sebagai akseptor KB tetapi data menunjukkan belum setara. Kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga juga masih terus bertambah meskipun sosialisasi UU PKDRT gencar dilakukan. Bentuk kekerasan yang dilakukan mayoritas adalah kekerasan seksual dengan tingkat pendidikan dan usia pelaku bervariasi.

Kesetaraan gender terdapat pada jumlah partisipasi sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Jumlah guru laki-laki dan perempuan juga hampir setara. Jika dilihat dari jumlah tenaga medis di Rumah Sakit justru menunjukkan tidak setara karena surplus pada jumlah perempuan. Secara umum jumlah laki-laki dan perempuan yang menempati jabatan fungsional hampir setara dengan kontribusi dari BPPPKB dan Dinas Pendidikan, tetapi pada SKPD lainnya tidak menunjukkan gejala yang sama, bahkan cenderung terjadi disparitas yang tinggi.

Secara khusus perlu ditegaskan bahwa Kabupaten Bojonegoro secara eksplisit belum mencantumkan “kesetaraan gender” dalam Renstra 2008-2013, meskipun Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender telah terbentuk.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data dan isu-isu kesenjangan gender dalam pembahasan, perlu direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait antara lain;

1. Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro perlu dikuatkan melalui *capacity building* tentang pembangunan berwawasan gender bagi para pejabat di setiap satuan kerja.
2. Mendorong dan mengondisikan PNS perempuan dalam promosi jabatan terutama jabatan struktural.
3. Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro perlu dioptimalkan komitmen dan aksinya, agar keberadaan *gender focal point* dapat berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan mediator di lingkungan SKPD masing-masing.
4. Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah menerima sejumlah penghargaan di tingkat Propinsi dan Nasional. Penghargaan ini merupakan modal untuk memotivasi pada pengambil kebijakan dan pihak-pihak terkait di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya mempertahankan tetapi juga mengembangkan dan

- meningkatkan prestasi di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender melalui satuan kerja masing-masing.
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam Renstra Daerah pada periode yang akan datang, agar secara eksplisit dapat menjamin pembangunan berwawasan gender dan menjadi tolok ukur implementasi PUG dalam pembangunan daerah.
 6. Untuk meningkatkan kompetensi dan budaya kerja yang ramah gender bagi pegawai negeri sipil, diperlukan integrasi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam materi pelatihan dan workshop di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 7. Diperlukan keterlibatan masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara aktif dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan baik di ranah publik maupun kekerasan dalam rumah tangga, agar terwujud keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Daftar Pustaka

- Cattleya, Leya, 2006, *Pelembagaan Akuntabilitas Pengarusutamaan Gender: Bukan sesuatu yang Mustahil*, Jurnal Perempuan No. 50, Tahun 2006, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Darwin, Muhadjir M., 2005, *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Wacana
- Mufidah Ch, 2007, *Pandangan Para Pengambil Kebijakan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Penelitian)*.
- , 2010, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, Malang: UIN Maliki Press.
- Nazir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalla Indonesia.
- Parawansa, Khofifah Indar, 2006, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi Pemikiran Tentang Keserasian Gender*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro 2009-2013.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparman, Surjadi, 2006, *Mengapa Gender Mainstreaming Menjadi Aksi Nasional*, Jurnal Perempuan No. 50, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

- Stainback, Susan & William Stainback, *Understanding and Concluding Research* (Virginia: Kendall/Hunt Publishing Company, 1988).
- Tim Penyusun, 1992, *Buku III: Pengantar Teknik Analisis Jender*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Umar, Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina.
- Whitney, 1960, F.L., *The Elements of Research*, New York: Prentice Hall Inc.
- Subhan, Zaitunah, 2002, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi.
- United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, 2010, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*, Makalah Kebijakan.

PRESTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER KABUPATEN BOJONEGORO

NO	PRESTASI	LOKASI	TINGKAT
1	Penghargaan Manggala Karya Kencana	Kab. Bojonegoro	Nasional
2	Juara 1 Penghargaan MURI KB IUD	Kab. Bojonegoro	Nasional
3	Juara 1 Penghargaan MURI Implant dengan 6.011 akseptor	Kab. Bojonegoro	Nasional
4	Juara 1 Penghargaan Pencapaian Implant tertinggi	Kab. Bojonegoro	Nasional
5	Juara 1 Penghargaan Pengelola KB Kecamatan dengan pencapaian Implant tertinggi	Kecamatan Kepohbaru	Nasional
6	Juara 1 lomba Kelompok KB Pria	Desa Mojoranu Kec. Dander	Provinsi Jawa Timur
7	Juara 3 Lomba Keluarga Harmonis sejahtera	H. AGUS FAISAL,S.AG - UMI HAMIDAH,S.AG Desa Padangan Kec. Padangan	Provinsi Jawa Timur
8	Juara 2 Lomba KB Lestari Kategori 10 Tahun	H. AGUS FAISAL,S.AG - UMI HAMIDAH,S.AG Desa Padangan Kec. Padangan	Provinsi Jawa Timur
9	Juara 1 Population Award(Kategori Kuantitas Penduduk)	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
10	Juara 1 Lomba P2WKSS	Desa Sumberrejo Kec. Sumberrejo	Provinsi Jawa Timur
11	Juara 1 Lomba Pelaksana Terbaik KB Award	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
12	Juara 1 Pencapaian Peserta KB Baru Semua Metode	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
13	Juara 1 Peserta KB Baru MKJP	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
14	Juara 1 Pencapaian Peserta KB Baru Wanita	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
15	Juara 1 Pencapaian Peserta KB Baru Implant	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

KESETARAAN GENDER KABUPATEN BOJONEGORO PRESTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NO	PRESTASI	LOKASI	TINGKAT
1	Penghargaan Marga Karya Kencana	Kab. Bojonegoro	Nasional
2	Juara 1 Penghargaan MURI KB IUD	Kab. Bojonegoro	Nasional
3	Juara 1 Penghargaan MURI Implan	Kab. Bojonegoro	Nasional
4	Juara 1 Penghargaan Pencapaian Implan dengan 601 akseptor	Kab. Bojonegoro	Nasional
5	Juara 1 Penghargaan Pencapaian Implan tertinggi	Kecamatan Kephahan	Nasional
6	Juara 1 Lomba Kelompok KB Pria	Desa Mojorini Kec. Dander	Provinsi Jawa Timur
7	Juara 3 Lomba Keluarga Harmonis sejahtera	H. AGUS FAISAL S. AG - UMI HAMIDAH S. AG Desa Padangan Kec. Padangan	Provinsi Jawa Timur
8	Juara 2 Lomba KB Lestari Kategori 10 Tahun	H. AGUS FAISAL S. AG - UMI HAMIDAH S. AG Desa Padangan Kec. Padangan	Provinsi Jawa Timur
9	Juara 1 Population Award (Kategori Kuantitas Penduduk)	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
10	Juara 1 Lomba P2WKSS	Desa Sumberjo Kec. Sumberjo	Provinsi Jawa Timur
11	Juara 1 Lomba Pelaksana Terbaik KB Award	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
12	Juara 1 Pencapaian Peserta KB Baru Senus Metode	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
13	Juara 1 Peserta KB Baru MKJP	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
14	Juara 1 Pencapaian Peserta KB Baru Wanita	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
15	Juara 1 Pencapaian Peserta KB Baru Implan	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur



Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro



UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang